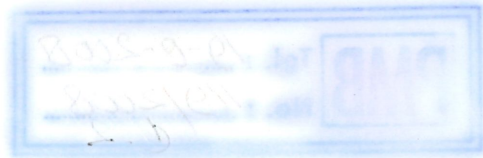


# **STRATEGI ASEAN DALAM PERLUASAN ASEAN + 3**



Yasmin Sungkar  
Awani Irewati  
Dewi Fortuna Anwar  
Ratna Shofi Inayati  
Zatni Arbi



Pusat Penelitian Politik  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
2005

## KATALOG DALAM TERBITAN

Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN + 3 / Yasmin Sungkar (et al). -  
Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan  
Indonesia, 2005  
iii + 133 hlm.

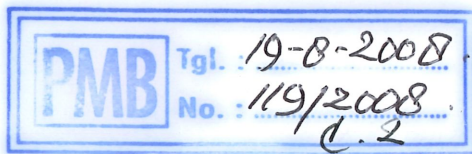
ISBN 979-3673-98-2

I. Southeast Asia

I. Sungkar, Yasmin

Klas : 959

**Penerbit :** LIPI Press, Anggota IKAPI  
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591  
e-mail : [bmrlipi@uninet.net.id](mailto:bmrlipi@uninet.net.id)  
[lipipress@uninet.net.id](mailto:lipipress@uninet.net.id)



### Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN + 3

Copyright© 2005 Pusat Penelitian Politik-LIPI  
Gedung Widya Graha, Lt. XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan  
Telp/Fax.: (021) 5207118  
Sumber Gambar Sampul: Foto Koleksi Yasmin Sungkar

## KATA PENGANTAR

Penelitian *Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN + 3* merupakan salah satu dari sembilan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam DIPA Tahun Anggaran 2005.

Penelitian ini dilaksanakan dengan personalia sebagai berikut:

1. Dr. Yasmin Sungkar (Koordinator)
2. Dra. Awani Irewati, MA (Anggota)
3. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA, APU (Anggota)
4. Ratna Shofi Inayati, MBA (Anggota)
5. Drs. Zatni Arbi, MA (Anggota)

Sebelum menjadi naskah akhir, laporan penelitian ini telah dibahas dalam Seminar Akhir Hasil Penelitian P2P LIPI di Wisma Jasasena TNI AL Cipayung, Bogor yang mengundang Pembahas dari luar P2P, baik dari LIPI maupun non LIPI.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para peneliti dan staf administrasi P2P LIPI, serta para peneliti dari luar P2P LIPI yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan atau kekeliruan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai adanya saran maupun kritik demi penyempurnaan laporan-laporan penelitian kami di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2005  
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

**Dr. Ikrar Nusa Bhakti**  
NIP. 320004778

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Bab I</b> <b>Pendahuluan</b> .....	1
<i>Yasmin Sungkar</i>	
<b>Bab II</b> <b>Perkembangan ASEAN Menuju Komunitas ASEAN</b> .....	17
<i>Zatni Arbi</i>	
<b>Bab III</b> <b>Evolusi dan Signifikansi ASEAN + 3: Dinamika Internal dan Eksternal</b> .....	25
<i>Yasmin Sungkar</i>	
<b>Bab IV</b> <b>Perkembangan Kerja Sama Perdagangan ASEAN dan Asia Timur</b> .....	47
<i>Ratna Shofi Inayati</i>	
<b>Bab V</b> <b>Ide Perluasan Komunitas Asia Timur: Dinamika Internal ASEAN</b> .....	69
<i>Awani Irewati</i>	
<b>Bab VI</b> <b>Tantangan Perluasan Komunitas Asia Timur ...</b>	91
<i>Dewi Fortuna Anwar</i>	
<b>Bab VII</b> <b>Kesimpulan dan Rekomendasi</b> .....	117
<i>Yasmin Sungkar</i>	
<b>Daftar Pustaka</b>	127
<b>Lampiran</b>	133



# Bab I

## PENDAHULUAN

*Yasmin Sungkar*

### **Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang menimpa kawasan Asia pada tahun 1997 telah menunjukkan ketidakberdayaan negara-negara ASEAN untuk mengatasi krisis tersebut. Situasi ini memicu mereka untuk berpaling kepada negara tetangga terdekatnya di kawasan Asia Timur, yaitu Jepang, China dan Korea Selatan. Kenyataan ini mendorong terbentuknya kerjasama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur melalui forum ASEAN+3. Efek domino dari krisis ekonomi tersebut menunjukkan suatu realitas adanya interdependensi di antara perekonomian negara-negara tersebut. Dua hal yang menjadi landasan kerjasama di kawasan Asia Timur ini adalah prinsip saling ketergantungan dan saling melengkapi. Dalam perkembangannya, proses kerjasama ASEAN+3 tampaknya masih akan terus memperluas cakupan bidang kerjasamanya dan bahkan terbuka kemungkinan memperluas keanggotaan sekaligus wilayahnya. Jika kerjasama ekonomi merupakan kerjasama yang utama, maka India, Australia dan Selandia Baru tidak dapat dilupakan. Bagaimana kerjasama regional baru ini bisa mengimbangi *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan organisasi lainnya yang jauh lebih berpengalaman merupakan salah satu isu penting. APEC merupakan organisasi penting karena keanggotaannya yang besar, terutama dengan adanya Amerika Serikat sebagai salah satu anggotanya. Amerika mendukung berkembangnya mekanisme baru ini dengan harapan kerjasama ASEAN+3 nantinya akan menjadi katalisator bagi perkembangan APEC ke depan. ASEAN+3 menekankan kerjasama yang *outward-looking* dan bukan merupakan kerjasama yang eksklusif. Kerjasama ini terbuka bagi negara lain

sehingga diharapkan ASEAN+3 dapat menjadi katalisator guna membantu memulihkan dan sekaligus mencegah krisis ekonomi di kawasan Asia.

Regionalisme yang melibatkan ASEAN dan China, Jepang serta Korea Selatan, pertama kali memperoleh momentum dengan adanya kebutuhan akan konsensus dalam *ASEAN European Meeting* (ASEM) 1996. Pengelompokan ASEAN+3 ini secara riil semakin diperkuat dengan adanya inisiatif regional untuk mengatasi krisis ekonomi Asia pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1997. Inisiatif Chiang Mai menyetujui pembentukan *ASEAN Swap Arrangement* (ASA) yang mencakup semua negara ASEAN dan memperluasnya dengan suatu jaringan pengaturan *Bilateral Swap Arrangements* (BSAs) antara negara-negara ASEAN dan Jepang, Korea Selatan dan China.<sup>1</sup> Inisiatif ini mengikat ketigabelas negara untuk menilai kebijakan masing-masing di bidang finansial. Inisiatif Chiang Mai merupakan langkah pelaksanaan kerjasama ASEAN+3 yang paling jauh. Mereka menyetujui suatu sistem *swaps* mata uang yang membolehkan suatu negara meminjam dari negara lain dalam jangka pendek untuk mempertahankan diri terhadap spekulasi mata uang secara besar-besaran dan ketidakstabilan finansial. Hal ini sangat berkaitan dengan fluktuasi mata uang yang merupakan sebab krisis keuangan Asia tahun 1997. Sejak itu KTT *ASEAN Plus Three* (APT) diadakan setiap tahun dan pertemuan berbagai tingkat antara ASEAN dan ketiga negara tersebut diadakan secara rutin.

Kerjasama regional juga semakin berkembang di bidang birokrasi, akademik dan budaya. Berbagai pertemuan diadakan di antara kelompok yang tergabung dalam *e-APT Working Group*, *APT Young Leaders* dan *APT Labour Ministers*. Secara bertahap forum ASEAN+3 memperluas cakupannya sehingga meliputi isu-isu pertanian, keuangan, tenaga kerja, iptek, perdagangan, investasi, lingkungan, kesehatan, seni dan budaya, energi, kepariwisataan, teknologi informasi dan komunikasi, politik dan

---

<sup>1</sup>Jusuf Wanandi, "ASEAN's Challenges for Its Future", *Pacnet*, no.3, 1999.



keamanan. Upaya untuk melembagakan APT semakin meningkat sejak KTT Kuala Lumpur. Pembentukan *East Asia Vision Group* (EAVG) pada tahun 1998 yang terdiri atas *eminent figures* dari setiap negara anggota ditujukan untuk melakukan studi ke arah integrasi dan kerja sama regional, seperti misalnya *Study East Asia Economic Cooperation System* tahun 1999 yang dirancang untuk kerjasama dan integrasi di masa depan. Disamping itu partisipasi sektor swasta, akademisi dan anggota masyarakat lainnya diharapkan menjadi pendukung untuk tercapainya proses kemajuan yang cepat, karena tanpa dukungan ide dari semua kalangan, proses kerjasama ASEAN+3 akan lebih lama implementasinya dan membutuhkan waktu lama untuk dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat dan akademisi adalah mitra yang paling penting guna menciptakan ide-ide serta konsep yang selaras dengan aspirasi mereka, sedangkan sektor swasta berperan dalam bidang pelaksanaan programnya.

Sementara itu, gagasan dan prospek ke arah suatu perjanjian perdagangan Asia Timur menghadapi berbagai masalah. Hubungan antara Jepang dan China adalah salah satu faktor potensial hambatan terbesar yang cenderung tidak memungkinkan terciptanya kerja sama di Asia Timur Laut tanpa keterlibatan negara-negara lain di kawasan yang lebih luas. Secara ekonomi, salah satu hambatan adalah ketidaksediaan Jepang untuk membuka pasar pertanian, perikanan dan kehutanannya. Negara tersebut takut bahwa produk-produk ASEAN yang lebih murah akan menekan petani Jepang yang merupakan pendukung LDP—partai yang berkuasa. Di samping itu Perdana Menteri Junichiro Koizumi tidak tertarik dengan perdagangan bebas secara regional. Bagi dia, perjanjian perdagangan bebas, atau pengaturan bagi kerjasama ekonomi yang lebih erat, harus menjamin bahwa Jepang mengambil tempat paling utama di Asia Timur karena Jepang merupakan kekuatan ekonomi terbesar selain China.

ASEAN+3 dipandang sebagai mekanisme yang penting untuk melibatkan China sebagai anggota Asia Timur yang konstruktif dan kooperatif, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Tanpa suatu rekonsiliasi antara kedua negara besar itu, suatu integrasi ekonomi

regional Asia Timur akan mengalami banyak hambatan non-ekonomi. Pada waktu yang sama, China sendiri dipandang sebagai calon *super power* di Asia, bahkan di dunia. Salah satu pertanyaan yang besar yang timbul adalah apakah kerjasama di antara China dan negara-negara lain—termasuk negara-negara anggota ASEAN dalam kerangka ASEAN + 3—akan berupa interdependensi yang simetris ataukah asimetris? Sebagai contoh, masuknya China ke Indonesia sedemikian jauh masih lebih merupakan upaya memenuhi kebutuhan mereka, termasuk untuk mendapatkan kayu.

Dengan hambatan-hambatan tersebut, mungkin harus dipertimbangkan bahwa usaha bilateral dapat membantu proses regional dan selanjutnya bersama-sama membantu proses global. Untuk memahami lebih jauh permasalahan tersebut di atas, diperlukan sebuah analisis untuk menjelaskan pandangan dan kesungguhan masing-masing negara atas komitmen yang sudah disepakati. Melalui penelitian ini kita dapat mengetahui seberapa siap negara-negara ASEAN membuka pasarnya bagi kawasan regional sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri sebagai pasar bagi perdagangan global. Selain itu, mengingat pentingnya peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN+3, maka penelitian ini menawarkan strategi yang bisa ditempuh agar Indonesia dapat mengambil manfaat dari kerjasama regional ini.

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama yang selalu saling berpengaruh satu sama lain dalam berbagai perundingan dan pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun regional. *Pertama*, aspek ekonomi dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang ada bagi interdependensi di bidang ekonomi antara negara-negara yang bekerjasama. *Ke dua*, aspek politik dengan mencermati tanggapan maupun respon serta *political will* Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah yang ada dalam kerjasama dengan negara-negara Asia Timur.

### **Regionalisasi dan Permasalahannya**

Pada mulanya ASEAN sangat berhati-hati dalam membuka dirinya terhadap kerjasama di luar kawasan Asia Tenggara. Para pendirinya

memiliki sejarah perselisihan satu sama lain, sehingga perhatian utamanya adalah menghilangkan perbedaan dan membangun kepercayaan di antara mereka. Ketika kerjasama ASEAN semakin dalam dan luas serta lebih percaya diri sebagai organisasi regional, maka ASEAN memperluas keanggotaannya sesuai dengan harapan para pendirinya untuk merangkul semua negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian ASEAN memperkuat ikatannya dengan mitra eksternal di bidang kerjasama politik, keamanan, ekonomi, sosial-budaya, dan pembangunan. Pada saat yang sama ASEAN juga mengembangkan hubungan eksternal guna menjamin perdamaian dan keamanan di kawasan. Untuk ini ASEAN melakukan kerjasama dan dialog aktif melalui *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Plus Three*, APEC, ASEM, dan *ASEAN Cooperation Dialogue (ACD)*. Meningkatkan hubungan dengan dunia luar ini sejalan dengan usaha ASEAN untuk mencapai sasaran *ASEAN Vision 2020* dan sekaligus menjaga relevansi ASEAN bagi mitra internasionalnya.

Selama 20 tahun terakhir, strategi hubungan eksternal telah mengalami perubahan arah yang mencerminkan kepentingan ASEAN serta dinamika lingkungan regional dan internasional. Nampak jelas bahwa hubungan antara ASEAN dan mitra dialognya sekarang berdasarkan *equal footing* (hubungan setara antara dua pihak), bukan lagi pola *donor-client* (hubungan antara pemberi dan penerima) dimana mitra dialog mempunyai kontrol dalam kegiatan kerjasama. Sekarang kerjasamanya berdasarkan perencanaan dan keputusan bersama sehingga ASEAN dituntut lebih aktif dalam menentukan arah kerjasama yang mendatangkan keuntungan bersama. Hal-hal yang ingin dicapai dari kerjasama ini antara lain: memperbesar akses pasar bagi ekspor ASEAN, meningkatkan investasi di kawasan, mempermudah perdagangan jasa, dan mempersempit *development gap* (kesenjangan tingkat pembangunan) guna mempercepat integrasi regional.

Krisis yang dihadapi ASEAN telah menimbulkan keraguan atas kemampuan ASEAN sebagai “kekuatan pendorong utama” karena terfokusnya perhatian negara-negara kunci ASEAN pada

masalah domestik masing-masing. Ditambah lagi dengan kenyataan bagaimana gagapnya ASEAN dalam menjawab tantangan baru sebagai konsekuensi krisis ekonomi dan politik sehingga menimbulkan keprihatinan bahwa ASEAN menjadi *sunset organization*. Oleh karena itu posisi ASEAN sebagai manajer tatanan regional mulai dipertanyakan. Dalam konteks ini, gagasan kerjasama ASEAN+3 menjadi semakin penting bagi upaya ASEAN untuk memulihkan peranan pentingnya dan memperkuat bobot diplomatiknya. Ternyata perkembangan kerjasama ASEAN+3 ini berjalan cepat sehingga sekarang posisi ASEAN sebagai *driving force* tidak dipertanyakan lagi. Bahkan salah satu butir hasil KTT *ASEAN Plus Three* di Vientianne pada November 2004 menekankan bahwa proses kerjasama ASEAN+3 akan menjadi kendaraan utama dalam mencapai sasaran jangka panjang, yaitu terbentuknya *East Asian Community*. Selanjutnya pemimpin negara-negara *Plus Three* mendukung keputusan pemimpin ASEAN untuk mengadakan *East Asia Summit* pada akhir 2005 di Malaysia. Dengan demikian, *East Asia Summit* akan menjadi suatu forum yang tidak dapat ditawar lagi. Sekarang permasalahannya ialah bagaimana merumuskan keputusan pada tingkat KTT Asia Timur ini sambil mempertahankan pentingnya ASEAN+3. Perlu diingat di sini bahwa pentingnya ASEAN bagi ketiga negara Asia Timur ini belum tentu sama dengan persepsi ASEAN sendiri. Dengan kata lain, ASEAN mungkin terperangkap dalam ilusi bahwa perhimpunan ini penting di mata China, Jepang dan Korea Selatan. Oleh sebab itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ASEAN sebaiknya merealisasikan rekomendasi *East Asia Study Group* (EASG), yaitu bahwa kerangka ASEAN+3 harus tetap menjadi motor dalam proses integrasi Asia Timur. Dengan dinamika ketergantungan ekonomi, politik dan keamanan yang selalu berubah, muncul pemikiran bagaimana mengartikan konsep “Asia Timur” agar tidak menjadi sekedar batasan geografis, namun lebih bersifat fungsional.

Dari uraian permasalahan di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- Mampukah ASEAN mempertahankan prinsip persamaan dan non-diskriminasi terhadap anggotanya yang masih beragam sementara itu dituntut mempererat hubungan eksternal dengan negara-negara Asia Timur?
- Motivasi apa yang menjadi pendorong ASEAN menjalin kerjasama dengan ketiga negara Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China) dan *vice versa*?
- Dengan beban domestik yang dihadapi saat ini, bagaimana Indonesia mensiasati dan memberi kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ASEAN+3?
- Langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil Indonesia dalam proses perluasan ASEAN+3 menuju *East Asia Community*?
- Di tengah terbukanya ekonomi kawasan regional, bagaimana strategi Indonesia untuk bersaing menarik investasi asing dan memperbesar pangsa pasar bagi produknya?
- Apakah konfigurasi ASEAN + 3 ini kelak akan mengambil bentuk ASEAN + 1 + 1 + 1, dalam arti bahwa kerjasama di antara ASEAN dengan ketiga negara Asia Timur ini nantinya akan berjalan sendiri-sendiri?
- Lebih jauh lagi, apakah konfigurasi ini akan benar-benar terdiri dari ASEAN sebagai satu entitas dan ketiga negara Asia Timur juga sebagai suatu entitas, ataukah hanya akan merupakan kumpulan dari *Free Trade Area* (FTA) yang lebih bersifat bilateral?
- Langkah-langkah apa yang perlu diambil ASEAN agar Jepang, Korea Selatan dan China dapat mempertahankan kemitraan jangka panjang dalam kerangka ASEAN+3 di tengah berkembangnya keinginan membangun format yang lebih tinggi, yaitu *East Asia Summit*?

Dengan mencoba menjawab permasalahan yang diuraikan di atas selama menjalankan penelitian, maka tim peneliti berusaha memberikan masukan kepada pemerintah tentang peran Indonesia dalam membangun kemitraan dalam ASEAN+3 dan *East Asia*

*Community*, memperbesar dan memperluas pengetahuan tentang peran ASEAN dalam *multilayered regional organizations and institutions* di Asia Timur sebagai khasanah studi regionalisme di kawasan Asia Timur dan Pasifik, serta mengamati peran Indonesia dalam ASEAN sebagai *corner stone* politik luar negerinya. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang dan kendala untuk memajukan kerjasama ASEAN dalam rangka APT, menggariskan peran Indonesia dalam pengembangan kerjasama APT menjelang dan menuju pengorganisasian *East Asia Summit*, mengkaji keseriusan dan kemauan politik dari pemerintah negara-negara ASEAN atas kesepakatan memperluas kerjasama ke kawasan yang lebih luas—Asia Timur, dan mengkaji kesamaan pandangan dan langkah antara pemerintah sebagai pengambil keputusan di tingkat APT dan sektor swasta sebagai pelaku ekonomi.

### **Kerangka Pemikiran**

Dengan datangnya era globalisasi, kita dihadapkan kepada fenomena multilateralisme, regionalisme dan bilateralisme yang berlangsung secara simultan. Dampak dari era ini adalah bahwa revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah membuat arus pergerakan barang dan jasa, manusia dan faktor-faktor produksi lainnya, serta informasi data dan ilmu pengetahuan semakin lancar karena batas-batas fisik dan administratif negara kian samar.<sup>2</sup> Belakangan muncul jargon baru yang sebetulnya tidak orisinal “the end of the nation state”, untuk memberikan kesan kuat terhadap munculnya fenomena kebangkitan ekonomi regional yang tidak mengenal batas-batas teritorial nyata, seperti kerjasama Sijori (Singapura, Malaysia dan Indonesia) dan *Tumen Delta Project* (Korea Utara, China dan Rusia). Hal yang menarik adalah gejala penguatan integrasi ekonomi ini memiliki dinamika sendiri sehingga seolah-olah lepas kaitan dengan sistem nasionalnya.

---

<sup>2</sup>Shalendra D. Sharma, "Asia: Economic Crisis and the IMF", *Survival*, vol. 40, no. 2, Summer 1998, hal. 27.

Hubungan ekonomi politik di Asia Timur dan ASEAN menunjukkan kinerja yang fantastis sebelum krisis ekonomi melanda kawasan ini. Proses hubungan intra Asia Timur berkembang secara alamiah melalui mekanisme pasar, bukan melalui kerjasama formal seperti Uni Eropa atau *North America Free Trade Agreement* (NAFTA) atau pun *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Hal ini bisa berlangsung karena pada umumnya masing-masing negara menerapkan strategi *outward looking* yang mengacu kepada upaya untuk memperkuat daya saing di pasar global. Kesadaran ini sudah lama tumbuh, yang diindikasikan oleh tindakan-tindakan unilateral untuk memperkuat daya saing masing-masing perekonomian tanpa menunggu kesepakatan multilateral maupun regional.<sup>3</sup> Selama *World Trade Organization* (WTO), APEC, ASEM menghasilkan sedikit kerjasama ekonomi, maka regionalisme akan mencari bentuknya sendiri.

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997 maka kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia membentuk forum kerjasama antara ASEAN dan Jepang, China serta Korea Selatan. Prestasi sebelum krisis ekonomi harus diperoleh kembali di kawasan ini khususnya di Indonesia dan ASEAN. Kita masih harus berupaya lebih keras lagi untuk mencapai kesejahteraan seperti yang telah dicapai negara maju. Di tengah lingkungan persaingan yang kian ketat dan setiap negara berupaya keras mengkonsolidasikan perkonomiannya menghadapi tantangan-tantangan baru, perekonomian Asia Timur betul-betul dihadapkan kepada lingkungan strategis yang sudah berubah secara mendasar. Kini dan di masa mendatang, Indonesia, ASEAN dan negara-negara Asia Timur harus bekerja lebih keras lagi, menanggapi dinamika baru yang mewarnai era globalisasi. Kesadaran bahwa Asia Timur sebagai suatu kawasan ekonomi yang penting bagi Indonesia dan ASEAN semakin tumbuh mengingat komplementaritas di antara negara-negara ASEAN relatif rendah sehingga perdagangan intra

---

<sup>3</sup>C. Fred Bergsten, "The New Asia Challenge", Institute for International Economics, Working Paper, no.4, Maret 2000.

ASEAN saja tidak cukup sebagai penopang orientasi ekspor masing-masing negara.

Terdapat dua kekuatan yang mendorong lahirnya kerjasama ASEAN+3. *Pertama*, adalah faktor ekonomi dimana saling ketergantungan ekonomi antar kawasan adalah riil, dilihat dari segi perdagangan, investasi dan teknologi. Dampak krisis ekonomi yang berkelanjutan menjadi bukti utama atas saling ketergantungan tersebut. *Ke dua*, adalah faktor strategi dimana bangkitnya China telah menimbulkan kecemasan tersendiri di kawasan regional bahkan global. Harus dicari solusi bagaimana kawasan Asia Timur termasuk China dapat mengatasi berbagai tantangan dan kemudian membentuk sebuah kekuatan besar dan mereka harus dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kawasan ini.

Selain kebangkitan China, ada kekuatan besar lain yang timbul, yaitu: 1) hubungan China-AS, dimana Taiwan akan menjadi rintangan terbesar yang harus diatasi terutama dengan pemimpinnya yang berasal dari partai oposisi yang pro-kemerdekaan; 2) hubungan bilateral China-Jepang, dengan melihat sejarah dan kemudian arah kerjasama ke depan mereka adalah faktor kestabilan dan perdamaian kawasan tersebut; dan 3) masalah strategi dalam perlucutan senjata untuk penyebaran senjata pemusnah massal dan adanya kontrol militer dari negara maju. Tanpa mengatasi masalah-masalah tersebut, perdamaian dan kestabilan Asia Timur akan selalu terancam. Jadi masalahnya bukan hanya Asia Timur Semenanjung Korea, tetapi juga sub kontinental kawasan Asia Selatan, misalnya masalah nuklir dan pengiriman peluru kendali di India dan Pakistan dapat menciptakan malapetaka terhadap kawasan ini. Tidak ada negara di kawasan Asia Timur yang dapat melakukan sesuatu yang signifikan terhadap masalah-masalah tersebut. Faktor-faktor strategi ini dapat membuktikan bahwa perlunya suatu mekanisme di dalam kawasan Asia Timur dan ASEAN untuk mendukung dan membantu usaha tersebut termasuk cara penanggulangannya. Tanpa dukungan semua



kawasan masalah ini dapat menjadi suatu ancaman yang serius bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia.<sup>4</sup>

Untuk membantu mendapatkan jawaban bagi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam kerangka pemikiran di atas, maka ada sejumlah asumsi yang kami gunakan sebagai titik tolak penelitian, yaitu:

- Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur tahun 1997 merupakan salah satu pendorong percepatan terjalannya kerjasama ASEAN+3.
- Semakin cepat ASEAN terintegrasi ke dalam, maka semakin besar dorongan bagi ASEAN untuk beranjak ke tingkat kerjasama yang lebih tinggi di kawasan Asia Timur.
- ASEAN masih mempunyai peluang untuk menjadi *the main driving force* bagi kerjasama di Asia.
- ASEAN akan tetap berpegang pada prinsip lingkaran konsentris: adalah lebih baik memulai kerjasama dengan tetangga terdekat dahulu, baru kemudian mencakup yang lain.
- Tanpa kerangka kerjasama yang melibatkan pihak-pihak ke tiga, adalah mustahil bagi negara-negara Asia Timur untuk membangun regionalisme di antara mereka sendiri.

### Metode Penelitian

Penelitian tentang strategi ASEAN dalam perluasan ASEAN+3 pada dasarnya adalah penelitian terhadap suatu proses kerjasama beberapa negara di kawasan regional yang sudah dirintis sejak 1997. Penelitian ini bersifat kualitatif-analisis dimana temuan dari penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi masalah-masalah baru seperti perkembangan *East Asia Summit* dan gagasan pembentukan *East*

---

<sup>4</sup>Steven Radelet and Jeffrey Sachs, "The East Asian Financial Crisis; Diagnosis, Remedies, Prospects", Mimeo, Harvard Institute for International Development, Maret 1998, hal. 45-58.

*Asia Community*. Hal ini terjadi karena dalam proses kerjasama, kawasan regional tidak terlepas dari pengaruh eksternal kawasan global sehingga banyak terjadi perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk memenuhi sasaran penelitian, tim peneliti telah melakukan penelitian lapangan di Yogyakarta dan Surabaya dimana terdapat pusat kajian masalah-masalah internasional. Kedua daerah tersebut telah memberikan data lapangan yang berkaitan dengan perkembangan ASEAN dalam perluasan ASEAN+3. Sudah tentu Jakarta sendiri juga menjadi daerah penelitian karena banyak lembaga terkait yang menangani kerjasama ini seperti Sekretariat ASEAN, Departemen Luar negeri, dan Departemen Perdagangan. Tim peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pakar di bidang ekonomi politik internasional dan nara sumber yang dianggap menguasai dan berhadapan langsung dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas. Mereka adalah para pakar ASEAN dan kawasan Asia Timur di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya serta staf Kedutaan Besar negara-negara ASEAN dan Asia Timur, staf Departemen Luar Negeri, dan staf Departemen Perdagangan dimana mereka terlibat dalam proses pengembangan kerjasama di kawasan regional. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa pengusaha di Yogyakarta dan Surabaya untuk memberikan gambaran keterlibatan pelaku ekonomi dalam perkembangan regional yang selama ini masih didominasi kalangan pengambil kebijakan.

Selain itu tim peneliti juga berhasil menyelenggarakan workshop sehari yang dimaksudkan untuk berbagi pengetahuan tentang perkembangan ASEAN+3 dan sekaligus sebagai media diskusi mengenai topik hangat saat ini, yaitu *East Asia Summit* yang akan diadakan bulan Desember 2005. Diskusi dalam workshop mencoba menjawab bagaimana ASEAN sebaiknya merealisasikan rekomendasi EASG bahwa kerangka ASEAN+3 harus tetap menjadi motor dalam proses integrasi Asia Timur. Juga bagaimana mengartikan konsep "Asia Timur" agar tidak menjadi sekedar batasan geografis, namun lebih bersifat fungsional. Forum ini dihadiri oleh para diplomat dari Kedutaan Besar negara-negara

ASEAN serta Jepang dan China, peneliti, akademisi dan wartawan. Hasil workshop ini sangat berguna dalam melengkapi laporan penelitian.

## **Sistematika Penulisan**

**Bab 1:** Pendahuluan (*Yasmin Sungkar*). Sebagai pengantar dari laporan penelitian ASEAN tahun 2005, bab ini menyajikan latar belakang yang berisi perkembangan kerjasama regional di Asia Tenggara yang sudah dirintis selama hampir 40 tahun. Dengan pasang-surutnya kerjasama ini dalam lingkungan yang selalu bergerak secara dinamis maka lahir berbagai bentuk kerjasama baru yang selalu menuntut perhatian. Perkembangan baru yang menarik adalah menyatunya kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur yang tercermin dalam bentuk ASEAN+3. Regionalisasi dan permasalahannya menjadi fokus penelitian ini. Di dalamnya terdapat delapan pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam bab-bab berikutnya. Bab ini juga dilengkapi dengan kerangka pemikiran tentang relevansi dan urgensi dari penelitian ini, metoda penelitian serta sistematika penulisan laporan.

**Bab 2:** Perkembangan ASEAN Menuju ASEAN Community (*Zatni Arbi*). Bab ini menjelaskan evolusi ASEAN dari Deklarasi Bangkok tahun 1967 ke Deklarasi Bali Concord II tahun 2003. Sebagai upaya revitalisasi kerjasama ASEAN, Indonesia mengusulkan integrasi yang lebih erat melalui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) sesuai dengan Visi ASEAN 2020. Fokus bab ini adalah tiga pilar yang bisa mendukung terciptanya Komunitas ASEAN, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Masalahnya keinginan tersebut masih jauh dari realisasi, sudah muncul berbagai keinginan lain yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan analisa yang lebih mendalam untuk melihat persoalan ini, yang dijabarkan dalam bab-bab berikutnya.

**Bab 3:** Evolusi dan Signifikansi ASEAN+3: Dinamika Internal dan Eksternal (*Yasmin Sungkar*). Inti bab ini adalah penjelasan dan analisa perkembangan ASEAN+3 sejak terbentuknya forum ini sampai sekarang. Dua bidang utama yang patut mendapat perhatian dalam mencermati dinamika internal adalah: Kerjasama Politik dan Keamanan, serta Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Keuangan. Motivasi apa yang menjadi pendorong ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan ketiga negara Asia Timur dan *vice versa* akan dijawab dalam bab ini. Hal lain yang cukup penting adalah implementasi *East Asia Study Group* yang menjadi landasan bagi program kerjasama ASEAN + 3 serta munculnya institusi penunjang dengan dibentuknya ASEAN+3 Unit dalam struktur Sekretariat ASEAN dan berkembangnya sejumlah Badan Koordinasi serta Forum di berbagai tingkat. Adapun dinamika eksternal dalam kerjasama ASEAN + 3 adalah perkembangan ke arah forum *East Asia Summit* (EAS) yang prosedur dan prinsip dasarnya sudah disetujui, namun keuntungan dan prospeknya masih banyak dipertanyakan.

**Bab 4:** Perkembangan Kerjasama Perdagangan ASEAN dan Asia Timur (*Ratna Shofi Inayati*). Karena perkembangan ke arah regionalisme tidak semata-mata menutup jalur kerjasama bilateral, maka bab ini menguraikan pencapaian kerjasama bilateral ASEAN dengan China, Jepang dan Korea Selatan secara individual serta melihat posisi ASEAN masa kini dan mendatang dalam konteks regionalisme baru. Bab ini lebih melihat pada kepentingan ASEAN *vis-à-vis* ASEAN +3 dan akan mengkaji hubungan antar negara-negara ASEAN dan ketiga negara Asia Timur: Jepang, China dan Korea Selatan, khususnya di bidang perdagangan dalam kaitannya dengan rencana pembentukan *East Asia Community* (EAC). Sekaligus di dalamnya akan menjawab apakah konfigurasi ASEAN+3 akan benar-benar terdiri atas ASEAN sebagai satu entitas dan ketiga negara Asia Timur juga sebagai satu entitas, ataukah hanya akan merupakan kumpulan *Free Trade Area* yang lebih bersifat bilateral.

**Bab 5: Ide Perluasan Komunitas Asia Timur: Dinamika Internal ASEAN** (*Awani Irewati*). Terlepas dari bentuk perluasan regionalisme Asia Timur, harapan ASEAN adalah bahwa asosiasi ini tetap eksis dan tidak terserap ke dalam kerjasama yang lebih luas tersebut. Fokus bab ini pada ide Malaysia yang sejak zaman Mahathir ingin membangun *East Asian Economic Group* yang bersifat eksklusif (hanya ASEAN+ negara-negara di Asia Timur yang dari ras Asia) serta lebih mengikat. Ini sebagai jawaban terhadap komunitas-komunitas lainnya yang berkembang di bagian dunia lain--ada keinginan untuk membangun komunitas berdasarkan kesamaan ras dan budaya dalam lingkup Asia Timur yang lebih luas. Bab ini akan menjawab apakah ASEAN mampu mempertahankan prinsip persamaan dan non-diskriminasi terhadap anggotanya yang masih beragam, sementara itu dituntut mempererat hubungan eksternal dengan negara-negara Asia Timur. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang bagaimana posisi ASEAN dalam komunitas ini--apakah akan lebur atau jadi sub-sistem? Bab ini juga menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil ASEAN agar tetap relevan dan tetap memainkan peran yang signifikan di lingkungan regionalisme yang lebih luas.

**Bab 6: Tantangan Perluasan Komunitas Asia Timur** (*Dewi Fortuna Anwar*). Bab ini difokuskan pada pandangan yang skeptis dan pesimis, meskipun ide perluasan regionalisme yang meliputi seluruh kawasan Asia Timur ini mendapat banyak dukungan yang antusias. Pandangan yang skeptis ini melihat ide membangun Komunitas Asia Timur ini sebagai suatu gagasan yang menarik dan mungkin dapat terwujud dalam jangka panjang, namun realisasinya tidak akan dapat dipaksakan dalam jangka pendek dan menengah. Masalahnya, terlalu banyak kendala di lapangan yang tidak mudah untuk diatasi. Pandangan ini, seperti diwakili Indonesia, tidak menginginkan suatu organisasi baru yang eksklusif yang akan meleburkan identitas ASEAN, namun lebih menginginkan suatu Komunitas Asia Timur sebagai suatu hal yang mungkin alamiah dan keanggotaannya tidak berdasarkan kesamaan ras. Bab ini sekaligus menjawab pertanyaan

tentang langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil Indonesia dalam proses perluasan ASEAN+3 menuju *East Asia Community*.

**Bab 7:** Kesimpulan dan Rekomendasi (*Yasmin Sungkar*). Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi.

## **Bab II**

# **PERKEMBANGAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN**

*Zatni Arbi*

### **Pengantar**

Semenjak ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kepala negara/kepala pemerintahan lima negara di kawasan Asia Tenggara, perhimpunan ini telah tumbuh menjadi salah satu organisasi regional yang paling kohesif dan progresif di dunia. Walaupun hingga kini masih terdapat kantong-kantong ketidakstabilan dan ketertinggalan ekonomi di dalam masing-masing negara anggota ASEAN, tidak dapat disangkal bahwa kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang paling stabil dan paling sejahtera di antara negara-negara sedang berkembang.

Saat ini ASEAN merupakan komunitas 540 juta penduduk dengan GDP 723 milyar dolar AS. Di tahun 2003, ASEAN sepakat untuk membina integrasi yang lebih erat melalui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Inisiatif menuju integrasi ini dicetuskan secara resmi melalui deklarasi *Bali Concord II* di Bali pada tahun 2003. Untuk mencapai integrasi, yang didasarkan pada Visi ASEAN 2020, telah disepakati untuk membangun tiga pilar komunitas dengan fokus masing-masing pada keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

Namun, dalam perjalanan menuju terbentuknya Komunitas ASEAN muncullah sebuah ide untuk menciptakan kerja sama yang lebih terstruktur dengan tiga negara besar di Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Ide ini dipicu terutama oleh ketidakmampuan ASEAN membantu anggota-anggotanya dalam mengatasi krisis moneter Asia 1997. Kerja sama yang lebih erat

dengan ketiga negara industri Asia Timur dirasakan mendesak guna mencegah terulangnya krisis tersebut.

### **Dari Deklarasi Bangkok Menuju Komunitas ASEAN**

Suatu hal yang khas pada Deklarasi Bangkok 1967 adalah tidak dimasukkannya tujuan-tujuan politik dan keamanan sebagai salah satu sasaran pendirian organisasi ini. Sikap yang sangat berhati-hati ini diambil karena para pendiri ASEAN waktu itu tidak ingin menimbulkan gejolak dan berusaha menghindari kesan bahwa ASEAN akan dikembangkan menjadi suatu kekuatan pertahanan dan militer baru di dunia, suatu hal yang pasti akan mendapat tentangan dari negara-negara adikuasa terutama Amerika Serikat. Oleh sebab itu, ASEAN lebih mengedepankan pilihan menuju perdamaian melalui kerjasama ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan selanjutnya, ASEAN ternyata tetap dibebani oleh kesenjangan pembangunan ekonomi yang ada di antara kelima negara anggota yang menjadi pendiri *plus* Brunei Darussalam dan keempat negara anggota yang bergabung belakangan (Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja).

Ada sejumlah prakarsa ASEAN di waktu lampau yang dirancang untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN sendiri dan sekaligus memaksimalkan daya tarik ASEAN bagi perdagangan internasional serta investasi dari luar ASEAN. Dimulai dengan *Preferential Trading Arrangement* (PTA) di tahun 1977 dan disusul dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) di tahun 2002, ASEAN akhirnya secara berangsur-angsur berhasil

---

<sup>1</sup>Rizal Sukma, *The Future of ASEAN: Toward A Security Community*, makalah disajikan pada Seminar "ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation". New York, 3 Juni 2003. [http://www.indonesiamissionny.org/issuebaru/Mission/asean/paper\\_rizalsukma.PDF](http://www.indonesiamissionny.org/issuebaru/Mission/asean/paper_rizalsukma.PDF)



melenyapkan hambatan tarif maupun non-tarif bagi perdagangan intra-ASEAN.<sup>2</sup>

Namun demikian, tingkat kemajuan pembangunan masih belum merata di antara negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN tampak seolah-olah telah mulai memasuki usia senja dan semakin redup. Gaung ASEAN semakin tenggelam di tengah hiruk-pikuk berbagai perkembangan baru di dunia, terutama setelah para pendiri sudah mulai digantikan oleh generasi berikutnya, yaitu kepala negara/kepala pemerintahan baru di masing-masing negara anggota. Di samping itu juga mulai tampak bahwa beberapa negara anggota mulai berjalan sendiri-sendiri dalam merintis serta membina kerja sama bilateral—terutama kerja sama ekonomi dalam bentuk wilayah perdagangan bebas—dengan negara-negara lain di luar ASEAN. Sebuah gebrakan dirasakan perlu sebagai upaya revitalisasi perhimpunan ini.

Oleh sebab itu, ketika Indonesia mendapat giliran memimpin ASEAN selama satu tahun (dari Juli 2003 hingga Juli 2004), Indonesia mengajukan usul untuk memulai babak baru dalam sejarah ASEAN yang ketika itu telah berusia 37 tahun. Pada pertemuan para Pemimpin ASEAN ke-9 di Bali, 7-8 Oktober 2003, Indonesia mengusulkan pembentukan sebuah Komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi dengan tiga pilar—Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*, atau ASC, yang merupakan usul Indonesia), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*, atau AEC, yang merupakan usul Singapura) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*, atau ASCC, yang merupakan usul Filipina). Proposal ini lalu menjadi pernyataan yang penting, yaitu Kesepakatan Bali II (*Bali Concord II*) 2003.

Pada KTT ke-10 ASEAN, yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada tanggal 29-30 Nopember 2004, disahkan *ASEAN Security Community Plan of Action* (ASC PoA), *ASEAN Socio-Cultural*

---

<sup>2</sup>ASEAN Secretariat. Overview: Association of Southeast Asian Nations. <http://www.aseansec.org/64.htm>.

*Community Plan of Action (ASCC PoA), Vientiane Action Program (VAP) dan ASEAN Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors.* Pengesahan ASC PoA dan ASCC PoA melengkapi AEC PoA yang sudah disahkan terlebih dahulu di KTT Bali 2003. Dengan demikian, maka kerangka Komunitas ASEAN yang telah dituangkan ke dalam Bali Concord II menjadi utuh. Ketiga pilar Komunitas ASEAN kini memiliki rencana aksinya masing-masing. Prioritas kegiatan ketiga rencana aksi untuk jangka waktu enam tahun (2004-2010) dijabarkan dalam (VAP).

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan pembentukan komunitas ASEAN adalah menjembatani kesenjangan pembangunan (*development gap*) yang masih ada di antara negara-negara ASEAN. Integrasi ekonomi secara penuh akan memungkinkan ASEAN memanfaatkan potensi pasarnya yang demikian besar di samping meraup keuntungan dari *economies of scale* di kawasan ini.

### **Tiga Pilar Komunitas ASEAN**

Bali Concord II bertumpu pada tiga komunitas yang diuraikan di bawah ini:

#### **1. Pilar Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*)**

Di tahun 2003, Indonesia mengingatkan ASEAN bahwa Komunitas Ekonomi juga membutuhkan kerjasama politik dan keamanan untuk menjaga kestabilan di kawasan ini. Tanpa kestabilan politik dan keamanan, ASEAN tidak akan berhasil menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, ASEAN juga harus menjadi sebuah Komunitas Keamanan sejalan dengan pembentukan Komunitas Ekonomi.

Sebagai pilar pertama dalam Komunitas ASEAN, Komunitas Keamanan didasarkan pada prinsip-prinsip keamanan komprehensif (*comprehensive security*) dan kesalingtergantungan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial di kawasan ini. Tujuan yang harus dicapai komunitas ini mencakup “pembangunan politik di negara-

negara ASEAN, penajaman dan penyebarluasan norma-norma penyelesaian konflik dan pembangunan kembali perdamaian pasca-konflik.”<sup>3</sup>

Implementasi dari rencana aksi bagi Komunitas Keamanan ASEAN, yang telah disepakati di KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, diharapkan akan memberikan sumbangan bagi terciptanya perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, sekaligus memperkuat peran ASEAN sebagai kekuatan penggerak dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) serta terus meningkatkan hubungan multilateral dengan para Mitra Dialog ASEAN maupun negara-negara lain di wilayah ini.

## **2. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*)**

Sebagai pilar ke-dua dalam Komunitas ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN diarahkan pada terciptanya sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi yang berfungsi sebagai sebuah pasar dan landasan produksi tunggal (*a single market and production base*)

Sebelas sektor prioritas disahkan sebagai proyek percontohan percepatan integrasi pasar tunggal ASEAN yang direncanakan akan tercapai menjelang tahun 2020. Tujuan ini akan dicapai melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan intra-ASEAN. Kesebelas sektor yang telah dipilih untuk *fast track* ini adalah elektronika, e-ASEAN, perawatan kesehatan, produk-produk berbasis kayu, otomotif, produk-produk berbasis karet alam, tekstil dan pakaian jadi, produk-produk agro-industri, perikanan, penerbangan dan pariwisata. Sektor-sektor ini dipilih berdasarkan tingkat keunggulan kompetitif masing-masing negara dalam hal ketersediaan sumber daya alam, ketrampilan pekerja, daya saing dalam hal biaya produksi dan kontribusi nilai tambah bagi

---

<sup>3</sup>Rakaryan Sukarjaputra. “KTT Ke-10 ASEAN: Memuluskan Jalan Perubahan ASEAN” dalam *Kompas*, 26 Nopember 2004. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/26/ln/1399518.htm>.

perekonomian ASEAN. Ke depan, sejalan dengan semakin menguatnya kapasitas institusional ASEAN dalam membentuk integrasi ekonomi, sektor-sektor baru akan ditambahkan ke dalam program percepatan integrasi ini.

Langkah-langkah yang akan diambil dalam mendorong integrasi ini mencakup peningkatan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi, percepatan liberalisasi perdagangan barang dan jasa, peningkatan fasilitas perdagangan dan bisnis, penekanan biaya transaksi perdagangan, peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di ASEAN, pemantapan sistem penyelesaian pertikaian (*dispute settlement system*) serta berbagai langkah lain yang mendukung integrasi.

Komunitas Ekonomi ASEAN disepakati pada Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN dan ARF di Pnom Penh, Kamboja, di bulan Juni 2003.

### **3. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC*)**

Sebagai pilar ke-tiga dari Komunitas ASEAN, Komunitas Sosial Budaya ASEAN akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ASEAN siap dan mampu memanfaatkan kemakmuran yang dihasilkan oleh integrasi ekonomi. Komunitas ini beraspirasi meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya serta memperkuat identitas budayanya dengan rakyat sebagai pusat. Komunitas ini juga diharapkan akan mengintensifkan kerja sama di bidang sosial budaya serta mempromosikan partisipasi aktif semua sektor dalam masyarakat. Permasalahan yang akan ditangani termasuk pertumbuhan populasi, pendidikan, penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, penurunan kualitas lingkungan dan polusi yang melintasi batas-batas negara.

Lebih spesifik lagi, melalui Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini akan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan dasar maupun tingkat lanjut, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan proteksi sosial. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber

daya manusia merupakan salah satu strategi terpenting untuk mengatasi pengangguran, peniadaan kesenjangan sosial ekonomi serta pembangunan ekonomi yang merata.

*Roadmap* yang telah disediakan untuk pengembangan Komunitas Sosial Budaya ASEAN memiliki beberapa fokus utama, yaitu penciptaan sistem proteksi sosial yang kokoh dan fungsional guna mengatasi masalah kemiskinan, pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber-sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan saat ini maupun masa yang akan datang, dan tata kelola sosial (*social governance*) yang mampu mengelola dampak-dampak dari integrasi ekonomi.

### **Lahirnya Gagasan ASEAN+3**

Ketika para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Bangkok dari tanggal 20 hingga 27 Juli 2000, sebuah gagasan regionalisme yang lebih luas pun disepakati. Dinamakan ASEAN+3, regionalisme ini terdiri atas jaringan kerja sama yang melibatkan kesepuluh negara ASEAN (ASEAN-10) dan China, Jepang serta Korea Selatan. Pembahasan mengenai ASEAN+3 ini akan menjadi fokus Bab III dari laporan penelitian ini.

### **Penutup**

ASEAN telah menyepakati Visi ASEAN 2020, yang antara lain mengacu pada suatu integrasi ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan kemakmuran masyarakat di kawasan ini serta menghilangkan kesenjangan yang ada di antara mereka. Pendeklarasian *Bali Concord II* memberikan momentum baru bagi integrasi ekonomi ini.

Pada waktu yang hampir bersamaan, ASEAN juga disibukkan oleh pembentukan ASEAN+3 dan *East Asia Summit*. Di satu pihak, ASEAN+3 dapat memberikan momentum ekstra bagi percepatan integrasi ekonomi ASEAN. Suatu hal yang perlu selalu diingat adalah bahwa eksistensi ASEAN harus tetap dipertahankan. Apapun

bentuk regionalisme yang nanti akan muncul di wilayah ini, ASEAN harus tetap merupakan "the driving force". Hal ini hanya dimungkinkan bila ASEAN terlebih dahulu memperkuat komunitasnya. Oleh sebab itu, tampaknya perhatian ASEAN masih harus lebih difokuskan pada pencapaian suatu Komunitas ASEAN yang kokoh, terintegrasi dan mampu memainkan peran yang aktif di kawasan ini.

## Bab III

# EVOLUSI DAN SIGNIFIKANSI ASEAN+3: DINAMIKA INTERNAL DAN EKSTERNAL

*Yasmin Sungkar*

### **Pengantar**

Kerjasama ASEAN+3 dimulai dengan dilakukannya pertemuan informal antara pemimpin ASEAN dan mitra mereka dari Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan saat berlangsungnya *ASEAN Informal Summit* ke-dua di Malaysia pada Desember 1997. Pada tahap awal ini fokusnya lebih ditekankan pada proses daripada kegiatan yang berorientasi kerja nyata. Namun baru pada tahun 1999 proses kerjasama ASEAN+3 ditetapkan sebagai forum resmi ketika para pemimpin kedua kawasan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kerjasama Asia Timur pada *ASEAN Plus Three (APT) Summit* ke-tiga di Manila. Dari sinilah dimulai kerjasama yang sifatnya substantif dan laju interaksi menjadi semakin intensif. Saat itu para pemimpin ASEAN+3 menunjukkan ketetapan dan keyakinan yang tinggi dalam memperkuat dan memperdalam kerjasama Asia Timur di berbagai tingkat dan bidang, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan politik. Tidak lama kemudian, dihasilkan beberapa dokumen penting untuk menentukan arah kerjasama ASEAN+3. Dua dokumen yang terpenting adalah hasil laporan: 1) *East Asia Vision Group (EAVG)* tahun 2001 dan 2) *East Asia Study Group (EASG)* tahun 2002. Implementasi dari rekomendasi EASG ini bisa menjadi kerangka dasar pembangunan Komunitas Asia Timur yang merupakan tujuan jangka panjang.

Perkembangan kerjasama ASEAN+3 yang cukup pesat, baik internal maupun eksternal, menuntut pengamatan yang terus-menerus. Salah satu pertanyaan yang akan dijawab dalam bab ini adalah apa motivasi dari kedua belah pihak (ASEAN dan *Plus Three*)

yang mendorong mereka menjalin kerjasama. Kemudian bagaimana ASEAN mempertahankan peran pentingnya—sebagai *driving force*—dalam kerjasama ASEAN+3, dan pada tingkat berikutnya bagaimana ASEAN+3 memperdalam dan memperluas kerjasamanya, menjadi fokus kajian dalam bab ini. Dalam hal pendalaman kerjasama akan ditinjau kerjasama politik dan keamanan serta kerjasama ekonomi, perdagangan dan keuangan. Sedangkan dalam hal perluasan kerjasama, *East Asia Summit* (EAS) mejadi isu penting dan memunculkan pertanyaan bagaimana posisi ASEAN+3 terhadap EAS. Apakah ASEAN+3 akan lebur ke dalam EAS atau berdampingan dalam perkembangannya nanti? Meskipun hasil EAS pada Desember nanti akan banyak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, sementara ini uraian dalam bab ini mencoba menjelaskan kondisi dan berbagai pandangan atas evolusi dan signifikansi ASEAN+3.

### **Kerjasama Politik dan Keamanan**

Perkembangan situasi keamanan internasional, dan khususnya di Asia, sudah pasti membawa dampak yang cukup berarti bagi keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara. Perang dan situasi yang memburuk secara berkelanjutan di Irak menimbulkan perlawanan balik yang sangat kuat. Hal ini mendorong kekuatan terorisme internasional dimana militan asing dan Irak menjadikan Irak sebagai arena baru untuk berjihad. Tumbuhnya perlawanan dan kekacauan di Irak ini sangat menyerap perhatian pemerintah Amerika Serikat (AS). Meskipun hal ini belum sampai menimbulkan dampak negatif terhadap kekuatan berimbang di kawasan Asia Pasifik, dimana kekuatan militer AS masih yang paling unggul, namun ada juga dampaknya terhadap strategi AS di kawasan Asia Pasifik, khususnya mengenai konsep “kebebasan”. Jadi, apa yang akan terjadi di Irak dan dampak apa yang muncul terhadap keamanan internasional adalah suatu ketidakpastian baru yang sangat besar derajatnya.

Di kawasan Asia Timur, hubungan segitiga AS-China-Jepang sangat krusial bagi stabilitas kawasan regional. Walaupun hubungan AS-China sangat sangat membaik sejak 9/11, namun meningkatnya



kerjasama ini tidak dapat menutupi persaingan yang sudah ada diantara keduanya dan masih akan berlanjut. Di samping itu, saling tidak percaya dalam hubungan politik antara Jepang dan China semakin tajam akhir-akhir ini walaupun di sisi lain hubungan ekonomi keduanya tumbuh dengan pesat. Ditambah lagi persaingan yang menajam antara keduanya dalam memastikan perolehan pasokan energi bisa menimbulkan ketegangan geopolitik. Keterlibatan AS di Irak dan Timur Tengah dan kebutuhannya atas kerjasama dengan China dalam berbagai isu penting justru memberi ruang gerak yang lebih bagi China untuk meningkatkan kepentingannya di Asia melalui berbagai inisiatif diplomatik dan ekonomi. Sementara di wilayah Asia Tenggara, masalah keamanan yang utama adalah terorisme yang berkaitan dengan kelompok Islam radikal serta berbagai kekerasan domestik yang berasal dari kekuatan separatis serta konflik etnik dan agama.

Sebenarnya Thailand, Filipina dan Indonesia menghadapi persoalan yang hampir sama, khususnya Thailand dan Filipina dimana terdapat minoritas muslim, masing-masing di Thailand Selatan dan Mindanao. Sementara Indonesia yang mayoritas muslim cukup direpotkan dengan kegiatan kelompok Islam radikal. Namun sampai sekarang baru terlihat kerjasama yang intensif dalam menangani hal ini adalah antara Indonesia dan Australia. Ada beberapa alasan belum nampaknya kerjasama antar negara ASEAN meskipun sudah ada kesepakatan bersama untuk memerangi terorisme. *Pertama*, masing-masing anggota ASEAN masih berpegang pada prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan masing-masing sehingga menghambat inisiatif langkah penanggulangan bersama. *Ke dua*, serangan bom Bali pertama dimana banyak korban warga Australia dan peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia dengan sendirinya mendekatkan usaha bersama kedua negara ini untuk memerangi terorisme. *Ke tiga*, Australia sebagai negara tetangga berusaha menutup kemungkinan merambahnya kegiatan terorisme ke wilayahnya dan berkepentingan dalam menciptakan keamanan di Indonesia.

Hal lain yang sama pentingnya dan menuntut perhatian bersama adalah keamanan laut di Asia Tenggara. Sekitar sepertiga perdagangan dunia, dan separuhnya adalah minyak, harus melalui Selat Malaka dan Singapura. Lebih dari 50.000 kapal setiap tahun harus transit di Selat Malaka.<sup>1</sup> Meningkatnya ancaman terorisme membuat khawatir berbagai kalangan, seperti perusahaan pelayaran, penumpang kapal, dan pemerintah di kawasan regional termasuk China, Jepang dan Korea Selatan. Mereka membutuhkan jalur yang lancar dan navigasi yang aman melalui pos pemeriksaan yang semakin padat untuk semua barang dagangan yang harus diangkut lewat laut, termasuk minyak impor yang sangat vital.

Frekuensi serangan bajak laut menunjukkan betapa rawannya jalur Selat Malaka ini. Seperti dilaporkan Biro Maritim Internasional, salah satu bagian dari Kamar Dagang Internasional yang berbasis di Paris, bahwa terjadi 28 serangan bajak laut di Selat Malaka pada tahun 2003. Serangan tersebut kebanyakan terjadi di perairan Indonesia.<sup>2</sup> Namun seperti di kawasan lain, reaksi negara-negara Asia Timur terhadap ancaman terorisme di laut bisa berbeda-beda tergantung kemampuan suatu negara dan prioritas pemerintah serta sektor swastanya, termasuk derajat ketergantungan ekonomi nasionalnya pada perdagangan lewat laut. Singapura adalah negara yang ekonominya sangat tergantung pada perdagangan, maka pemerintahnya sangat gencar dalam usaha menghadapi kemungkinan terorisme di laut.

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka berbagai inisiatif internasional dan regional sudah dilancarkan untuk meningkatkan keamanan di laut. Antara lain, sejak Juli 2004, Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah mulai berpatroli bersama di Selat Malaka dengan nama Operasi Malsindo. Operasi sepanjang tahun ini dirancang untuk menjamin keamanan kapal komersial yang melewati Selat Malaka. Sebagai bagian dari operasi bersama ini, Angkatan Laut dari masing-masing negara menyediakan lima sampai tujuh

---

<sup>1</sup>Regional Outlook: Southeast Asia 2005-2006, Singapore: ISEAS, 2005, hal. 6.

<sup>2</sup>*The Jakarta Post*, 20 Juli 2004.

kapal untuk berpatroli di Selat Malaka. Mereka juga membentuk *hotline* yang memungkinkan mereka berkomunikasi agar tercipta koordinasi yang baik, khususnya bila sebuah kapal dari salah satu negara sedang mengejar bajak laut. Bahkan sebuah kapal perang dari satu negara diperbolehkan memasuki perairan negara lain bila sedang mengejar kapal bajak laut asalkan hal ini dikomunikasikan terlebih dahulu dengan negara yang wilayah lautnya dimasuki.<sup>3</sup> Bila operasi ini dan saling berbagi informasi bisa diintensifkan dan berlangsung terus, maka diharapkan usaha ini dapat mencegah serangan bajak laut dan teroris di kawasan Selat Malaka.

Sejauh ini kerjasama politik dan keamanan antar negara-negara ASEAN+3 menunjukkan suatu kemajuan dengan adanya dialog dan konsultasi secara reguler baik di pertemuan tingkat tinggi, menteri, pejabat senior, maupun tingkat kelompok kerja. Negara-negara ASEAN+3 sudah bekerjasama dalam membicarakan ancaman terorisme dan kejahatan transnasional lainnya. Pertemuan SOMTC+3 (*ASEAN Senior Official Meeting Plus Three on Transnational Crime*) yang pertama diselenggarakan pada Juni 2003 di Hanoi. Kemudian disusul dengan pertemuan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Plus Three* (AMMTC+3) pada Januari 2004 di Bangkok. Pertemuan ini mengadopsi rancangan konsep untuk membahas kejahatan transnasional yang mencakup delapan hal: terorisme, perdagangan gelap obat-obatan, perdagangan gelap manusia, bajak laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan *cyber crime*. Para menteri juga setuju mengikuti prinsip-prinsip tertentu dalam proses kerjasama memerangi kejahatan transnasional, antara lain, konsensus melalui konsultasi atas dasar persamaan, saling menghormati kedaulatan masing-masing, proses yang bertahap, serta kerjasama yang fleksibel dan efektif. Kemudian SOMTC+3 yang diadakan pada September 2004 di Bandar Seri Begawan menyetujui dikembangkannya program khusus dalam delapan bidang kerjasama tersebut. Tiap bidang akan dipimpin oleh

---

<sup>3</sup>Ibid.

satu “engine country” dari ASEAN dan didukung oleh negara-negara *Plus Three*.

China, Jepang dan Korea Selatan telah menandatangani *Treaty of Amity Cooperation* (TAC), masing-masing pada Oktober 2003, Juli 2004 dan November 2004. Kemauan ini memberikan kontribusi yang cukup berarti sehingga TAC bisa menjadi *code of conduct* dalam memelihara hubungan kerjasama di kawasan Asia Timur. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politik dan keamanan oleh negara-negara *Plus Three*, khususnya Jepang dan Korea Selatan yang mempunyai hubungan militer dengan AS. Jadi di samping kepentingan ekonomi, motivasi yang menjadi pendorong ketiga negara Asia Timur menjalin kerjasama dengan ASEAN bisa dilihat dari perspektif politik dan keamanan. Dari perspektif politik, stabilitas di kawasan ASEAN relatif stabil dan tidak terdapat konflik terbuka antar negara anggotanya sehingga ASEAN merupakan salah satu organisasi yang diperhitungkan dalam hubungan internasional. Bahkan terbukti ASEAN dapat menyelesaikan beberapa konflik di kawasan, seperti Kamboja dan Mindanao, melalui mekanisme perundingan yang efektif antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Dari perspektif keamanan, ketiga negara perlu menjalin hubungan baik dengan ASEAN karena jalur ekonomi dan energi melalui Selat Malaka yang berada di kawasan ASEAN perlu dipelihara dengan baik. ASEAN juga memperlihatkan kedewasaan dalam mengelola konflik dengan jalan bekerjasama, seperti yang dilakukan dalam menangani Laut China Selatan.<sup>4</sup>

### **Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Keuangan**

Pemulihan ekonomi di kawasan Asia Tenggara sudah menunjukkan perbaikan dan ditunjang oleh pertumbuhan global yang positif. Kawasan Asia Tenggara diharapkan menyumbang pertumbuhan GDP yang kuat sebesar 6,2 persen di tahun 2004, sementara seluruh

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Deplu, Jakarta, 13 Mei 2005.

Asia Timur diharapkan tumbuh 7,3 persen.<sup>5</sup> Beberapa hal yang memungkinkan tumbuhnya ekonomi regional ini antara lain: meningkatnya produksi dari AS dan Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang utama, permintaan yang berkelanjutan dari China yang sedang tumbuh pesat, dan meluasnya industri teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology-ICT*). Singapura, Malaysia dan Vietnam menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik dari pada negara anggota ASEAN lainnya. Ekonomi Singapura diharapkan berkembang sampai 8,9 persen, sedangkan Malaysia dan Vietnam diproyeksikan mencapai pertumbuhan 7,5 persen.<sup>6</sup> Sementara itu China berhasil menyerap sebagian besar investasi asing yang mengalir ke kawasan Asia Timur. Sebagai perbandingan, pada tahun 2003, China menyerap investasi asing sebesar 53,5 milyar dolar AS, sedangkan investasi asing yang mengalir ke Asia Tenggara secara total hanya 19 milyar dolar AS dimana sebenarnya meningkat 27 persen dari tahun sebelumnya.<sup>7</sup> Ironisnya, bertolak belakang dengan kecenderungan meningkatnya investasi di kawasan regional, Indonesia masih mengalami disinvestasi, walaupun angkanya sudah mengecil dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak krisis. Meskipun demikian, investasi swasta di Asia Tenggara mulai membaik setelah beberapa tahun tidak mengalami pertumbuhan akibat memburuknya kondisi ekonomi. Namun defisit anggaran dan membengkaknya pinjaman masih dialami banyak negara Asia Tenggara. Berhasilnya penyelenggaraan pemilu di Filipina, Malaysia dan Indonesia bisa memberi harapan baik bagi pertumbuhan jangka pendek-menengah di kawasan.

---

<sup>5</sup>Asian Development Bank (ADB), *Asian Development Outlook 2004 Update*, ADB, Oktober 2004.

<sup>6</sup>Regional Outlook: Southeast Asia 2005-2006, Singapura: ISEAS, hal. 65.

<sup>7</sup>United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), *World Investment Report 2004: The Shift towards Services*, New York: UNCTAD, 2004.

Perkembangan terakhir dalam ASEAN adalah disetujuinya penghapusan tarif bagi 11 sektor prioritas pada pertemuan KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, November 2004. Untuk ini ditetapkan dua jadwal, yaitu: tahun 2007 bagi ASEAN-6 dan tahun 2012 bagi negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam), yang sebenarnya dipercepat tiga tahun dari jadwal semula di dalam kerangka *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).<sup>8</sup> Adapun 11 sektor prioritas yang dicakup adalah: elektronik, e-ASEAN, kesehatan, produk kayu, otomotif, produk karet, tekstil dan garmen, produk agribisnis, perikanan, transport udara, dan pariwisata. Pada kesempatan yang sama, ASEAN juga menandatangani persetujuan dengan China untuk menghapus tarif barang sebagai jalan awal ke arah ASEAN-China FTA (*Free Trade Area*) yang bila berhasil bisa menjadi FTA terbesar di dunia pada 2010 bagi ASEAN-6 dan 2015 bagi negara-negara CMLV. Lebih lanjut, ASEAN juga melakukan pembicaraan FTA secara terpisah dengan Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Bahkan negosiasi ASEAN-India FTA yang dipimpin Malaysia sudah dimulai.

Dari perspektif ekonomi, motivasi yang mendorong ketiga negara Asia Timur menjalin kerjasama dengan ASEAN adalah: a) ASEAN dengan penduduk lebih dari 600 juta manusia merupakan pasar yang potensial untuk terus dikembangkan; b) ASEAN merupakan sumber bahan baku dan energi bagi ketiga negara tersebut; c) ASEAN dapat dijadikan tempat tujuan investasi bagi industri dari ketiga negara karena masih memiliki keunggulan komparatif, seperti upah buruh yang relatif murah.<sup>9</sup> Sementara itu Jepang percaya bahwa tujuan mengembangkan hubungan antara ASEAN dan Jepang adalah untuk mencapai kesejahteraan, perdamaian dan stabilitas di kawasan. Baru-baru ini, Koizumi, Perdana Menteri Jepang, mempromosikan “act together and advance

---

<sup>8</sup>“ASEAN Accelerates Integration of Priority Sectors”, 29 November 2004. [www.aseansec.org/16620.htm](http://www.aseansec.org/16620.htm).

<sup>9</sup>Wawancara dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Deplu, Jakarta, 13 Mei 2005.

together” sebagai cara mencapai tujuan tersebut.<sup>10</sup> Pandangan lain dikemukakan oleh Wang Jianqun bahwa ASEAN tidak dipaksa untuk memperkuat hubungan eksternal dengan Asia Timur, tetapi ASEAN mengambil inisiatif untuk merangkul tetangganya. Memang krisis ekonomi Asia membawa Asia Tenggara dan Asia Timur ke arah kerjasama yang lebih erat. Negara-negara ASEAN memerlukan bantuan dan negara-negara Asia Timur mengulurkan bantuan. Namun kerjasama ASEAN+3 berkembang menjadi *equal partnership* dan negara *Plus Three* melihat ASEAN sebagai suatu organisasi penting yang bisa memainkan peran yang signifikan di kawasan.<sup>11</sup>

Kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan dalam kerangka ASEAN+3 menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Salah satu indikatornya ialah tumbuhnya nilai perdagangan antara ASEAN dan negara-negara *Plus Three* sebesar 14,49 persen, yaitu dari 170,8 milyar dolar AS pada 2002 menjadi 195,6 milyar dolar AS pada tahun 2003.<sup>12</sup> Sementara itu pengaturan perdagangan bilateral antara ASEAN dan China serta ASEAN dan Jepang sudah dibentuk, sedangkan antara ASEAN dan Korea Selatan masih dalam proses pembahasan. Penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai hubungan bilateral ini dikemukakan dalam Bab IV laporan ini. Pengaturan perdagangan bilateral ini bisa menjadi *building blocks* bagi kemungkinan dibentuknya *East Asia Free Trade Area* (EAFTA) di masa depan.

Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah konfigurasi kerjasama perdagangan ASEAN+3 benar-benar terdiri dari ASEAN sebagai satu entitas dan ketiga negara Asia Timur juga sebagai satu entitas, ataukah hanya akan merupakan kumpulan dari FTA yang bersifat bilateral. Sebenarnya negara-negara Asia Timur sedang berusaha untuk menjadi suatu entitas, namun saat ini tampaknya

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Masafumi Kuroki, Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia, Jakarta, 23 Mei 2005.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Wang Jianqun, Counsellor, Kedutaan Besar Republik Rakyat China, Jakarta, 11 Mei 2005.

<sup>12</sup>“ASEAN Plus Three Cooperation” [www.aseansec.org/16581.htm](http://www.aseansec.org/16581.htm).

sangat sulit dilakukan karena terdapat *historical barrier* antar ketiga negara tersebut. Sebagai contoh, ketegangan antara China dan Jepang bisa menghambat proses diplomasi dan perundingan diantara keduanya. Lalu menjadi suatu pertanyaan apakah ketegangan ini akan membawa dampak negatif bagi kerjasama ASEAN+3. Pada kenyataannya, baru-baru ini hubungan China dan Jepang kembali memanas setelah China secara sepihak membatalkan rencana pertemuan *Plus Three* dalam KTT ASEAN bulan Desember 2005. Secara resmi China menyatakan bahwa kunjungan reguler Perdana Menteri Junichiro Koizumi ke Kuil Yasukuni<sup>13</sup> menjadi sebab pembatalan tersebut.<sup>14</sup> Rivalitas antara Jepang dan China ini cukup mengkhawatirkan dan kalau tidak mereda bisa “mementahkan” rencana membangun Komunitas Asia Timur.

Namun demikian, Wang Jianqun berpendapat bahwa masalah ini murni isu bilateral dan harus diselesaikan secara bilateral. Bagaimanapun juga, China melihat masalah ini tidak semata-mata isu China-Jepang saja, tapi juga merupakan isu bagi negara-negara Asia (Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan). Dalam hal ini China berpendapat bahwa Jepang harus melakukan empat hal, yaitu: menghargai sejarah untuk bisa menghargai negara lain; merevisi buku sejarah; mengajukan permohonan maaf yang tidak hanya dalam bentuk kata-kata tapi tindakan nyata lebih penting; dan tidak mengunjungi Yasukuni *shrine*.<sup>15</sup>

Namun di sisi lain, mengingat besarnya nilai perdagangan dan ketergantungan ekonomi yang tinggi diantara kedua negara, mereka

---

<sup>13</sup>Kuil Yasukuni merupakan tempat penghormatan bagi 2,5 juta orang yang tewas dalam Perang Dunia (PD) II, termasuk 14 penjahat perang. Bagi China dan Korea Selatan yang mengalami aksi kekejaman tentara Jepang pada masa pendudukan, kuil itu merupakan simbol militerisme Jepang. Sementara Koizumi menganggap bahwa ia menghormati warga Jepang yang tewas semasa PD II dan berusaha menegaskan komitmen pasifisme Jepang.

<sup>14</sup>*Kompas*, 10 Desember 2005.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Wang Jianqun, Counsellor, Kedutaan Besar Republik Rakyat China, Jakarta, 11 Mei 2005.



percaya bahwa ketegangan politik tidak akan menghancurkan hubungan ekonomi. Khususnya bagi China yang berpegang pada prinsip “treat your neighbours with kindness and work with your neighbours as partners”.<sup>16</sup>

Hambatan sejarah di atas bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara ketiga negara tersebut, dan akan terus berkembang di masa-masa mendatang. Dalam situasi seperti ini, ASEAN sebagai unsur perekat kerjasama sangat dominan. Walaupun tidak dilakukan secara eksplisit, faktor ASEAN yang dapat menjadikan negara *Plus Three* dapat duduk bersama-sama dalam forum ASEAN+3 diakui oleh ketiga negara tersebut. Dalam masa yang akan datang masih sulit diterima apabila salah satu dari tiga negara tersebut akan menjadi pemimpin Asia Timur, karena akan menimbulkan ketegangan di kawasan. Oleh karena itu posisi ASEAN masih sangat diperlukan dalam menjaga perdamaian, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Timur.

Dalam kerjasama keuangan telah dibentuk pengaturan keuangan regional yang dikenal dengan “Chiang Mai Initiative” (CMI). Pengaturan ini memuat ketentuan *ASEAN Swap Arrangement* (ASA) dan jaringan *Bilateral Swap Arrangements* (BSAs) di antara negara anggota ASEAN, China, Jepang dan Korea Selatan. Sekarang jumlah uang dalam ASA telah mencapai satu milyar dolar AS dan kumpulan 16 BSAs secara total mencapai 36,5 milyar dolar AS. Dengan demikian negara-negara ASEAN+3 sekaligus berusaha menemukan cara meningkatkan efektivitas program CMI ini.

Dalam kerjasama bidang keuangan dan moneter, kemajuan yang sudah dicapai ialah dikembangkannya *Asian Bond Market Initiative* (ABMI). Negara-negara ASEAN+3 sedang berusaha memodifikasi peraturan yang ada untuk memudahkan pengeluaran surat obligasi dan investasi dalam satuan mata uang lokal dalam kerangka ABMI. Bahkan *Asian Bonds Online Website* (ABW) sudah diluncurkan sejak Mei 2004. Inisiatif ini didorong pengalaman pahit krisis Asia 1997 yang membuktikan bahwa salah satu penyebab

---

<sup>16</sup>Ibid.

utamanya adalah ketergantungan yang tinggi pada pinjaman jangka pendek dari luar. Depresiasi mata uang lokal mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dan kreditor asing sehingga terjadi pelarian modal dalam jumlah yang sangat besar. Dengan demikian banyak negara Asia yang kekurangan aset mata uang asing dan mengalami kesulitan dalam membayar hutang yang menumpuk. Dari pengalaman ini ada beberapa pelajaran yang bisa ditarik, yaitu: menghindari masalah ketidakcocokan mata uang dan jatuh tempo pinjaman; menghindari ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sekor perbankan; dan menghindari keterpancangan pada satu jenis mata uang utama (dalam hal ini dolar AS).

Salah satu cara mengurangi ketergantungan pada sektor perbankan adalah dengan mempromosikan pasar obligasi. Untuk itu diperlukan pasar obligasi di Asia yang kuat, sehingga sejak krisis 1997 isu pengembangan pasar obligasi Asia sudah dibicarakan di berbagai forum internasional seperti *Asian Cooperation Dialogue* (ACD), APEC, ASEAN+3 dan *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP). Setelah pertemuan ACD pertama tahun 2002, inisiatif untuk mengembangkan pasar obligasi Asia mulai bergulir cepat. Keinginan APEC dan ASEAN+3 adalah meningkatkan tawaran instrumen hutang yang bisa dipraktekkan dan mengembangkan infrastruktur pasar. Sedangkan ASEAN+3 ABMI diusulkan pada *ASEAN+3 Deputies Meeting* pada Desember 2002. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pasar obligasi di Asia sehingga memungkinkan sektor publik dan swasta untuk menambah modal dan investasi jangka panjang tanpa resiko depresiasi mata uang dan jatuh tempo. Untuk ini telah dibentuk enam kelompok kerja pada tahun 2003. Kemudian *Asian Development Bank* (ADB) mendukung Kelompok Kerja ASEAN+3 ini dengan membentuk enam kelompok kerja internal yang digunakan untuk mendukung pengembangan pasar obligasi melalui berbagai cara, antara lain pinjaman, bantuan teknis bagi pemerintah serta institusi yang mengatur pasar obligasi dan pengeluaran surat obligasi di pasar Asia.

Dengan respon positif dan cepat dari negara-negara di kawasan, maka pengembangan pasar obligasi menjadi isu penting

bagi kerjasama keuangan regional. Berbagai organisasi regional, pemerintah dan para pengambil keputusan di berbagai negara Asia mengakui pentingnya suatu pasar obligasi yang kuat setelah menyadari betapa kecilnya pasar obligasi Asia dan tidak mudah diuangkan saat sebelum krisis 1997. Sejak itu pasar obligasi dengan mata uang lokal di Asia mengalami pertumbuhan pesat, yaitu berkembang lebih dari dua kali lipat antara 1997-2002 dengan jumlah total 1,2 trilyun dolar AS pada akhir 2002. Jumlah ini hampir sama dengan 50 persen GDP di kawasan Asia.<sup>17</sup> Pertumbuhan yang mengagumkan ini bisa menjadi indikasi atas potensi untuk pengembangan pasar obligasi di Asia lebih lanjut.

Secara hipotesis, apabila semua hambatan dalam pasar obligasi bisa disingkirkan, maka investasi oleh dana obligasi Asia dan investor akan mendorong kemudahan untuk diuangkan, peningkatan penerbitan obligasi, jangka waktu pinjaman yang lebih baik bagi pemerintah dan perusahaan, dan stabilitas yang tinggi bagi pasar uang Asia. Namun ada pendapat yang tidak sejalan dengan asumsi di atas, yaitu bahwa kesamaan infrastruktur pasar di Asia sangat kecil karena pasar keuangan yang terfragmentasi, sistem perdagangan tidak terkoordinasi, ketentuan bangkrut masih berbeda antar satu negara dengan negara lain, dan belum ada standar dalam penilaian kredit bagi perusahaan regional.<sup>18</sup> Oleh karena itu kerjasama pemerintah di kawasan menjadi sangat penting bagi suksesnya pasar obligasi regional, khususnya usaha yang difokuskan pada harmonisasi hukum dan infrastruktur. Apabila Asia tidak mau mengalami keterpurukan lagi, maka inisiatif mengembangkan pasar obligasi Asia yang sudah berjalan ini disertai pembicaraan isu-isu yang relevan secara berkelanjutan harus diikuti dengan langkah-langkah konkrit.

---

<sup>17</sup>Guorong Jiang dan Robert MacCauley, "Asian Local Currency Bond Market", *BIS Quarterly Review*, Juni 2004, hal. 68.

<sup>18</sup>Takatoshi Ito, "Promoting Asian Basket Currency Bond", dalam *Developing Asian Bond Market*, Takatoshi Ito dan Yung Chul Park (ed), Australia: Asia Pacific Press, 2004, hal. 84.

## Implementasi EASG

Laporan rekomendasi EASG yang diadopsi pemimpin ASEAN pada APT Summit di Kamboja tahun 2002 memuat 17 program jangka pendek dan sembilan program jangka menengah dan panjang. Negara-negara ASEAN+3 sudah setuju untuk mengimplementasikan semua program jangka pendek sebelum kerjasama ASEAN+3 mencapai usia sepuluh tahun pada 2007. Empat sasaran jangka pendek yang sudah dikerjakan adalah: 1) melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif bagi Asia Timur dengan membentuk *ASEAN Plus Three Study Group on Facilitation and Promotion of Exchange of People and Human Resources Development* oleh Jepang; 2) membangun jaringan *East Asia Think-tanks* (NEAT) oleh China dan Thailand; 3) membentuk *East Asia Forum* (EAF) oleh Korea Selatan dan Malaysia; 4) membentuk *East Asia Business Council* (EABC) oleh Malaysia. Selain itu ada beberapa program yang juga sudah dikerjakan melalui kerjasama sektoral ASEAN+3, misalnya menetapkan status GSP dan perlakuan khusus bagi negara anggota yang kurang berkembang serta memperkuat mekanisme bagi kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional.

Dalam rangka melaksanakan sembilan program jangka menengah dan panjang, China antara lain berencana mengadakan konferensi tentang investasi dan usaha kecil-menengah pada tahun 2005. Selain itu pada waktu-waktu yang memungkinkan, negara-negara ASEAN+3 secara berkelanjutan mengadakan diskusi tentang rencana *East Asia Summit* (EAS) dan konsep *East Asia Community*. Sehubungan dengan EAS dimana Malaysia bersedia menjadi tuan rumah pada Desember 2005, ASEAN dan Jepang telah mengembangkan konsep dan makalah tentang EAS. Lebih jauh lagi, *ASEAN Plus Three Economic Ministerial Meeting* (AEM+3) yang diadakan di Jakarta pada September 2004 menghasilkan proposal untuk membentuk *Experts Group* terdiri dari akademisi dan peneliti untuk melakukan studi kelayakan tentang EAFTA. Ada tiga program yang sedang diusahakan melalui pertemuan sektoral ASEAN+3, yaitu: 1) membentuk fasilitas keuangan regional dan meningkatkan

koordinasi bagi mekanisme nilai tukar regional melalui *ASEAN+3 Finance Ministers Meeting*; 2) meningkatkan kerjasama lingkungan kelautan regional bagi seluruh kawasan melalui *ASEAN+3 Ministers Meeting on the Environment*; 3) membentuk kerangka bagi kebijakan, strategi, dan rencana kerja bidang energi melalui *ASEAN+3 Ministers Meeting on Energy*.

Tugas utama *East Asia Vision Group* (EAVG) adalah menggariskan visi untuk mendukung dibentuknya *East Asia Community* (EAC). Rekomendasi EAVG mengenai pembentukan EAC adalah evolusi dari APT Summit ke arah EAS. Berdasarkan rekomendasi tersebut dibentuklah EASG pada 2001 dengan tugas utama mengevaluasi semua rekomendasi EAVG dengan fokus mengidentifikasi kerjasama yang konkrit yang bisa mendukung tercapainya visi Asia Timur. Dalam laporan EASG, dinyatakan bahwa EAS adalah program jangka menengah dan panjang yang akan dilaksanakan secara bertahap. Dari perkembangan ini, menurut Marty Natalegawa, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN-Departemen Luar Negeri Indonesia, setidaknya ada dua poin penting yang bisa disimpulkan. *Pertama*, kapasitas ASEAN yang menghasilkan perubahan positif di dalam tubuh ASEAN sendiri. Meskipun krisis 1997 sebenarnya bisa melemahkan tidak hanya negara anggota yang dilanda krisis secara individual tapi juga ASEAN sebagai suatu entitas kolektif, namun kenyataannya ASEAN berhasil memperkuat dirinya dengan membangun kerjasama dengan negara-negara *Plus Three*. Hal ini membuktikan bahwa perspektif yang terbuka dan *outward looking* tidak melaratkan relevansi ASEAN, tapi justru memperkuat ASEAN. *Ke dua*, kapasitas ASEAN yang bisa menghasilkan perubahan di luar ASEAN. Sebelum inisiatif ASEAN 1997, sulit membayangkan China, Jepang dan Korea Selatan sebagai kesatuan kolektif. Walaupun tidak ada yang membuat pernyataan eksplisit bahwa kerjasama dengan ASEAN telah menghasilkan “perekat” yang mengikat tiga negara bersama,

adalah suatu kenyataan bahwa ASEAN berperan dalam membangun praktek dan kebiasaan berpikir sebagai “tiga”.<sup>19</sup>

Menurut rekomendasi EASG, sebenarnya EAS digambarkan sebagai kelanjutan dari proses kerjasama ASEAN+3, dengan melibatkan negara-negara yang sama dan dilaksanakan saat proses ASEAN+3 sudah cukup matang. Langkah bertahap dan pendekatan sedikit demi sedikit ke arah EAS gugur saat ASEAN Summit ke-10 dan ASEAN+3 Summit di Vientiane pada November 2004. Saat itu para pemimpin memutuskan untuk menyelenggarakan EAS di Malaysia pada 2005 dan menugasi *ASEAN's Foreign Affairs Ministers* mempelajari lebih jauh ide EAS termasuk memikirkan prosedur yang harus diikuti dan seleksi anggota yang akan berpartisipasi. Dengan demikian, yang semula adalah tujuan jangka menengah-panjang, dipersingkat dalam waktu satu tahun. Lebih penting lagi ialah rencana semula bahwa ASEAN+3 akan mengalami transformasi ke dalam EAS sebagai refleksi perjalanan ke arah EAC, sekarang bisa jadi ASEAN+3 Summit berdampingan dengan *East Asia Summit*.

Dalam hal perkembangan institusi pendukung, setelah kerjasama berjalan selama delapan tahun, saat ini ada 49 mekanisme dalam proses ASEAN+3 yang mengkoordinir 17 bidang kerjasama, termasuk ekonomi, moneter dan keuangan, politik dan keamanan, pariwisata, pertanian, lingkungan, energi dan ICT. Untuk itu telah dibentuk unit ASEAN+3 pada Desember 2003 di dalam struktur Sekretariat ASEAN untuk membantu mengkoordinasi dan memonitor kerjasama ASEAN+3. Unit ini membawahi 48 badan koordinasi, 14 forum tingkat menteri, 17 forum tingkat pejabat tinggi, tiga forum tingkat Dirjen dan 13 forum tingkat ahli. Baru-baru ini, dalam *ASEAN+3 Foreign Ministers Meeting* di Vientiane pada Juli 2005, para menteri menyambut terbentuknya *ASEAN+3 Director-General Working Group* dan *ASEAN+3 Contact Group* yang akan membantu mengkoordinasi dan mengimplementasi

---

<sup>19</sup>Marty Natalegawa, *ASEAN+3 versus the East Asia Summit, DUTA-Indonesia and the World*, April 2005, hal.2.

kerjasama ASEAN+3, khususnya pelaksanaan berbagai proyek dan kegiatan serta program EASG.

Meskipun 13 kepala pemerintahan sudah bertemu setiap tahun sejak 1997 dalam kerangka ASEAN+3, namun belum nampak hasil yang substantif dan konkrit kecuali program Inisiatif Chiang Mai yang menjadi langkah awal kerjasama ASEAN+3. Daftar di bawah ini menggambarkan evolusi ASEAN+3 sejak 1997 sampai sekarang.

### EVOLUSI ASEAN + 3

KTT pertama Desember 1997	Kuala Lumpur	- penekanan pada kerangka Manila - pentingnya dialog dengan Eropa
KTT ke-dua Desember 1998	Hanoi	- proposal untuk EAVG - persetujuan institusionalisasi <i>plus three</i> - pentingnya Inisiatif Miyazawa
KTT ke-tiga November 1999	Manila	- deklarasi kerjasama Asia Timur
KTT ke-empat November 2000	Singapura	- pengumuman <i>Obuchi Plan</i> - proposal untuk East Asia Summit - Inisiatif Chiang Mai - proposal untuk East Asia FTA - pembentukan EASG
KTT ke-lima November 2001	Bandar Seri Begawan	- masuknya laporan EAVG
KTT ke-enam November 2002	Phnom Penh	- diskusi tentang terorisme - diskusi laporan EAVG - penekanan EAFTA dan EA Summit - diskusi isu Korea Utara
KTT ke-tujuh Oktober 2003	Bali	- dukungan ASEAN bagi six-party dialogue - diskusi laporan EASG
KTT ke-delapan November 2004	Vientiane	- diskusi mekanisme memperkuat kerjasama ASEAN+3 - pentingnya kerjasama energi - dukungan <i>plus three</i> bagi keputusan ASEAN terhadap EAS 2005

*Sumber:* diadopsi dari Sueo Sudo, *Evolution of ASEAN-Japan Relations*, Southeast Asia Background series No. 6, 2005, Singapore: ISEAS. Dan dilengkapi oleh penulis.

## Perkembangan Eksternal

Topik yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian dan didiskusikan secara intensif adalah *East Asia Summit* (EAS). Berbagai pertemuan tingkat menteri dan pejabat tinggi ASEAN telah membicarakan prosedur dan syarat partisipasi di forum ini. Hasil penting dari pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Cebu pada April 2005 adalah disepakatinya tiga kriteria yang harus dipenuhi negara di luar kerangka ASEAN+3 yang ingin berpartisipasi dalam EAS, yaitu: 1) negara tersebut adalah mitra-dialog penuh ASEAN; 2) negara tersebut telah atau mau menandatangani TAC; 3) negara tersebut mempunyai kerjasama yang substantif dengan ASEAN. Pada saat yang sama, para menteri ASEAN juga setuju untuk menempatkan ASEAN sebagai mesin pendorong dalam proses EAS serta menekankan bahwa EAS harus bersifat inklusif, yang berarti negara peserta EAS tidak hanya terbatas pada negara-negara ASEAN+3. Sebenarnya keputusan di Cebu ini banyak dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran Indonesia dalam pengembangan modalitas EAS. Seperti diutarakan oleh Sugeng Rahardjo, beberapa prinsip dasar yang disampaikan Indonesia dalam pembahasan modalitas EAS antara lain bahwa:

1. EAS tidak diarahkan untuk membentuk organisasi regional baru yang akan menggantikan ASEAN yang telah ada selama 38 tahun terakhir ini dalam mengembangkan kerjasama di kawasan.
2. ASEAN tetap menjadi “driving force” dalam proses kerjasama Asia Timur dan *East Asia Summit*, sehingga hasil-hasil dan proses integrasi Asia Timur tetap dalam kendali ASEAN.
3. EAS harus mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan ASEAN+3 Summit.
4. Usulan keikutsertaan India, Australia dan Selandia Baru perlu mendapatkan pertimbangan, dengan demikian ASEAN akan menjadi “hub” dalam proses kerjasama Asia Timur.



5. Proses pembahasan pada EAS menganut prinsip-prinsip “openness”, “transparency”, “inclusiveness”, dan “conformity” dengan norma-norma internasional.<sup>20</sup>

Poin-poin di atas senada dengan yang dinyatakan Marty Natalegawa,

“Jika kita termotivasi untuk menjamin bahwa ASEAN tetap menjadi ‘hub’ dalam proses EAC masa depan, maka saya percaya bahwa kita perlu mengadopsi perspektif yang baru dan berani. Persisnya, kita perlu berpikir di luar negara+3 sebagai anggota EAS dengan menengok ke India, Australia dan Selandia Baru. Oleh karena itu, daripada memandang ASEAN+3 sebagai elemen yang eksklusif dari EAS, lebih baik membayangkan ASEAN menempati ‘hub’ dengan 3 sinar, yaitu negara-negara +3 di Utaranya, India di Baratnya dan Australia dan Selandia Baru di Asia Tenggara.”<sup>21</sup>

Namun tantangannya adalah bagaimana menjamin bahwa perhatian saat ini dan yang akan datang terhadap EAS tidak akan mengalihkan semangat yang seharusnya tetap menjadi usaha prioritas—membangun *ASEAN Community*. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah berbeda dengan forum ASEAN+3 dimana negara anggota ASEAN berpartisipasi sebagai suatu kolektivitas “10” yang bekerjasama dengan *Plus Three*, partisipasi dalam EAS sifatnya individual atau nasional. Konsekuensinya adalah keuntungan dari kekuatan kolektif ASEAN tidak akan muncul.

Hal lain yang juga penting untuk dijawab adalah langkah-langkah apa yang perlu diambil ASEAN agar negara *Plus Three* dapat mempertahankan kemitraan jangka panjang dalam kerangka ASEAN+3 di tengah berkembangnya keinginan membangun format yang lebih tinggi, yaitu EAS. Pertama-tama ASEAN harus memperkuat integrasi dan meningkatkan daya saing untuk mencapai Komunitas ASEAN terlebih dahulu. Suatu hal penting bagi negara-negara ASEAN untuk saling membantu agar tumbuh bersama dan

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Deplu, Jakarta, 13 Mei 2005.

<sup>21</sup>Marty Natalegawa, *ASEAN+3 versus the East Asia Summit*, DUTA-Indonesia and the World, April 2005, hal. 5.

mempertahankan kesatuannya mengingat masih adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi. Kemudian mengingat masih adanya ketegangan di antara ketiga negara Asia Timur, maka ASEAN harus mengambil inisiatif untuk menempatkan diri sebagai pusat dalam kerjasama ASEAN+3 maupun proses EAS sehingga ketegangan tersebut tidak menyurutkan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik. Selama *comfort level* ketiga negara tersebut masih sulit dicapai dalam waktu dekat ini, maka ASEAN akan tetap menjadi pusat dari kerjasama ASEAN+3.

## Penutup

Pada tahun-tahun mendatang, negara-negara ASEAN+3 akan memperdalam kerjasama sektoral yang sudah ada dan berusaha mengimplementasikan program-program jangka menengah dan panjang seperti yang sudah diidentifikasi dalam studi EASG. Bila usaha ini dilakukan secara terus menerus, maka kerjasama ASEAN+3 bisa berkembang ke arah terbentuknya *East Asia Community* (EAC) yang didukung tiga pilar, yaitu: kerjasama politik dan keamanan; kerjasama ekonomi dan keuangan; dan kerjasama sosial-budaya. Namun bersamaan dengan usaha ke depan ini, ASEAN+3 juga pada saat yang sama harus mengatasi beberapa tantangan seperti bagaimana mempertemukan kepentingan bersama mengingat adanya perbedaan di antara anggotanya, baik pada tatanan politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian bagaimana menanggapi proses globalisasi dan dampaknya terhadap usaha-usaha integrasi, sejalan dengan usaha memperkecil jurang perbedaan antar anggota tersebut. Untuk itu laju kerjasama perlu disesuaikan sampai pada taraf dimana semua anggota bisa mengikutinya. Dengan menganut prinsip *outward looking* maka juga harus diingat keseimbangan antara kerjasama ASEAN+3 dan kerjasama dengan mitra dialog ASEAN lainnya, serta organisasi regional dan internasional yang lain.

Hal lain yang juga tidak mudah bagi ASEAN adalah mempertahankan peran sentralnya dalam proses ASEAN+3 dan EAS meskipun hal ini sudah disepakati bersama. Kesepakatan ini

antara lain disebabkan kenyataan bahwa negara *Plus Three* masih menyangang *historical barrier* yang sulit diatasi. Dalam kondisi seperti ini, Sugeng Rahardjo berpendapat bahwa “ASEAN harus tetap berperan sebagai *driving force* baik dalam kerjasama ASEAN+3 dan proses EAS. Kendali yang dipegang oleh ASEAN akan meredakan ketegangan dari ketiga negara tersebut”.<sup>22</sup> Lebih lanjut diharapkan juga EAS ada nilai tambahnya walaupun belum ada pandangan yang jelas mengenai hal ini. Tidak mengherankan bila ada yang berpendapat bahwa sekarang ini terlalu awal (*premature*) untuk melaksanakan EAS. Konsep EAC belum ditetapkan secara jelas bagi negara-negara *Plus Three* sehingga belum ada visi yang jelas. Apakah EAS merupakan kelanjutan dari ASEAN+3 Summit atau EAS harus berbeda secara geografis dan fungsional. Dalam beberapa isu fungsi ASEAN+3 bisa mencukupi, namun dalam beberapa isu lain fungsi ASEAN+3 tidak cukup. Dengan berbagai tantangan ini dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sudah bisa dipastikan usaha ini memerlukan waktu untuk bisa sampai terlihat keberhasilannya. Oleh karena itu setiap anggota harus ikut serta menghidupkan dan mempertahankan momentum kerjasama.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Deplu, Jakarta, 13 Mei 2005.



## Bab IV

# PERKEMBANGAN KERJA SAMA PERDAGANGAN ASEAN DAN ASIA TIMUR

*Ratna Shofi Inayati*

### **Pengantar**

Tahun 2005 mencatat adanya perkembangan yang positif di dalam realisasi kerjasama ASEAN+3 yang meliputi sepuluh negara anggota ASEAN dan tiga negara Asia Timur yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Beberapa kesepakatan di bidang perdagangan bebas--*Free Trade Area* (FTA) berhasil ditandatangani bersama. "Financial shock" yang ditimbulkan krisis ekonomi 1997 telah melampaui perbedaan geografis di antara kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Laut. Disinilah letak kepentingan strategis dari keputusan pada *Second ASEAN Informal Summit* di Kuala Lumpur pada tahun 1997 untuk memperluas kerjasama ASEAN dengan China, Jepang dan Korea Selatan melalui *the first ASEAN+3 Summit*.

Namun demikian dengan berkembangnya wacana pembentukan *East Asia Community* (EAC) akhir-akhir ini, perlu dikaji ulang bagaimana kemungkinan masuknya ASEAN+3 ke dalam kerangka forum EAC. Pertanyaan yang perlu dijawab ialah apakah kerjasama perdagangan ASEAN+3 ini akan benar-benar terdiri atas ASEAN sebagai satu entitas dan ketiga negara Asia Timur juga sebagai satu entitas, ataukah hanya akan merupakan kumpulan dari FTA yang lebih bersifat bilateral. Kemudian khusus dari perspektif Indonesia, apa strategi untuk bisa bersaing dalam menarik investasi asing dan memperbesar pangsa pasar di tengah terbukanya ekonomi kawasan regional. Berdasarkan uraian di atas, bab ini akan mengkaji hubungan antar negara-negara ASEAN dan Jepang, China serta Korea Selatan, khususnya di bidang perdagangan dalam kaitannya dengan rencana pembentukan EAC.

## **Pembentukan Free Trade Area (FTA) Dalam Kerangka ASEAN**

Apabila dikaji secara mendalam, faktor ASEAN sangat penting dalam menarik ketiga negara Asia Timur (Jepang, China dan Korea Selatan) untuk duduk bersama dalam ASEAN+3. Negara-negara Asia Timur sedang berusaha untuk menjadi satu entitas, namun sampai saat ini tampaknya sangat sulit dilakukan karena terdapat *historical barrier*<sup>1</sup> antara ketiga negara tersebut. Di masa depan, tidak mungkin salah satu dari tiga negara tersebut akan menjadi pemimpin Asia Timur, karena akan menimbulkan ketegangan di kawasan ini. Oleh karena itu sampai kapanpun posisi ASEAN masih sangat diperlukan dalam menjaga perdamaian, tidak saja di kawasan Asia Tenggara tetapi juga di kawasan Asia Timur.

Walaupun dalam hubungan politik ada *historical barrier*, namun di bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan justru mengalami kemajuan khususnya dalam mengembangkan *East Asia Free Trade Area* (EAFTA). Dalam kaitan ini, pertemuan pertama para ahli dari ASEAN+3 telah melakukan pembahasan mengenai modalitas EAFTA pada akhir April 2005 di Beijing. Pembahasan lanjutan mengenai modalitas EAFTA diselenggarakan pada Oktober 2005 di Indonesia.

Perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Timur, tampaknya akan memberikan gambaran positif khususnya dalam pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan melalui FTA. Apabila ini dapat direalisasikan setelah tahun 2020, maka kawasan Asia Timur akan merupakan kawasan FTA yang terbesar di seluruh dunia, yang meliputi pasar dengan hampir kurang lebih 2,5 milyar orang dengan GDP cukup besar. Oleh karena itu prinsip *openness*,

---

<sup>1</sup>*Historical barrier* antara Jepang, China dan Korea Selatan menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat di antara ketiga negara tersebut. Hal ini akan terus berkembang di masa yang akan datang. Dalam posisi seperti ini, ASEAN sebagai unsur perekat kerjasama sangat dominan. Hal ini diakui oleh ketiga negara tersebut, meskipun dilakukan secara eksplisit.

*tranperancy, inclusiveness dan conformity* dengan norma-norma internasional perlu melandasi kekuatan ekonomi di Asia Timur.<sup>2</sup>

Sebagai realisasi pembentukan FTA, telah diadakan pertemuan *ASEAN Economic Meeting* (AEM) tahun 2003, dimana Indonesia menjadi ketua pada masa itu. Pada pertemuan tersebut hadir sepuluh negara ASEAN dan tujuh negara dialog (China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa). Dalam sidang AEM ke-36 juga ditandatangani berbagai protokol/persetujuan, yaitu protokol amandemen persetujuan khusus untuk Produk Sensitif dan Sensitif Tinggi serta Paket Komitmen ke-4 di bawah persetujuan Kerjasama Jasa-jasa ASEAN.

Dengan adanya pembentukan FTA dalam kerangka ASEAN, Indonesia perlu memperbaiki daya saingnya supaya mempunyai keunggulan kompetisi (*competitive advantage*) dengan melakukan berbagai perbaikan kondisi secara berkelanjutan dan konsisten, antara lain:

1. Melakukan upaya stabilitas politik dan keamanan serta penghapusan praktek KKN merupakan prioritas utama. Hal ini akan berdampak positif terhadap citra Indonesia baik di kalangan swasta maupun luar negeri.
2. Meningkatkan disiplin dan etos kerja, tertib waktu, aturan dan administrasi di seluruh instansi pemerintah yang akan mendorong *corporate governance*. Diikuti pula dengan penegakan hukum secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat secara luas terhadap kredibilitas pemerintah.
3. Strategi industri dan perdagangan jangka pendek, menengah dan panjang perlu dilakukan secara terarah dan terpadu untuk mendorong daya saing dan produktivitas, agar mampu bersaing dan merebut pangsa pasar yang lebih besar.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Deplu, Jakarta, 13 Mei 2005.

4. Dalam pengembangan *research and development*, perlu dikembangkan *triangle partnership* antara industri, universitas dan konsumen.
5. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik dan jaringan telekomunikasi perlu diserahkan kepada pihak swasta.

Di pasar ASEAN hingga saat ini, secara umum produk Indonesia belum mempunyai daya saing yang mantap. Hasil analisis dengan model *Constant Market Share* (CMS) menunjukkan bahwa setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997, ada kecenderungan daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN semakin menurun.

Pada periode 1997-1998, secara umum nilai efek daya saing Indonesia masih positif, yang artinya bahwa peningkatan ekspor ditopang oleh kemampuan daya saingnya. Namun pada periode 1998-1999, terjadi penurunan daya saing pada enam komoditas ekspor<sup>3</sup> dimana nilai efek daya saingnya negatif. Penurunan daya saing ini lebih disebabkan oleh faktor internal industrinya dan juga faktor ekonomi makro dan non ekonomi di Indonesia yang kurang kondusif bagi penciptaan daya saing yang tinggi.

### **Kerjasama ASEAN+3 di Bidang Finansial**

Pada pertemuan antara pimpinan ASEAN dengan China, Jepang dan Korea Selatan dalam ASEAN+3 Summit di Manila pada akhir 1999 telah dihasilkan suatu dokumen penting dan bersejarah yakni "*The Joint Statement on East Asia Cooperation*" yang mencakup beberapa bidang kerjasama, meliputi kerjasama ekonomi, moneter dan finansial serta kerjasama politik. Setelah pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang

---

<sup>3</sup>Komoditas tersebut adalah *Food Live Animal, Crude Material, Mineral Fuel, Animal Veg Oil, Chemical Product dan Misc Manufacturing*. Sumber Workshop "Hasil Penelitian Kompetitif LIPI Program Daya Saing dan Isu 2003", Jakarta, 14-15 November 2003.



meliputi: Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN+3, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN+3, dan Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN+3. Di antara kerjasama-kerjasama tersebut yang terpenting adalah kerjasama di bidang finansial.

Di dalam pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN+3 di Chiang Mai pada tahun 2000 telah dihasilkan kesepakatan yang dikenal dengan *Chiang Mai Initiative* mengenai perluasan *ASEAN Swap Arrangement* yang mencakup China, Jepang dan Korea Selatan. Lebih lanjut muncul pula ide untuk membentuk *Asia Monetary Fund* (AMF) sebagai pengganti *International Monetary Fund* (IMF). Hal ini merupakan suatu ide besar yang dilontarkan oleh Jepang dan apabila dapat terwujud akan mencakup dana sekitar 100 milyar dolar AS sehingga apabila Asia ditimpa krisis finansial lagi, negara-negara di kawasan ini akan lebih memilih mencari bantuan ke AMF daripada IMF yang menerapkan persyaratan/kondisi yang lebih ketat bahkan kadang memberatkan bagi negara penerima bantuannya.<sup>4</sup>

Hal lain yang kemungkinan dapat dikoordinasikan adalah masalah penentuan rezim nilai tukar yang terkendali yang merupakan perpaduan antara rezim nilai tukar yang fleksibel dan *fixed* sehingga di masa depan dapat terbentuk suatu "East Asia Monetary Union" (semacam *European Monetary Union* dengan mata uang tunggal euro yang kini semakin menguat). Oleh karena itu, dikemudian hari negara-negara Asia perlu meningkatkan kerjasamanya untuk membentuk mata uang tunggal agar dapat bersaing dengan euro dan dolar yang lebih kuat.<sup>5</sup>

Pada saat ini terdapat dua bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh ASEAN yaitu ASEAN+3 (China, Jepang dan Korea Selatan), serta ASEAN+1+1+1 yang dilakukan oleh ASEAN dengan masing-masing negara tersebut. Strategi ASEAN dalam

---

<sup>4</sup>Phillip Y. Lipsey, "Japan's Asian Monetary Fund Proposal", *Stanford Journal of East Asian Affairs*, vol. 3, no. 1/Spring 2003, hal. 4-7. Lihat juga ASEAN+3 Document Series 1999-2004, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2005, hal. 115-117.

<sup>5</sup>Ibid.

mengembangkan kedua bentuk kerjasama ini, diarahkan untuk saling memperkuat satu dengan lainnya. Khususnya dalam pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan, ASEAN+1 merupakan *building block* dalam mencapai kerjasama ASEAN+3. Harus diakui bahwa hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang sampai tercapainya *comfort level*, khususnya antara negara-negara *Plus Three*.

Sejauh ini implementasi kerjasama ASEAN dan negara-negara *Plus Three* masih dalam bentuk proyek ekonomi. Proyek tersebut sebagai langkah awal dan penunjang menuju kerjasama ASEAN+3, misalnya berbagai proyek latihan dan infrastruktur (lihat lampiran).

### ASEAN-CHINA FTA

Ide untuk membentuk ASEAN-China FTA dikemukakan pertama kalinya oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji dalam *ASEAN+3 Meeting* di Singapura Nopember 2000 dan pada *ASEAN-China Economic Cooperation Meeting* pada bulan Agustus 2001. Usulan serupa juga dikemukakan oleh pemerintah Singapura, sementara negara-negara ASEAN lainnya sangat menentang pembentukan ASEAN-China FTA tersebut. Mereka cenderung lebih mendukung pembentukan FTA yang mencakup wilayah yang lebih luas termasuk Jepang dan Korea Selatan. Namun kedua negara tersebut saat itu belum siap.

Dalam *ASEAN-China Summit Meeting* di Brunei tahun 2001, kedua pihak sepakat untuk membentuk ASEAN-China FTA dalam waktu sepuluh tahun ke depan. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang besar karena kedua wilayah tersebut mencakup populasi penduduk sejumlah 1,7 milyar dengan GDP gabungan sebesar 2 trilyun dolar AS. China merupakan mitra terbesar ke-6 bagi ASEAN di bidang perdagangan dengan volume perdagangan sebesar 5 persen dari total perdagangan ASEAN. Sedangkan ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-5 bagi China. Rencana ASEAN-China FTA diprioritaskan pada bidang-bidang pertanian,

teknologi informasi, sumber daya manusia, investasi dan sub-region sungai Mekong.<sup>6</sup>

Setelah melalui enam tahap negosiasi, kesepuluh Kepala Negara ASEAN dan China berhasil menandatangani kesepakatan di Phnom Penh pada bulan Nopember 2002 guna melanjutkan program penurunan dan penghapusan tarif bea masuk yang dilaksanakan dalam tiga tahap: 1) *Early Harvest Program (EHP)* yang telah dimulai 1 Januari 2004 ; 2) *Normal Track* yang akan dimulai implementasi penurunan tarifnya pada tanggal 1 Juli 2005; dan 3) *Sensitive Track* tahun 2012 tarif maksimum 20% serta *Highly Sensitive Track* tahun 2015 tarif maksimum 50%.<sup>7</sup> Pada saat itu, tarif lebih dari 600 produk, terutama pertanian yang meliputi sekitar 10 persen dari seluruh produk yang diperdagangkan di antara kedua pihak telah diturunkan hingga 0%. Di dalam kerangka *Agreement ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation*, China akan mengurangi tarif impor bagi produk ASEAN beberapa tahun sebelum negara-negara ASEAN memberlakukan hal yang sama dan membuka pasar mereka bagi produk ekspor China. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ASEAN keuntungan ekspor terhadap produk China dan memberikan kesempatan bagi produsen ASEAN agar lebih efisien dan produktif. Para pejabat ASEAN juga berharap China dapat menjadi importir utama bagi produk-produk ASEAN.<sup>8</sup>

Pada pertemuan tersebut, Sekjen ASEAN Rodolfo Severino menyatakan bahwa ASEAN-China FTA akan memberikan dampak secara keseluruhan bagi kedua belah pihak. Apabila liberalisasi perdagangan atas barang dan jasa yang direncanakan dapat terwujud tahun 2012, maka wilayah ini akan merupakan kawasan perdagangan

---

<sup>6</sup>Mohamed Aslam, "The Impact of ASEAN-China FTA on ASEAN Economies", *The Indonesian Quarterly*, vol. xxxi, no. 3, 2003, hal. 332-339.

<sup>7</sup>Sumber dari Direktur Kerjasama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, Jakarta, 2005.

<sup>8</sup>Ibid.

bebas terbesar di dunia dengan perkiraan total perdagangan sebesar 1,23 triliun dolar AS.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, penghapusan hambatan perdagangan antara ASEAN dan China sebagaimana yang diusulkan akan mampu menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi ekonomi FTA serta mendorong ke arah spesialisasi produk yang lebih besar berdasarkan atas keuntungan komparatif. Kegiatan perdagangan akan timbul apabila beberapa produk domestik dari salah satu anggota FTA digantikan oleh produk impor yang lebih murah dari anggota FTA lainnya. Hal ini akan menimbulkan pendapatan nyata dari kedua kawasan pada saat sumber daya mengalir ke sektor-sektor di mana mereka dapat digunakan secara lebih efisien dan produktif.

Diperkirakan ASEAN-China FTA akan meningkatkan ekspor ASEAN ke China sebesar 48 persen dan ekspor China ke ASEAN sebesar 55,1 persen. ASEAN-China FTA juga akan meningkatkan GDP ASEAN sebesar 0,9 persen (5,4 milyar dolar AS) dan GDP China sebesar 0,3 persen (42,2 milyar dolar AS) secara absolut. Inisiatif untuk mewujudkan ASEAN-China FTA dalam waktu sepuluh tahun ke depan besar kemungkinannya juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor non-ekonomi dalam tahun-tahun mendatang.

Ekonomi China telah tumbuh dengan cepat sejak tahun 90-an. GDP China tumbuh rata-rata 10,1 persen selama kurun waktu tersebut dan merupakan suatu pertumbuhan terbesar di dunia. Total perdagangan China terhadap ekonomi dunia meningkat secara spektakuler dari 1 persen pada tahun 1980 menjadi 1,7 persen pada tahun 1990 dan tahun 2000 mencapai 4,1 persen.<sup>10</sup>

Pada kurun 90-an baik China maupun ASEAN mencatat pertumbuhan yang tinggi di dalam perdagangan luar negerinya. Dari tahun 1991-2000 perdagangan luar negeri China tumbuh rata-rata 15 persen per tahun. Ekspor China yang pada tahun 1990 sebesar 62,1 milyar dolar AS telah tumbuh tiga kali lipat sehingga mencapai

---

<sup>9</sup>ASEAN Document Series 1999-2004, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2005, hal. 119.

<sup>10</sup>Ibid.

249,2 milyar dolar pada tahun 2000, menjadikan China sebagai eksportir ke-7 terbesar dunia. Sementara perdagangan luar negeri ASEAN tumbuh sebesar 0,9 persen per tahun dalam kurun waktu 1999-2000.<sup>11</sup>

Perdagangan luar negeri merupakan faktor pendorong utama dari perkembangan ekonomi China dan negara-negara ASEAN. Namun demikian ASEAN lebih tergantung kepada sektor ekspor China. Dengan kenyataan tersebut jelas bahwa China berada di pihak yang lebih diuntungkan dengan adanya ASEAN-China FTA karena eksportnya lebih besar dibandingkan dengan ekspor ASEAN ke China. Lagi pula dari sudut pandang perdagangan internasional, terdapat persaingan yang ketat di antara China dan ASEAN terutama dalam dua aspek yaitu: 1) aspek penetrasi pasar internasional dan 2) aspek persaingan dalam produk.<sup>12</sup>

Perkembangan perdagangan ASEAN-China pada tahun 2003 mencapai 55.222 juta dolar AS (urutan ke-5 dari perdagangan ASEAN). Sedangkan mitra dagang utama ASEAN adalah AS, Jepang dan Singapura sementara mitra dagang utama China adalah AS dan Jepang. Sehingga antara ASEAN dan China saling bersaing untuk melakukan ekspor ke tujuan yang sama.

**Tabel 1**  
**Kompetisi negara-negara Asia dengan China terhadap pasar AS**  
**(dalam persen)**

	1990	1995	2000
Jepang	3,0	8,3	16,3
Korsel	24,0	27,1	37,5
Taiwan	26,7	38,7	48,5
Hongkong	42,5	50,5	55,9
Singapura	14,8	19,2	35,8
Indonesia	85,3	85,5	82,8
Malaysia	37,1	38,9	48,7
Philippina	46,3	47,8	46,1
Thailand	42,2	56,3	65,4

Sumber: Journal of Japanese Trade & Industry, Sept/Okt ,2002.

<sup>11</sup>“ China-Peaceful Rise in Light and Shadow” , *East Asian Strategic Review*, 2005, hal.104-106.

<sup>12</sup>Ibid.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa tingkat persaingan ASEAN dan negara-negara Asia Timur lainnya ke pasar AS terus meningkat sejak 1990-an. Nampaknya mereka harus berusaha lebih keras untuk bersaing dengan China di pasar internasional. Faktor harga merupakan pertimbangan utama yang menentukan daya saing ekspor. Dalam prakteknya, hanya produk dengan ongkos produksi rendah yang akan menang dalam persaingan. Berikutnya, tabel di bawah (Tabel 2) memperlihatkan besarnya investasi asing yang masuk ke China dibandingkan ke negara-negara ASEAN.

**Tabel 2**  
**Negara-negara Asia dan China : Foreign Direct Investment (FDI)**  
**Inflows, 1995-2000 (dalam milyar dolar AS)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Brunei	13	-69	2	-20	-38	-19
Cambodia	151	294	204	121	135	153
Indonesia	4.346	6.194	4.677	-356	-2.745	-4.550
Laos	95	160	91	46	79	72
Malaysia	5.816	7.296	6.513	2.700	3.532	5.542
Myanmar	277	310	387	314	253	240
Philippines	1.459	1.520	1.249	1.752	737	1.489
Singapore	8.788	10.372	12.967	6.316	7.197	6.390
Thailand	2.004	2.271	3.627	5.143	3.562	2.448
Vietnam	2.336	2.519	2.824	2.254	1.991	2.081
SEA Total	25.285	30.867	32.541	18.270	14.703	13.846
SEA as % of Developing Asia	34,3	34,5	33,0	21,2	15,3	10,1
China	35.849	40.180	44.237	43.751	40.319	40.772
China as % of Developing Asia	48,7	44,9	44,9	50,9	41,9	29,7

Sumber: Journal of Asian Economics, 2002

### **ASEAN-JEPANG FTA**

Kerjasama konkrit di antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3 pertama kali adalah di bidang finansial. Berdasarkan usulan dari Perdana Menteri China Hu Jintao dalam pertemuan para Deputi Keuangan dan Bank Sentral ASEAN+3 di Hanoi bulan Maret 1999 disepakati untuk memperkuat mekanisme pemantauan terhadap

pelarian modal jangka pendek yang telah memicu krisis finansial pada tahun 1997. Pada bulan berikutnya dalam pertemuan Menteri Keuangan ASEAN+3 di Manila, dukungan penuh diberikan terhadap usulan Jepang untuk meng “internasionalisasi” mata uang yen serta memasukkan Vietnam ke dalam daftar negara yang berhak menerima bantuan dalam kerangka *New Miyazawa Initiative*.

*Miyazawa Plan* adalah catatan penting dalam perjalanan kebijakan ekonomi internasional Jepang, karena ditujukan untuk menolong negara-negara di Asia untuk keluar dari krisis ekonomi. Kebijakan ini dinilai cukup berhasil dalam membantu beberapa negara Asia, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Sejak pertama kali diluncurkan, *Miyazawa Plan* mendapat sambutan yang positif dari beberapa negara Asia. Melalui kebijakan ini, Jepang siap mengucurkan dana sebesar 30 milyar dolar AS yang akan didistribusikan ke beberapa negara Asia tanpa menetapkan syarat-syarat tertentu seperti yang diberlakukan oleh IMF. Respon positif dari negara-negara Asia membuat Jepang menambah 5,5 milyar dolar AS ke dalam paket *Miyazawa Plan* pada Desember 1998.<sup>13</sup>

Dana yang disediakan Jepang rupanya tidak memadai lagi setelah pertengahan 1999. Maka Jepang pun meluncurkan dana tahap ke-dua senilai 18,2 milyar dolar AS. Namun di tahap ke-dua ini, dana yang disediakan tersebut dikonversikan dalam bentuk program *bond guarantee*. Melalui program ini, Jepang akan menjamin obligasi yang diterbitkan oleh beberapa negara Asia agar mereka dapat memperoleh dana cair dari negara maju selain Jepang. Perkembangan selanjutnya, beberapa negara Asia meminta kesediaan Jepang untuk melanjutkan *Miyazawa Plan*. Permintaan tersebut disampaikan pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN 1999.

Komitmen Jepang dalam *Miyazawa Plan* ternyata sangat serius. Di saat Jepang sendiri tengah menghadapi kemelut ekonomi yang cukup pelik, Jepang masih ingin menunjukkan kepemimpinannya dalam roda perekonomian Asia. Dalam *Japan*

---

<sup>13</sup>Phillip Y. Lipsey, "Japan's Asian Monetary Fund Proposal", *Stanford Journal of East Asian Affairs*, vol. 3, no. 1, Spring 2003, hal. 8-15.

*Economic Report* bulan Februari 2000, disebutkan beberapa alasan yang melatarbelakangi kebijakan *Miyazawa Plan* tersebut. *Pertama*, Jepang merasa memiliki tanggung jawab regional untuk menyelamatkan ekonomi Asia. *Ke dua*, adanya ikatan dan hubungan ekonomi yang sangat kuat antara Jepang dan negara-negara Asia yang lain. *Ke tiga*, Jepang ingin menyelamatkan kepentingan ekonominya di Asia dan ingin menyelamatkan dana kredit sebesar 123,8 milyar dolar AS yang tertanam di Asia. Selain itu Jepang juga ingin menyelamatkan pasar Asia, karena Asia merupakan pasar terbesar bagi Jepang. Kondisi ini tercermin ketika tahun 1998, di saat krisis ekonomi masih parah, negara Asia tetap menyerap 34,7 persen dari keseluruhan ekspor Jepang. *Ke empat*, keinginan Jepang untuk memperoleh peran yang lebih penting dalam memimpin ekonomi Asia, sekaligus menggeser AS dan kemudian China. *Ke lima*, keinginan Jepang untuk menginternasionalisasikan yen.<sup>14</sup> Beberapa pengamat mengatakan bahwa kepentingan internasionalisasi yen tidak sepenuhnya berhasil meskipun kekuasaan ekonomi Jepang di Asia tidak terbantahkan lagi.

Pada Maret 2000, dalam pertemuan para Deputi Keuangan dan Bank Sentral ASEAN+3 di Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk suatu kerangka kerjasama keuangan regional guna mencegah terulang kembalinya krisis moneter. Selanjutnya pada pertemuan para Menteri Keuangan di Chiang Mai tahun 2000 dicapai kesepakatan terhadap perluasan *ASEAN Swap Arrangement* dari semula lima negara menjadi sepuluh negara anggota ASEAN, serta peningkatan fasilitas pembelian kembali dari 200 juta dolar AS menjadi 500 juta dolar AS. Mereka juga sepakat untuk menandatangani persetujuan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) di antara negara-negara anggota ASEAN, China, Jepang dan Korea Selatan. Pada akhir 2003, Jepang telah menandatangani BSA dengan China, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia dan

---

<sup>14</sup>Lim Hua Sing, *Peranan Jepang di Asia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 62.



Singapura yang mencakup fasilitas keuangan senilai 36,5 milyar dolar AS secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Diantara persetujuan-persetujuan tersebut, BSA yang ditandatangani oleh *Bank of Japan* dan *People's Bank of China* pada bulan Maret 2002 memiliki nilai politis bagi perkembangan kerjasama regional di kawasan Asia Timur. Di dalam BSA dengan negara-negara Asia Timur lainnya, Jepang berkewajiban untuk memberikan bantuan secara unilateral dengan menukarkan sejumlah cadangan dolar yang dimilikinya dengan mata uang negara yang memerlukan bantuan guna memperkuat nilai tukar mata uang lokalnya.<sup>16</sup> Sedangkan di dalam BSA antara Jepang dan China, kedua negara bersepakat untuk saling membantu secara resiprokal dengan cara menukar sejumlah dana dalam mata uang masing-masing (yen atau renminbi) senilai maksimum 3 milyar dolar AS dengan mata uang negara yang membutuhkan bantuan guna memperkuat nilai tukar uangnya tanpa melibatkan mata uang dolar. Sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar pertama (Jepang) dan ke-dua (China) di dunia, kerjasama *Swap Arrangement* tersebut akan menjamin stabilitas moneter di kawasan Asia Timur sekaligus mendorong ke arah penggunaan yen maupun renminbi sebagai mata uang bersama dengan melepaskan ketergantungan kawasan terhadap mata uang dolar. Persetujuan serupa juga telah ditandatangani antara China dan Korea Selatan pada Juni 2002 meliputi bantuan finansial maksimum senilai 2 milyar dolar AS. Dengan demikian kerjasama finansial diantara Jepang, China dan Korea Selatan telah berhasil ditingkatkan.

Pada Desember 1999, Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong mengusulkan perjanjian FTA kepada Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi. Dalam pertemuan kedua pimpinan negara pada Oktober 2000 disepakati untuk mulai diadakannya negosiasi tentang hal itu pada bulan Januari 2001 dan bulan Juni 2002. Kedua negara

---

<sup>15</sup>Lihat "Japan's Leading Role in East Asian Regionalism-Toward Building an East Asian Community", *East Asian Strategic Review*, 2005, hal. 39-41.

<sup>16</sup>Ibid.

menandatangani tidak hanya FTA tetapi juga *A Comprehensive New Age Economic Partnership Agreement* yang mencakup kerjasama yang lebih luas seperti investasi dan perlindungan atas hak cipta (*intellectual property rights*). Dalam konferensi pers sesuai penandatanganan kerjasama, Perdana Menteri Junichiro Koizumi menyatakan bahwa Jepang berniat untuk melanjutkan negosiasinya dengan negara-negara Asia lainnya di bidang perdagangan, antara lain dengan mendorong terciptanya bilateral FTA dengan Filipina, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan.<sup>17</sup>

Kerjasama perdagangan antara ASEAN dan Jepang pada tahun 2003 mencapai 108.311,9 juta dolar AS (urutan ke-3 dari perdagangan ASEAN). Upaya negara-negara ASEAN untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral di antara masing-masing anggota dan dengan negara-negara di luar ASEAN semakin berkembang.

Pada Nopember 2004, Jepang dan Filipina menandatangani *Economic Partnership Agreement (EPA)* tentang pembentukan suatu FTA di antara kedua negara. Suatu *Joint Study Group* yang meliputi kalangan pemerintah, bisnis dan akademisi telah dibentuk pula antara Jepang dan Korea Selatan untuk membahas tentang kemungkinan pembentukan suatu FTA di antara kedua negara. Setelah melalui delapan kali pertemuan (2002-2003), kedua negara mulai mengadakan negosiasi untuk pembentukan Jepang-Korea Selatan FTA pada Desember 2003 dan direncanakan untuk ditandatangani pada akhir tahun 2005.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>The Japan Economic Review, January 2000.

<sup>18</sup>“Japan’s Leading Role in East Asian Regionalism-Toward Building an East Asian Community”, *East Asian Strategic Review*, 2005, hal. 53-55.

**Jepang dan Perjanjian Kerjasama Ekonomi  
(per Desember 2004)**

	2001	2002	2003	2004	2005
Singapore Summit agreement Signed in October	Jan. Negotiation	Signed in Jan. Took effect in Nov.			
ASEAN  The Philippines  Malaysia  Thailand			Framework signed in October  Summit agreement in December	February  February Negotiation  January Negotiation  February Negotiation	April Negotiation
South Korea			Summit agreements in October and December	December Negotiation	Virtual agreement in 2006
ASEAN+3		Discussed at ASEAN+3	Economic	Minister's	Meeting

*Sumber:* Data dari Japanese Ministry of Economy, Trade & Industry, Keizei Renkei (*Economic Partnership*), Desember, 2004.

**ASEAN-KOREA SELATAN FTA**

Selama kurun waktu empat dekade yang lalu, hubungan baik di antara ASEAN dan Korea Selatan telah tumbuh secara konsisten. Di antara bidang-bidang yang menyangkut kepentingan bersama, kerjasama di bidang perekonomian menempati urutan pertama dalam

realisasinya. Keberhasilan tersebut terutama dicapai dengan adanya struktur industri yang saling melengkapi dan usaha keras dari masing-masing negara ASEAN dan Korea Selatan untuk memperkuat dan memperdalam kerjasama melalui berbagai forum seperti halnya ASEAN-Korea Selatan Dialog, ASEAN+3, APEC dan ASEM maupun pertemuan-pertemuan bilateral. Dengan mulai meredanya dampak dari krisis moneter yang menimpa Asia dan diawalinya abad ke-21, tibalah saat yang menguntungkan untuk mempertimbangkan prospek dan cara untuk meningkatkan kerjasama di antara ASEAN dan Korea Selatan.

### **1. Kepentingan Strategis ASEAN terhadap Korea Selatan di Bidang Ekonomi.**

Korea Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat sejak tahun 60-an. Namun demikian negara ini tidak luput pula dari dampak krisis finansial yang menimpa kawasan Asia, sehingga memerlukan perubahan ekonomi secara struktural guna mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Salah satu prakondisi untuk memasuki jalur perubahan tersebut adalah dengan membentuk ikatan kerjasama dengan mitra baru di bidang ekonomi.

Pada awalnya Korea Selatan memfokuskan kerjasama ekonominya dengan AS, UE dan Jepang, namun keuntungan ekonomis dari kerjasama tersebut semakin berkurang, sementara keuntungan ekonomis dari kerjasamanya dengan negara-negara ASEAN semakin meningkat. Ada empat alasan yang mendasari hal itu yakni: 1) pasar dari negara-negara maju relatif stagnan, sedangkan pasar di lingkungan ASEAN semakin tumbuh dengan cepat. Dimasa mendatang pertumbuhan ekonomi ASEAN akan terus berlanjut; 2) kompetisi persaingan di lingkungan negara-negara maju lebih besar dibandingkan dengan ASEAN. Para eksportir dari segenap penjuru dunia sebagaimana para produsen lokal saling bersaing memperebutkan pangsa pasar di negara-negara maju. Meskipun para eksportir internasional juga memperebutkan pasar ASEAN namun persaingannya tidak terlalu ketat; 3) ASEAN menawarkan kesempatan yang menarik bagi investasi langsung

(*overseas direct investment*) Korea Selatan dengan tersedianya tenaga kerja yang cukup terdidik, infrastruktur yang memadai dan insentif yang menarik untuk investasi langsung dari luar negeri; dan 4) ASEAN tengah berupaya ke arah terbentuknya AFTA dan *ASEAN Investment Area* (AIA) yang keduanya akan meningkatkan peluang ekonomi.<sup>19</sup>

Potensi peningkatan hubungan ASEAN-Korea Selatan tersebut akan dibangun diatas fondasi perdagangan yang kuat di antara keduanya. ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Korea Selatan setelah AS, UE dan Jepang yang meliputi 10,8 persen dari total perdagangan Korea Selatan tahun 1998. Dengan berhasil keluarnya ASEAN dari krisis ekonomi, presentasi perdagangannya dengan Korea Selatan akan semakin meningkat pula.

Pada tahun 1998, ekspor Korea Selatan ke ASEAN sebesar 15,3 milyar dolar AS sementara impornya mencapai 9,1 milyar dolar AS sehingga mengalami surplus 6,2 milyar dolar AS. Tabel berikut ini menyajikan nilai perdagangan Korea Selatan baik dengan ASEAN secara keseluruhan maupun dengan masing-masing sepuluh negara anggota ASEAN.

---

<sup>19</sup>Jaebong Ro, " Economic Cooperation Between ASEAN and Korea", *The Indonesian Quarterly*, vol. xxviii, no. 2, 2000, hal. 207-209.

**Tabel 3**  
**Perdagangan Korea Selatan-ASEAN**  
**(dalam 100 milyar dolar AS)**

Negara	Tahun	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ASEAN	Ekspor	124,3	179,89	203,1	203,1	153,3	159,4
	Impor	78,4	101,3	120,7	125,5	91,4	109,2
	Neraca Perdag.	45,9	78,4	82,4	77,7	61,9	50,2
Thailand	Ekspor	18,4	24,3	26,6	22,4	14,5	15,8
	Impor	6,2	9,4	12,2	12,8	8,1	9,6
	Neraca Perdag.	1,2	14,9	14,4	9,6	6,4	6,2
Singapura	Ekspor	41,5	66,9	64,4	58,0	40,6	42,9
	Impor	16,6	21,7	25,3	24,2	17,1	20,3
	Neraca Perdag.	24,9	45,2	39,1	33,8	23,5	22,6
Indonesia	Ekspor	25,4	29,6	32,0	35,4	17,8	23,2
	Impor	28,4	33,3	40,1	41,1	30,6	36,2
	Neraca Perdag.	-3,0	-3,7	-8,1	-5,7	-12,8	-12,9
Malaysia	Ekspor	16,5	29,5	43,3	43,6	36,0	33,0
	Impor	18,8	25,2	30,1	32,8	22,1	27,7
	Neraca Perdag.	-2,3	4,3	13,2	10,8	13,9	5,3
Filipina	Ekspor	12,1	14,9	19,1	26,0	28,3	28,6
	Impor	4,1	6,1	5,8	7,1	8,1	10,3
	Neraca Perdag.	8,0	8,8	13,3	18,9	20,2	18,3
Vietnam	Ekspor	10,3	13,5	16,0	16,0	13,6	13,1
	Impor	1,1	1,9	2,3	2,4	1,8	2,4
	Neraca Perdag.	9,2	11,6	13,7	13,6	11,8	10,7
Brunei	Ekspor	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,12
	Impor	3,1	3,8	4,7	4,9	3,4	2,4
	Neraca Perdag.	-3,0	-3,6	-4,4	-4,6	-3,2	-2,3
Myanmar	Ekspor	-	0,9	1,3	1,4	1,5	1,7
	Impor	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
	Neraca Perdag.	-	0,8	1,1	1,2	1,4	1,6
Laos	Ekspor	-	-	0,08	0,07	0,05	0,1
	Impor	-	-	0,02	0,02	0,004	0,015
	Neraca Perdag.	-	-	0,06	0,05	0,04	0,085
Kamboja	Ekspor	-	-	-	0,5	0,6	0,7
	Impor	-	-	-	0,02	0,01	0,05
	Neraca Perdag.	-	-	-	0,48	0,49	0,65
Persenta se dg perdag. dunia		10,3	10,8	11,6	11,7	10,8	11,4

Sumber: KOTIS, "Economic Cooperation Between ASEAN and South Korea", 2000.

Surplus perdagangan Korea Selatan dengan ASEAN tersebut timbul karena ekspor Korea Selatan sebagian besar terdiri dari produk

manufaktur sedangkan ekspor ASEAN ke Korea Selatan didominasi oleh hasil sumber daya alam dan produk pertanian. Namun demikian, khususnya dengan Indonesia dan Brunei Darussalam, Korea Selatan mengalami defisit perdagangan.

Setelah berakhirnya krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, beberapa negara ASEAN ada yang berusaha mengalihkan sebagian kegiatan perdagangannya dari Jepang ke Korea Selatan dan Taiwan, namun seberapa besar pengaruhnya terhadap volume perdagangan dengan Korea Selatan masih sulit diperkirakan.

## **2. Investasi Luar Negeri Korea Selatan di ASEAN**

Perusahaan-perusahaan Korea Selatan merupakan sumber investasi langsung utama bagi ASEAN. Pada awal tahun 90-an tingginya biaya upah buruh dan kenaikan nilai mata uang won serta surplus modal dalam negeri mendorong meningkatnya investasi luar negeri Korea Selatan. Dekade yang lalu, investasi luar negeri Korea Selatan terutama ditujukan ke China karena dipicu oleh normalisasi hubungan Korea Selatan-China serta adanya kedekatan wilayah dan rendahnya upah buruh di China.

Selama kurun waktu 1995-2000, investasi Korea Selatan di negara-negara ASEAN mencapai 3,1 milyar dolar AS. Sasaran utama investasi perusahaan Korea Selatan adalah Vietnam yang mencakup lebih dari sepertiga nilai investasi ke ASEAN, disusul oleh Singapura dan Indonesia. Korea Selatan juga merupakan investor terbesar bagi Laos. Kerjasama pembangunan diantara Korea Selatan dan ASEAN terus berkembang dari tahun ke tahun meliputi pula bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia. Pada *Summit Meeting* 1997, para pimpinan kedua pihak sepakat untuk memperluas agenda kerjasama dalam bidang kebudayaan dan lingkungan hidup.

Program kerja tiga tahun yang disepakati para pemimpin dalam *Fifth Dialog Meeting* tentang sumber daya manusia ASEAN-Korea Selatan pada tahun 2001, menentukan prioritas kerjasama meliputi bidang lingkungan hidup, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata serta memperkuat Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pihak Korea Selatan menegaskan niatnya untuk memberikan

bantuannya di bidang teknologi informasi, *human resource development* (HRD), pertukaran budaya, bantuan kesehatan dan Pembangunan Lembah Mekong (*Mekong Basin Development*).<sup>20</sup>

Pada pertemuan dialog ASEAN-Korea Selatan ke-6 bulan Mei 2002, kedua pihak menegaskan niatnya untuk bekerjasama pada beberapa bidang yang lebih luas termasuk HRD, pembangunan infrastruktur jalan raya dan manajemen hutan. Korea Selatan juga menyatakan kesanggupannya untuk membangun kemampuan Sekretariat ASEAN di Jakarta di bidang teknologi informasi. Prioritas utama ditujukan untuk proyek-proyek di bidang ekonomi, finansial dan perdagangan serta integrasi regional guna mempersempit kesenjangan negara ASEAN yang lama dan baru dengan menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan dan mempersempit kesenjangan digital. Dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Asia Tenggara, program pertukaran terus dilanjutkan dengan penekanan dalam bentuk beasiswa di bidang kebudayaan khususnya dalam industri penyiaran film dan musik.

Dalam perkembangannya, telah dilakukan studi bersama oleh *ASEAN-Korea Expert Group* (AKEG). Berdasarkan laporan hasil studi, disusun ringkasan hasil studi (lihat lampiran) yang disampaikan pada *AEM-Korea Consultations* tanggal 4 September 2004.

Kerjasama pembangunan diperoleh dari dua sumber yaitu *ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF)* dan *ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Program Fund (FOCP)* yang didukung oleh pemerintah Korea Selatan sebesar 2 milyar dolar AS per tahun.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 210-211.

<sup>21</sup>lihat <http://www.mfaic.gov.kh/AMM/Background%20Papers/ASEAN-ROK.htm>., 20 Juni 2005.



### 3. Masa Depan Kerjasama Perdagangan ASEAN-Korea Selatan

Prospek jangka panjang perdagangan ASEAN-Korea Selatan memiliki peluang dan kendala. Pada tahun 2005 tingkat perkembangan ekonomi ASEAN diperkirakan sudah pulih kembali. Berdasarkan studi WEFA, pada periode 2000-2005 rata-rata tingkat pertumbuhan yang diperkirakan untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand sebesar 6,2 persen, 7 persen, 6,1 persen dan 5,5 persen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tersebut akan berakibat langsung terhadap peningkatan perdagangan, namun pengalihan transaksi perdagangan sebagai efek dari penerapan AFTA akan berpengaruh negatif terhadap perdagangan ASEAN dengan non-ASEAN. Pada tahun 2005, semua negara anggota ASEAN akan mengenakan tarif kurang dari 5% terhadap seluruh produk manufaktur dari negara non-ASEAN, sedangkan lebih dari 40 persen barang-barang yang diperdagangkan akan dibebaskan dari tarif (0%).<sup>22</sup>

#### Penutup

Guna meningkatkan prospek perdagangan ASEAN dan *Plus Three*, perlu dipertimbangkan tiga langkah tindakan. *Pertama*, baik ASEAN maupun Jepang, China dan Korea Selatan perlu berusaha meningkatkan arus modal, baik dalam bentuk investasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini tidak hanya sebagai kompensasi terhadap kecenderungan penurunan kegiatan perdagangan tetapi juga guna mendorong proses alih teknologi dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Peningkatan dari *ASEAN Investment Area* (AIA) akan mendorong tingkat investasi inter-regional maupun intra-regional. *Ke dua*, ASEAN dan negara-negara tersebut perlu melakukan pendekatan baru secara institusional. Cara termudah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama adalah dengan berpartisipasi dalam suatu forum, meskipun untuk mencapai konsensus terhadap tingkat partisipasi nampaknya cukup sulit.

---

<sup>22</sup>lihat <http://www.mfaic.gov.kh/AMM/Background%20Papers/ASEAN-ROK.htm>.

Usulan untuk diadakannya suatu *Preferential Trading Agreement* (PTA) merupakan salah satu pilihan yang bisa diajukan. Dalam jangka panjang PTA dengan ASEAN akan sangat efektif guna meningkatkan perdagangan di antara ASEAN+1+1+1. *Ke tiga*, negara-negara anggota ASEAN perlu melakukan penyebaran (*diversity*) terhadap sumber-sumber komoditi impor mereka. Sebagai contoh, beberapa barang impor dari negara berkembang lainnya kemungkinan bisa dialihkan seperti ke ASEAN-Korea Selatan, misalnya impor sejumlah besar produk baja Thailand dari Jepang dapat dialihkan ke Korea Selatan yang mutu produknya cukup kompetitif di tingkat dunia. Dan sebaliknya, Korea Selatan perlu berusaha untuk memperbesar impor mereka dari negara anggota ASEAN.

Di samping itu, sebelum *East Asia Free Trade Area* (EAFTA) diberlakukan, maka perlu:

- Pemantapan integrasi ekonomi ASEAN diutamakan, seperti proyek-proyek pembangunan (infrastruktur, informasi teknologi dsb) untuk menunjang tercapainya ASEAN+3 menuju EAFTA.
- Penyelesaian ASEAN-Mitra Dialog FTA didahulukan.
- Khusus untuk Indonesia, perencanaan dan koordinasi harus kuat di tingkat pusat; desentralisasi penting tapi koordinasi sebagai suatu tantangan; pengadaan infrastruktur yang tepat dan terpercaya akan menimbulkan kepercayaan asing.

## Bab V

# IDE PERLUASAN KOMUNITAS ASIA TIMUR: DINAMIKA INTERNAL ASEAN

*Awani Irewati*

### Pengantar

Selama 38 tahun ASEAN mengalami perjalanan cukup panjang dalam memperjuangkan dan mempertahankan eksistensinya. Dari anggotanya yang semula hanya lima negara, kini ASEAN telah memiliki sepuluh negara anggota. Jumlah ini sesuai dengan keinginan dari pendiri (*founding fathers*) ASEAN saat itu yang mengangankan *One Southeast Asia* dalam ASEAN.<sup>1</sup> Meski perjalanan mencapai sepuluh negara ASEAN ini dicapai dengan tidak mudah, ASEAN dengan segala konsekuensinya menghadapi berbagai pandangan, baik yang pro maupun yang kontra, atas masuknya lima anggota baru (Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar). Masuknya Myanmar dalam ASEAN, misalnya, tak pelak banyak pandangan kritis atas terjadinya beberapa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta minimnya kehidupan demokrasi di Myanmar sendiri. Lalu masalah lain seperti sistem komunis yang masih berlaku di Vietnam dan Kamboja juga dipandang akan mempersulit konsolidasi ASEAN.

ASEAN sendiri bukannya tidak melakukan pendekatan apapun baik ke Myanmar maupun ke Vietnam dan Kamboja. ASEAN sendiri sebenarnya terkungkung oleh prinsip yang berlaku yakni prinsip non intervensi dalam setiap urusan domestik dari satu negara anggota. Namun di luar semua masalah itu, ASEAN

---

<sup>1</sup>Jusuf Wanandi, "ASEAN's Past and The Challenges Ahead Aspects of Politics and Security", dalam Simon S.C.Toy (ed), *Reinventing ASEAN*, Singapura: ISEAS, 2001, hal. 25-41.

tampaknya tetap tegar untuk terus berkiprah dalam menghadapi persaingan global dengan kekuatan-kekuatan regional di belahan dunia lain. Sementara kekuatan globalisasi semakin berat untuk dibendung, di Asia Tenggara sendiri muncul satu keinginan dan kekuatan baru untuk mewujudkan komunitas baru bernama Komunitas Asia Timur (*East Asia Community-EAC*). Ide ini muncul dari keinginan Malaysia, yang jika ditelusuri ke belakang sebenarnya tak jauh beda dengan ide awalnya tentang *East Asia Economic Group (EAEG)*. Pertanyaannya kemudian mengapa EAEG ini tidak sempat terealisasi? Apa yang menjadi halangan baginya? Lalu mengapa kemudian muncul ide baru Komunitas Asia Timur? Apakah ini merupakan kecenderungan baru adanya keinginan membangun komunitas berdasarkan kesamaan ras dan budaya dalam lingkup Asia Timur yang lebih luas? Bagaimana posisi ASEAN dalam komunitas ini, apakah akan lebur ke dalam komunitas itu ataukah akan menjadi subsistem. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penulisan ini dibagi dalam empat bagian. Yang pertama menjelaskan sejarah singkat dari munculnya ide Komunitas Asia Timur. Yang ke dua menjelaskan ide EAC sebagai kelanjutan dari ide EAEG, yang telah berubah menjadi *ASEAN Plus Three (APT)*. Yang ke tiga mengetengahkan dinamika internal ASEAN dalam APT. Kemudian bagian ke empat mengakhiri penulisan dengan penutup.

### **Sejarah Singkat Konsep EAEG**

Konsep pemikiran tentang *East Asia Economic Group* awal 1990-an berangkat dari keinginan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad untuk menyatukan para ekonomi industri baru dengan dinamikanya yang cukup tinggi. Konsep EAEG yang dilontarkan mencakup Hongkong, Korea Selatan, Taiwan (*Newly Industrialising Economies-NIEs*), Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam (ASEAN), Jepang dan China. Gagasan EAEG itu sebenarnya ditujukan untuk menandingi usulan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yaitu membentuk forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation-APEC*).

Maka dilontarkanlah ide EAEG tahun 1991 untuk menandingi APEC.

Usulan itu jelas tidak didukung oleh Jepang karena dalam EAEG itu tidak menyertakan Amerika Serikat di dalamnya. Malaysia saat itu menginginkan dukungan penuh dari Jepang. Malaysia juga mencoba untuk terus meyakinkan Jepang bahwa proposal yang diusulkan itu akan dapat mengisi kesenjangan antara anggotanya (EAEG) dengan anggota lain dalam kerjasama regional yang lebih luas yakni APEC.<sup>2</sup>

Mahathir meyakini bahwa peran Jepang dalam EAEG, yang diharapkan dapat berperan sebagai lokomotif, akan mampu “menaikkan” suara Asia pada tingkat pertemuan ekonomi yang lebih tinggi, seperti APEC atau bahkan G-7 (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Italia, Perancis dan Jepang).<sup>3</sup> Menurut Mahathir, konsep EAEG ini memiliki kesamaan tujuan maupun sifat seperti APEC, yakni memelihara kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas. EAEG bukan mengarah ke blok perdagangan dan bersifat tertutup terhadap bentuk regional lainnya. Sasaran politisnya sebenarnya hanya diarahkan untuk membangun satu kekuatan ekonomi yang didengar dan disegani pada pertemuan-pertemuan di *Uruguay Round*, misalnya.

Mengapa Jepang menolaknya? Ada beberapa pertimbangan politis yang membuatnya tidak bisa memberi dukungan penuh pada usulan Mahathir itu. *Pertama*, konsep EAEG memunculkan dua sumbu kekuatan antara Jepang dan Amerika Serikat yang sama-sama menjadi anggota APEC. Sebagaimana diketahui, Amerika selain Kanada dan Meksiko menjadi anggota NAFTA (*North America Free Trade Agreement*) adalah juga menjadi anggota APEC. Sementara Jepang jika menerima EAEG justru akan “membahayakan” posisinya karena secara tak langsung dia dihadapkan secara frontal dengan Amerika Serikat. Padahal Jepang secara politik maupun ekonomi

---

<sup>2</sup>Andrew Elek, “The Challenge of Asian Pacific Economic Cooperation”, *The Pacific Review*, vol. 4, no. 4, 1991, hal. 328.

<sup>3</sup>Michael Vatikiotis, “EAEG Fails to Appeal”, *Far Eastern Economic Review*, 28 Januari 1993, hal. 11.

berorientasi ke Amerika. Inilah yang tampaknya terlewatkan dalam pemikiran Mahathir dengan usulannya.

*Ke dua*, jika Jepang menerima usulan EAEG itu dan berhadapan dengan Amerika justru akan menghancurkan sifat dari EAEG itu sendiri, yakni sistem perdagangan bebas multilateral. Dan ini cenderung menimbulkan satu persaingan tak sehat yang mengarah ke blok perdagangan. *Ke tiga*, lebih jauh pihak Amerika Serikat sendiri menolak masuknya Jepang ke EAEG itu. Alasan politisnya, bagaimanapun EAEG di mata Amerika dipandang sebagai satu blok kekuatan yang bisa dipakai untuk menentang kebijakan Amerika Serikat yang kurang menguntungkan Asia.

Keinginan eksplisit Mahathir kala itu seperti: "We in East Asia.. must at least speak with one voice.. A formal grouping intended to facilitate consultation and consensus prior to negotiating with Europe or America..."<sup>4</sup>

Jadi dari pernyataan itu jelas keinginan Mahathir adalah untuk menaikkan kekuatan tawar Asia Timur untuk berhadapan dengan Eropa dan Amerika Utara. Bahkan ketika itu Mahathir mengancam dirinya tidak akan hadir pada KTT APEC di Seattle, Amerika Serikat tahun 1993 serta mengganti nama EAEG dengan *East Asia Economic Caucus* (EAEC). Namun inipun belum juga mendapat respon positif. Baru pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok 1994, EAEC disepakati dengan nama *ASEAN Plus Three* (APT) karena hanya tiga negara di luar ASEAN saja yang hadir.

Dengan nama baru APT sesungguhnya ambisi Mahathir masih terakomodir di dalamnya. Hanya saja Malaysia pasca Mahathir tidak terlalu menampilkan sikap frontalnya kepada Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Abdullah Ahmad Badawi (2003) Malaysia mulai meluncurkan ide barunya dengan sebutan *East Asia Community*, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari bentuk APT. Pada bagian berikut dipaparkan tentang apa dan mengapa muncul ide baru ini.

---

<sup>4</sup>Linda Low, "The East Asian Economic Grouping", *The Pacific Review*, vol. 4, no. 4, 1991, hal. 375.

### **Ide EAC sebagai kelanjutan *ASEAN Plus Three* (APT)**

Mengapa muncul ide pembentukan Komunitas Asia Timur (*East Asia Community*)? Sebagaimana diketahui, Asia Timur menunjukkan dinamika ekonominya yang semakin kuat. Kehadirannya semakin diperhitungkan dan diakui dunia Barat. Perjalanan untuk merealisasikan Komunitas Asia Timur usulan Malaysia, yang mengejutkan itu, sebenarnya melampaui eksistensi dari dua bentuk kekuatan regional yang ada, yakni ASEAN sendiri maupun *ASEAN Plus Three* (APT). Jika berbicara mengenai ide pembentukan EAC, otomatis harus menyertakan kedua bentuk regional itu.

Yang terpenting dalam masalah ini mengapa Malaysia melontarkan ide EAC itu? Lalu apa sebenarnya yang hendak diperjuangkan dalam format ini, kesamaan ras dan budayakah? Pihak Malaysia keluar dengan ide tersebut tidak lain karena ia sebenarnya masih memendam ambisi terbentuknya satu kekuatan ekonomi Asia Timur sebagai kelanjutan dari ide EAEG yang lebih dari sepuluh tahun lalu kandas. Mengapa ide itu muncul di saat sekarang?

Ada beberapa pertimbangan mengapa ide EAC itu dianggap penting untuk dimunculkan setidaknya dari perspektif Malaysia. *Pertama*, dahsyatnya krisis finansial di Asia membuat ASEAN sendiri ternyata tak kuasa menjamin anggotanya untuk bertahan terhadap serangan krisis itu. Krisis itu menyadarkan ASEAN untuk mencari dan mengambil tindakan antisipatif yang salah satunya lewat perluasan kerjasama ASEAN dengan negara-negara sekitarnya. Untuk kebutuhan itu, Kelompok Visi Asia Timur (*The East Asian Vision Group*) menciptakan satu visi yang akan memberikan satu inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat Asia Timur untuk membangun satu komunitas Asia Timur yang berfokus pada tantangan masa depan regional serta membangun saling percaya dan saling pengertian yang mendalam untuk masa depan.<sup>5</sup> *Ke dua*,

---

<sup>5</sup>Lihat pada executive summary dari "Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress", *East Asia Vision Group Report 2001*.

adanya keyakinan bahwa visi dari pembentukan komunitas ini dapat menstimulasi upaya penekanan pada relativitas perbedaan yang ada di dalam komunitasnya. Malaysia melontarkan itu dengan asumsi bahwa realisasi ide EAC akan masih melalui beberapa tahapan proses jangka panjang, dengan mengingat masih adanya beberapa *gap* ekonomi di dalam anggota ASEAN sendiri. Mengapa jangka panjang? Malaysia tampaknya belajar dari masa lalu, yakni ketika konsep EAEG dilontarkan terkesan “menelantarkan” eksistensi cita-cita ASEAN. Ketika itu cita-cita para “Bapak Pendiri” (*Founding Fathers*) untuk menyatukan sepuluh negara Asia Tenggara belum terealisasi seperti ini. Artinya, ide EAC yang dimaksud diluncurkan setelah sepuluh negara ASEAN terwujud sehingga ASEAN bisa fokus pada ide EAC.

. *Ke tiga*, meski disadari masih banyak masalah internal ASEAN yang harus dituntaskan, lahirnya ide ini diyakininya memberi kerangka masa depan bagi *ASEAN Plus Three* (APT) dan penguatan ASEAN itu sendiri. Jadi kalau melihat konteks ini, EAC di masa depan tidak akan meleburkan eksistensi ASEAN. Kalau melihat pada hasil *East Asia Vision Group Report* tahun 2001, tertera apa yang ingin diperjuangkan dalam visinya dan mengapa harus Asia Timur serta cakupan bidang yang ingin diperjuangkan. Berikut kutipan dari isi visi pembentukan Komunitas Asia Timur:

1. We, the people of East Asia, aspire to create an East Asian community of peace, prosperity and progress based on the full development of all peoples in the region. Concurrent with this vision is the goal that the future East Asian community will make a positive contribution to the rest of the world.
2. For regional peace, we must cooperate to promote a stable and cooperative security environment based on mutual trust and respect. In the interest of common prosperity, we must promote trade, investments and financial cooperation. We should also be mindful of disparities in socio-economic development, educational attainment and technological advancement within the region . For human progress, we must improve governance, strengthen basic rights and advance quality of life.



3. The Vision Group envisions East Asia moving from a region of nations to a bonafide regional community with shared challenges, common aspirations, and a parallel destiny. The economic field, including trade, investment, and finance, is expected to serve as the catalyst in the comprehensive community-building process.<sup>6</sup>

Untuk sementara ini, ada beberapa tantangan bagi munculnya ide EAC tersebut. *Pertama*, apakah tiap negara telah siap menerima identitas “masyarakat” ketimbang “bangsa” dalam setiap diplomasi di bidang politik khususnya? Menilik dari isi visi tersebut di atas, secara substansial apa yang diinginkan dalam pembentukan Komunitas Asia Timur sangat ideal sekali. Namun secara menyeluruh penekanan/penonjolan pada kebutuhan masyarakat Asia Timur terlihat lebih diperjuangkan dan diperhatikan daripada semata pada kepentingan dan peran negara sebagai aktornya. Sesuai dengan namanya yakni *East Asia Community* (Masyarakat Asia Timur) dan bukan *East Asia Nations*, cakupannya sudah lebih meluas dan horizontal. Di dalamnya bisa lebih menonjolkan perjuangan keamanan manusia dan HAM. Tantangan bagi ASEAN, bagaimana agar organisasinya tidak menjadi lemah atau bahkan hilang dalam identitas masyarakat Asia Timur itu.

*Ke dua*, apakah masing-masing negara anggota ASEAN telah siap dengan segala tahap kemajuannya untuk masuk ke dalam Komunitas Asia Timur yang secara ideal tidak mempersoalkan lagi masalah keterbelakangan ekonomi dan politik? Dalam satu komunitas memang semua kekuatan ekonomi diasumsikan kurang lebih *equal*. Jawaban atas tantangan ini setidaknya bisa dilihat sesuai dengan perkembangan implementasi konsep EAC di ASEAN di masa depan. Sementara itu, pembicaraan konsep EAC itu sendiri baru akan dimulai pada pertemuan perdana di Malaysia pada bulan Desember tahun ini.

*Ke tiga*, dalam bentuk satu komunitas EAC tentu akan lebih mudah dijalankan apabila kebudayaan termasuk ras tidak terlalu

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 6.

mencolok satu sama lain. EAC terdiri dari negara-negara dengan sebagian besar menganut budaya oriental, seperti China, Korea, Jepang (*the Plus Three*); Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja (ASEAN); dan budaya Melayu (Indonesia, Malaysia, Brunei). Apakah bisa mereka dengan dua budaya yang melekat ini “disatukan” dalam satu komunitas yang menuntut keseragaman relatif? Keduanya mungkin bisa disatukan namun memerlukan waktu yang amat panjang. Belum lagi dengan besar kemungkinan kehadiran India, Australia dan Selandia Baru (dengan budaya Barat) dalam EAC, sebagaimana yang diinginkan oleh Indonesia.

Jika demikian, maka alasan pembentukan ide EAC berdasar kesamaan ras dan budaya dalam lingkup Asia Timur yang menyertakan ASEAN, APT, India, Australia dan Selandia Baru tampaknya tidak sesuai bahkan terkesan mengada-ada. Sebutan satu kerjasama ataupun komunitas dengan “pemaksaan” kesamaan ras dan budaya seperti di atas tidak bisa dipakai sebagai alasan mendasar terbentuknya EAC. Yang bisa dijadikan contoh bagi satu kelompok negara dengan budaya dan ras yang ketat sama tampaknya hanya berlaku bagi negara-negara yang terangkum dalam kesatuan seperti *Newly Industrializing Countries* (NIEs), yang terdiri dari Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan di akhir tahun 1980-an.

Pertanyaan berikutnya bagaimana dengan kemungkinan posisi ASEAN dalam *East Asia Summit* (EAS) ini tampaknya penting untuk dilihat mengingat ada semacam kecemasan dari beberapa negara anggota ASEAN tentang bisa tidaknya kehadiran ASEAN sebagai *driving force*. Ada beberapa pandangan optimistik bahwa ASEAN seharusnya bisa bermain dengan *driving force*-nya dalam pertemuan Asia Timur mendatang di Malaysia (Desember 2005).<sup>7</sup> Sebelum melihat jauh ke arah itu, melihat bagaimana dinamika internal ASEAN dalam *ASEAN Plus Three* (APT) menjadi hal yang tak bisa ditelantarkan. Karena APT itu sendiri merupakan kelanjutan dari EAEC yang kandas, dan bagi sebagian besar penentu dalam

---

<sup>7</sup>K.Kesavapany, *ASEAN And Emerging East Asia*, presentasi di CSIS, Jakarta, 6 Juli 2005.

ASEAN, APT tampaknya diarahkan ke EAC. Yang tersisa hanya mampukah ASEAN membawa peran *driving force* dalam APT. Mampu tidaknya bisa menjadi cermin bagi kiprah ASEAN di EAS mendatang.

### **Dinamika Internal ASEAN dalam APT**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terwujudnya Komunitas Asia Timur tidak bisa menafikan keberadaan ASEAN dan APT (ASEAN, Jepang, Korea Selatan, China). Apa yang kini tengah berjalan secara dinamis adalah APT. Setiap tahunnya, APT melakukan pertemuan dalam forum yang disebut *ASEAN Plus Three Summit*. Kerangka kerjasama APT menjadi bukti bagi semakin meningkatnya derajat saling ketergantungan antara ASEAN dengan *the plus three countries* (Jepang, China dan Korea Selatan). Antara ASEAN dengan *the plus three countries* ini memiliki kesatuan geografis yakni Asia Timur (*East Asia*).

Landasan pemikiran bersama yang ditorehkan ASEAN dalam perjalanan menuju APT tidak lain ialah adanya kesadaran atas implikasi krisis finansial pertengahan 1997 yang disikapi dengan ketidakmampuan mengatasi secara bersama. Dengan kata lain, ASEAN yang telah berjalan selama 38 tahun, nyatanya secara kelembagaan belum mampu memberikan perlindungan secara hakiki kepada anggotanya dalam menghadang krisis yang bermula dari Thailand. Meski sudah berkiprah selama itu, ASEAN belum memiliki mekanisme kerja ke dalam dan terpadu dan akibatnya badai krisis yang menyimpannya dihadapi dan ditanggulangi oleh masing-masing anggota. Kenyataan inilah yang mendorong ASEAN untuk mengembangkan peluang lain yang ada disekitarnya sehingga keterpurukan ASEAN tidak terlalu lama.

Dalam format APT, ASEAN berharap mendapat peluang untuk lebih berkembang ke arah yang prospektif. Meski awalnya ada semacam pertanyaan mampukah ASEAN mempertahankan prinsip persamaan (*equal distance*) dan non-diskriminasi terhadap anggotanya yang masih beragam, sementara ia sendiri dituntut menjalin kerjasama eksternal dengan negara-negara Asia Timur.

Mampukah ia menerapkan pula prinsip itu kepada *the plus three countries*? Secara internal organisasi, ASEAN relatif mampu menjalankan kedua prinsip itu kepada seluruh anggotanya. Dalam konteks politik, prinsip non intervensi yang dianutnya sebenarnya secara tak langsung memberi jaminan kepada semua anggota untuk bertindak sama, yakni tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri masing-masing. Namun seiring dengan perkembangan dunia serta gencarnya sorotan Amerika atas pentingnya penegakan HAM dan demokrasi, ASEAN dengan prinsipnya itu menghadapi semacam ujian tarik ulur. Di satu sisi, ASEAN secara tegas belum keluar dengan kesepakatan bersama menanggalkan prinsip non intervensi yang selama ini diterapkan. Tetapi di lain sisi, dorongan individu untuk menanggalkan prinsip itu semakin menguat, terutama dengan adanya kasus pelanggaran HAM di Myanmar. Apa yang terjadi di dalam negeri Myanmar bisa menjadi ganjalan dalam ASEAN. Namun ASEAN mengatasinya dengan caranya sendiri, yakni lewat pendekatan bilateral dan informal dari beberapa negara ASEAN pada Myanmar.

Dalam konteks ekonomi, ASEAN cukup memberi toleransi pada negara anggotanya yang baru bergabung lewat tenggang waktu yang diberikan dalam kesepakatan AFTA. Namun diakui pula secara per negara ada negara yang lebih maju “berjalan” lebih cepat dalam menjalin kerjasama dalam bentuk *bilateral free trade area* dengan negara di luar ASEAN. Sebagai contohnya, Singapura terbilang negara anggota termaju dan tidak bisa “memperlambat” laju perkembangan ekonominya mengingat ia adalah negara kota yang sangat bergantung pada sektor perdagangan. Laju Singapura yang demikian ini tentu tidak bisa dihadang oleh ASEAN karena kemajuan Singapura itu diyakini mampu menjadi daya penarik bagi anggota lainnya. Selama Singapura menaruh perhatian dan kepentingannya lebih pada ASEAN, selama itu pula ASEAN melihat keunggulan Singapura sebagai daya pendorong baginya.

Mengenai mampu tidaknya ASEAN menerapkan konsistensi kedua prinsip di atas pada *the plus three countries* bergantung pada sejauh mana hubungan baik yang dibangun ASEAN dengan ketiga

negara mitranya ini. Jika kita lihat selama ini ASEAN telah memiliki kurang lebih sepuluh negara mitra wicara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, China, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India, maka pembentukan APT yang menyertakan China, Jepang dan Korea Selatan “berkolaborasi” dengan ASEAN, seharusnya tidak melewati masa penyesuaian yang berat di kedua belah pihak. Terbentuknya *ASEAN plus one*, yakni ASEAN-China FTA dan ASEAN-Japan FTA menjadi contoh pemberian toleransi ASEAN atas prinsip *equal* dengan mitranya.

Perkembangan hubungan kerjasama ASEAN dengan negara-negara Asia Timur awalnya juga sempat menimbulkan kekhawatiran atas munculnya penolakan Amerika Serikat, seperti penolakannya terhadap ide kerjasama EAEG. Ada dua pertimbangan mendasar mengapa Amerika tidak melakukan penolakan keras pada terbentuknya APT. *Pertama*, dalam APT ada sekutu Amerika yakni Jepang, yang jelas sangat berorientasi pada Amerika Serikat. Pertanyaannya, bukankah dalam ide EAEG di masa lalu juga menyertakan Jepang didalamnya? Lalu apa bedanya dengan APT? Pengertian istilah EAEG dengan APT jelas berbeda. EAEG merupakan Kelompok Ekonomi Asia Timur, dan sebagai kelompok tentu dibangun satu mekanisme kerjasama yang secara politis ditujukan untuk menaikkan posisi tawar Asia di mata Masyarakat Eropa maupun Amerika Utara (yang dikenal dengan NAFTA nya). Posisi Jepang menjadi kekuatan penarik di dalamnya. Dan ini tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat karena EAEG begitu jelas dianggap “menantang” blok ekonomi Amerika. Sementara APT adalah kerjasama ASEAN dengan tiga Negara Asia Timur di mana Jepang turut di dalamnya. Pemilihan nama APT menunjukkan bahwa tiga negara Asia Timur itu hanya berstatus sebagai tamu bagi ASEAN. ASEAN di sini sebagai tuan rumahnya. Karena pengertian demikian, posisi Jepang itu, di bawah kondisi saat ini, tidak lagi dilihat sebagai “penantang” secara frontal bagi Amerika. Amerika justru melihat posisi Jepang itu dapat dipakai untuk “mengimbangi” kehadiran China, yang kini semakin menggeliat dalam bidang ekonomi dan militer. Lagi pula dalam format APT merupakan satu

bentuk kelompok yang tidak tertutup (*outward looking*) dan akuntabel, sehingga segala aktivitasnya dapat diketahui perkembangannya oleh negara mitra wicara lainnya.

*Ke dua*, Amerika secara eksplisit mungkin merasa “bertanggungjawab” atas krisis yang menimpa ASEAN. Karena itu format APT yang dirangkul ASEAN dilihatnya sebagai alternatif positif bagi bangkitnya kembali negara-negara ASEAN dari masa kelabu. Bagaimanapun ada kepentingan tidak langsung bagi Amerika pada stabilitas politik dan ekonomi ASEAN. ASEAN yang dinamis tentu menawarkan satu keuntungan tersendiri bagi kepentingan Amerika Serikat di Asia.

#### a. ASEAN sebagai “driving force” dalam APT

Hal lain yang menjadi perhatian serius ASEAN yakni apakah dalam bentuk kerjasama APT, ASEAN akan tetap menjadi aktor utama atau tidak. Dengan kata lain, harapan ASEAN untuk tetap dapat berperan sebagai “driving force” dalam kerangka APT mencerminkan dirinya tak menginginkan larut dan lebur di dalamnya. Ini sebenarnya sekaligus merefleksikan kekhawatiran diri tidak mampu berperan seperti itu. Kekhawatiran itu bisa jadi muncul lantaran ASEAN sendiri belum kokoh benar dari terpaan krisis. Bagi Indonesia, keinginan ASEAN tetap sebagai “driving force” jelas-jelas sangat diperjuangkan. Hal itu terbukti dengan persyaratan utama yang selalu ditekankan Indonesia dalam pertemuan ASEAN dengan tiga negara Asia Timur untuk sebelumnya menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), suatu *code of conduct* dalam menegakkan rambu hubungan antar negara di kawasan. Indonesia dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan negara-negara ASEAN lainnya untuk selalu memegang teguh prinsip dasar ASEAN ini dalam pengembangan hubungan kerjasama dengan mitra wicaranya, lebih-lebih dengan *the plus three countries*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Deplu, Jakarta, 13 Mei 2005.

Peran Indonesia itu diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan dengan memperjuangkan kesatuan ASEAN yang lebih menonjol, sebagaimana terlihat dalam pernyataan berikut:

...Indonesia mempunyai peranan sebagai pengendali utama dalam ASEAN maupun ASEAN+3. Tanpa harus berbangga diri, sebenarnya sejak krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 2002, berbagai negara ASEAN mencoba menjadi pemimpin ASEAN untuk menggantikan Indonesia, yang dalam sebutan para ahli hubungan internasional disebut dengan “auto pilot” namun tidak dapat berjalan. Ternyata pada tahun 2003-2004, saat Indonesia sebagai Ketua ASEAN, maka postur ASEAN diperhitungkan kembali pada saat Indonesia melahirkan konsep “ASEAN Community” dengan berpijak pada tiga pilar yaitu “ASEAN Security Community”; “ASEAN Economic Community”; dan “ASEAN Socio-Cultural Community”. Sejak saat ini, dengan pengembangan konsep ASEAN yang lebih demokratis, dan menjunjung HAM, dan *good governance*, ASEAN mulai lagi diperhitungkan oleh negara-negara mitra wicara yang hampir selama enam tahun sejak 1997 skeptis terhadap ASEAN. Melalui pendekatan yang sama, Indonesia akan mengembangkan konsep “East Asia Community” berpijak pada konsep “ASEAN Community”. Dalam kaitan ini, tidak akan tercipta suatu “East Asia Community” tanpa didahului oleh penciptaan “ASEAN Community.”<sup>9</sup>

Bagaimana dengan negara anggota lainnya dalam menyikapi masalah ASEAN sebagai “driving force”? Malaysia yang antusias dengan ide EAC justru yakin bahwa eksistensi peran ASEAN tidak akan lebur dalam format APT. Sebagai salah satu “founding fathers” ASEAN, Malaysia tentu tidak mengusulkan EAC itu tanpa adanya perhitungan matang atas kelangsungan ASEAN kelak. Justru dengan keyakinan yang tinggi peran “driving force” tetap akan ada dalam EAC terlebih dalam APT. Sementara Singapura secara ekonomi paling maju dalam ASEAN telah menjadi kekuatan inti di dalamnya. Secara rasional ia tentu akan tetap memainkan kelebihannya itu di

---

<sup>9</sup>Ibid.

dalam format kerjasama yang lebih luas seperti APT. Dinamika kekuatan intinya ini secara berkesinambungan akan memberikan kekuatan penentu dalam ASEAN di tingkat kerjasama manapun. Ini bisa memberi energi ASEAN dalam memerankan “driving force” di APT.

#### **b. ASEAN Plus One sebagai pendorong atau penghambat APT**

Yang penting untuk dipertanyakan dalam bagian ini adalah mengapa muncul bentuk kerjasama *ASEAN Plus One* (APO). Dalam perkembangannya, APT sebenarnya kurang berjalan secara optimal. Pandangan demikian bisa saja benar atau bisa saja tidak. Bentuk APO telah terjadi pada ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan FTA dan ASEAN-Korea FTA. Namun di luar itu ada pula bentuk-bentuk kerjasama seperti Thailand-China bilateral FTA; Thailand-India bilateral FTA, *Singapore-Japan Economic Partnership Agreement* dan sebagainya. Lalu apa arti ini semua?

*Pertama*, bentukan APO sebenarnya merupakan formasi pendukung bagi terciptanya kerjasama Asia Timur.<sup>10</sup> Keberadaannya sebenarnya tidak berlawanan ataupun memperlemah kedudukan APT. Artinya, format kerjasama APO merupakan satu proses pematangan, baik dari sisi ASEAN maupun dari sisi *Plus Three*, menuju APT. Secara logika, bagaimana *Plus Three* bisa membangun satu kerjasama dengan ASEAN secara serentak jika ini tidak diawali dengan pematangan masing-masing *Plus Three* dengan ASEAN. Sejauh ini, bentukan *ASEAN plus China* telah sampai pada tahap implementasi, sedang *ASEAN plus Japan* sampai pada proses negosiasi dan *ASEAN plus Korea* pada tahap negosiasi. Jadi APO bisa menjadi pendukung APT selama ketiga bentuk APO berjalan dalam koridor APT. *Ke dua*, untuk menjamin APO tidak menyimpang jauh, TAC sebagai *code of conduct* yang telah disepakati *Plus Three* dalam APT harus benar-benar dipatuhi. Siapa yang menjadi ketua KTT APT itulah yang harus memegang kendali,

---

<sup>10</sup>Lebih jauh bisa lihat pada CPF Luhulima, “Time to Institutionalize East Asia Cooperation”, *The Jakarta Post*, 18 Februari 2005.



karena ia sebagai badan pembuat keputusan tertinggi (*the highest decision-making body*).

*Ke tiga*, kalau dilihat dari tenggang waktu lahirnya APT pada 1997 hingga kini berarti APT sebenarnya sudah cukup lama berproses. Kalau dalam perkembangannya kemudian APO yang lebih menonjol, APT bisa dikatakan tidak optimal. Jika dilihat dalam konteks ini, kecenderungan kuat adanya APO, seperti pesatnya ASEAN-China FTA menunjukkan APO lebih menonjol dari APT. Yang harus diantisipasi ialah penggiringan APO untuk menjadi batu loncatan bagi penguatan APT. Jika tidak dilakukan, bukan mustahil APO bisa menjadi penghambat APT.

Bagaimana dengan bentuk bilateral FTA, seperti *Thailand-China bilateral FTA*, *Thailand-India bilateral FTA*, *Singapore-Japan Economic Partnership Agreement* ? Apakah ini sebagai penghambat ataukah sebagai pendorong APT? Ada beberapa argumentasi yang bisa dipaparkan tentang itu. *Pertama*, negara seperti Singapura melihat bahwa APT yang ada dirasakan berjalan sangat lambat. Singapura sebagai negara anggota yang terbilang paling maju di ASEAN, merasa perlu mengambil langkah alternative lewat *bilateral FTA*. Ia menjalin satu perjanjian kerjasama dimaksud dengan Jepang, dengan Korea dan bahkan dengan negara di luar *Plus Three* seperti Selandia Baru. *Ke dua*, langkah Singapura ini mendorong Thailand dan Filipina melakukan hal yang serupa. Thailand membuka *Thailand-India bilateral FTA* dengan target tarif 0% pada 1 Maret 2006. Lalu Thailand-Korea FTA yang masih dalam tahap *joint study* dan Thailand-China FTA.<sup>11</sup> Thailand juga membuka kerjasama FTA dengan Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Kendati bilateral FTA dengan Jepang sedikit mengalami kendala berupa masih sulitnya Jepang untuk membuka pasar pertanian serta

---

<sup>11</sup>Inkyo Cheong, *FTA Policies of ASEAN and China and Prospects for a Bilateral FTA between ASEAN and China*, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), 2002.

masih sulitnya Jepang untuk membuka kran impor beberapa produk dari Thailand.<sup>12</sup>

Begitu pula dengan Filipina juga melakukan hal serupa. Bahwa bentuk-bentuk FTA ini bisa dilihat sebagai penghambat apabila FTA itu menciptakan satu *trade diversion* bagi APT. Sebaliknya, itu bisa menjadi pendorong apabila FTA itu memberikan satu peluang penguat bagi kelanggengan APT. Yang jelas perkembangan FTA yang marak tidak bisa dihindari.

Berjalannya proses Japan-Singapore FTA membuat China merasa tersaingi lebih dulu dengan Jepang. Ini mendorongnya untuk membuat langkah yang sama. Sebaliknya, antusiasme China itu disambut dengan sikap yang sama dari pihak ASEAN lewat upaya membangun FTA dengan Jepang, India dan AS. Bahkan Menteri Industri dan Perdagangan Singapura, George Yeo, pada saat pertemuan Menteri Ekonomi Jepang-ASEAN di Brunei, September 2002 sempat menyatakan bahwa Jepang seharusnya lebih cepat mendorong ASEAN untuk mewujudkan FTA dengannya daripada dengan Cina.<sup>13</sup> Tidak begitu jelas mengapa Singapura menyatakan seperti itu. Hal ini tercermin pula pada pernyataan dari satu pejabat di Kedutaan Singapura di Jakarta yang mengatakan bahwa Singapura tidak mungkin mengajak semua “partner” untuk berdansa dengan dirinya di tengah arena dansa. Dirinya memilih satu partner bergantian untuk menjadi “partner” berdansa.<sup>14</sup> Dan Singapura sesungguhnya menghadapi satu dilema dimana apabila dirinya tidak melakukan terobosan ke luar dari kelambatan APT, dirinya akan

---

<sup>12</sup>Bisa lihat lebih lanjut pada artikel “Japan Thailand FTA”, ... While the negotiations are aimed at concluding a comprehensive economic partnership that also covers a range of projects for industrial development in Thailand, such as training programs, the core is free trade. But Japan has failed to accomplish much of its objectives on this count. <http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200508040116.html>

<sup>13</sup>*Ibid.*, Munakata Naoko, “Talking Regional, Acting Bilateral: Reality of “FTA Race” in East Asia.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Adrian Chung, First Secretary-political desk, Kedutaan Republik Singapura, Jakarta, 17 Mei 2005.

merugi. Di sisi lain, apabila dirinya melangkah terlalu jauh, maka rasa solidaritas terhadap sesama anggota ASEAN menjadi disangsikan. Kendati begitu, Singapura sangat menyadari posisi geografis dan kepentingannya yang berada di wilayah Asia Tenggara. Masa depan Singapura berada di ASEAN dan bukan di Amerika Serikat atau lainnya.<sup>15</sup> Singapura dapat bergerak lebih cepat dari yang lainnya, baik dalam tingkat bilateral maupun multilateral, dengan harapan ia dapat memberi stimulasi bagi anggota ASEAN lainnya.

Kembali ke APT, perwakilan ASEAN tampaknya sangat yakin bahwa APT di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini tetap akan menjadi kekuatan pusat (*centripetal force*) yang memiliki daya tarik ke dalam bagi semua dinamika kerjasama yang ada di sekitarnya. Keyakinan itu didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor, yakni:

1. ASEAN adalah kawasan dengan anggota-anggotanya yang sangat berlimpah dengan sumber daya alamnya. Faktor sumber daya alam (SDA) ini menjadi penarik mengapa tiga negara, Jepang, China, Korea Selatan memiliki antusiasme yang tinggi terhadap bentukan APT ini.
2. ASEAN tetap menjadi pasar yang menjanjikan bagi bisnis mereka. Apalagi jika digabung dengan *Plus Three* akan memberikan kekuatan pasar sebesar 600 juta penduduk.
3. Satu kenyataan bahwa hampir seluruh jalur perdagangan internasional *Plus Three* ini berhubungan dengan kawasan Asia Tenggara. Sehingga bergabungnya tiga negara dalam APT ini akan mempermudah pengaturan akses-akses perdagangan antar mereka.
4. Apalagi dengan adanya beberapa peristiwa tragis yang terjadi seperti krisis 1997, SARS, flu burung (*avian flu*), kasus tsunami menyadarkan ASEAN dan *Plus Three* untuk saling membantu dalam mengatasi permasalahan regional itu. Ini menunjukkan permasalahan keamanan manusia (*human security*) tidak bisa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

dihadapi atau diatasi secara individual. Saling ketergantungan untuk mengatasinya menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa dihindari.

Perwakilan dari Sekretariat ASEAN menyatakan:

“The following factor is interdependent as we have seen that the regional economic and also financial crisis in 1997-1998 as well as the outbreak of SARS, avian flu as well as the recent nation disasters caused by tsunami has again reinforced the reality that ASEAN and plus three countries are interdependent. More and more people on the region look at the east Asia as one region and these destiny also have tide us together”.<sup>16</sup>

Itu sebabnya mengapa *the APT countries* berupaya meningkatkan hubungan mereka dengan lebih dekat lagi lewat dialog dan konsultasi secara regular serta lebih menekankan pentingnya membangun jaringan interaksi antara pemerintah APT – Swasta – masyarakat sipil.

Guna mencapai tujuan APT tidaklah mungkin dijangkau dalam waktu singkat. Yang harus dipertahankan adalah menjaga momentum kerjasama itu lewat sejumlah interaksi guna menyamakan kepentingan bersama. Pada konteks itu, APT telah menyusun tiga tahap perdagangan bebas, yakni:<sup>17</sup>

1. Perdagangan bebas atas barang-barang dimana dalam jangka tiga tahun tarifnya akan mencapai 0 % dan dimulai tahun 2004-2006.
2. Perdagangan bebas atas barang-barang dengan tarif 0 % yang dijadwalkan Juli 2005 -2010 (*normal track*)
3. Perdagangan bebas atas barang-barang yang sensitif.

---

<sup>16</sup>Hasil diskusi dalam *One Day Seminar* “ASEAN +3 and the future of Regionalism in East Asia”, Jakarta: P2P-LIPI, 8 Juni 2005.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Eliver Radjagoekgoek, Direktur Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional-Departemen Perdagangan, Jakarta, 17 Mei 2005.

### c. Visi *ASEAN Community* sebagai “Pengikat” Keberadaan ASEAN

Pertanyaan mendasar yang muncul sehubungan dengan semakin nyatanya kerjasama di Asia Timur, baik itu dalam paket APT maupun EAS atau EAC di masa depan, adalah bagaimana dengan keberadaan cita-cita ASEAN sendiri yang dikenal dengan *ASEAN Community*?

Sebagaimana diketahui, KTT ASEAN di Bali pada Oktober 2003 menghasilkan satu visi membangun Masyarakat ASEAN yang diharap terwujud pada 2020. Visi ini didukung dengan tiga pilar kekuatan, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community*). Sebenarnya visi ASEAN ini dapat dijadikan sebagai “pengikat” dalam internal ASEAN bahwa betapapun luasnya kiprah dia dalam tingkat kerjasama regional yang lebih luas, ASEAN masih memiliki tugas jangka panjang yang harus diperjuangkan sejak sekarang. Kesadaran atas tugas ini bisa dipakai sebagai jaminan adanya keinginan bahwa ASEAN tidak ingin lebur dalam APT maupun EAC; ASEAN tetap menginginkan dirinya eksis dengan Komunitas ASEAN-nya yang diakui; ASEAN dengan cita-cita Komunitas ASEAN-nya memiliki kewenangan untuk “menentukan” arah yang akan ditempuhnya.

Untuk menuju ke sana, ASEAN setidaknya harus mampu melampaui dua tantangan yang ada, yakni konsisten dengan TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan pelembagaan ASEAN. Yang *pertama*, konsistensi dengan TAC menjadi penting karena ada kecenderungan TAC menjadi tidak penting lagi bagi negara-negara anggota. TAC yang dihasilkan pada KTT I di Bali tahun 1976 sebenarnya dimaksudkan sebagai koridor bagi negara-negara dalam dan luar Asia Tenggara dalam bekerja sama dan media menyelesaikan perselisihan yang ada. Tetapi selama ini ASEAN sendiri tidak menggunakan media itu dalam menyelesaikan setiap persoalan, seperti persengketaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pilihan ke Mahkamah

Internasional lebih dipercaya daripada lewat TAC. Dan masih banyak lagi kasus-kasus antar negara anggota yang juga akan lebih memilih media internasional itu sebagai penyelesaian akhirnya. Sementara kalau kita lihat negara-negara di luar ASEAN justru menyetujui untuk menandatangani TAC sebagai komitmen mereka untuk tetap konsisten dengan TAC.<sup>18</sup> Bagi negara-negara non Asia Tenggara, TAC baru diberlakukan sejak KTT ASEAN 1987 di Manila. Mereka itu termasuk Jepang, China, India, Pakistan, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru. Sementara Australia yang beberapa waktu lalu masih dalam proses mempelajari dokumen TAC, kini telah menyetujui dan menandatangani TAC.

Yang *ke dua*, perlunya segera dihasilkan tentang institusionalisasi ASEAN secara benar. Artinya, diperlukan satu kelembagaan tetap dimana di dalamnya terdapat fungsi sekretariat yang benar-benar memiliki wewenang untuk mengatur negara-negara anggotanya. Ini satu persyaratan mutlak sebelum menuju Masyarakat ASEAN. Penting untuk diingat bahwa jika menginginkan satu Masyarakat ASEAN terbentuk berarti sebelumnya harus melalui satu pentahapan dalam Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Politik dan sebagainya. Sama halnya dengan Masyarakat Eropa (Uni Eropa) yang di dalamnya terdapat persamaan nilai, mempunyai lembaga untuk membuat keputusan bersama dan mengikat, di bawah satu bendera, memiliki aturan ekonomi bersama, memiliki mata uang bersama dan sebagainya. Yang jelas atas nama Komunitas ASEAN akan mewakili semua kepentingan negara anggotanya. Otoritas negara, karenanya, menjadi diperlemah di bawah Komunitas ASEAN. Dalam kondisi demikian, apakah siap ASEAN menuju ke sana? Jika itu tercapai, besar kemungkinan persoalan identitas ataupun eksistensi ASEAN maupun persoalan “driving force” nya justru akan tetap tegak dan bahkan semakin kuat.

---

<sup>18</sup>James Luhulima NB, “Komunitas Asia Timur, Bobolnya Politik Luar Negeri Indonesia”, *Kompas*, 29 Desember 2004.

Peran Indonesia di dalam ASEAN tampaknya masih dibutuhkan. Peran yang demikian juga diakui oleh perwakilan China di Indonesia,

“China expects Indonesia can play a leading role in ASEAN. One way is by getting Indonesian scholars/academics actively involve in the discussion on regionalism issues as already happened in Singapore and Thailand.”<sup>19</sup>

Apa makna pengakuan China bagi Indonesia? Sebagaimana diketahui China menjadi satu kekuatan ekonomi dan militer yang “disegani” di wilayah Asia bahkan di Pasifik, termasuk Amerika Serikat. Kekuatannya yang demikian kini dirasakan sebagai “pesaing” ketat bagi Amerika. Lebih-lebih setelah Perwakilan Amerika yang berkunjung ke China melihat begitu berkembangnya kekuatan nuklir China. Dan ini dicemaskan Amerika sebagai ancaman ke depan. Jika China menginginkan peran kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN berarti ia mempercayakan Indonesia untuk menentukan arah dan kiprah ASEAN dalam tingkat yang lebih luas.

## Penutup

Ide Komunitas Asia Timur yang akan dilaksanakan pertemuan perdananya di Malaysia (Desember 2005) memang belum menghasilkan apa-apa. Penilaian baik buruk terhadapnya bisa dilakukan setelah kita melihat apa yang dihasilkan dalam kesepakatan KTT Asia Timur nanti (*East Asia Summit*). Namun jika melihat dari pemaparan di atas, ide EAC masih sangat jauh untuk dicapai mengingat masih banyak dan kompleksnya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dengan kata lain, tahapan yang harus dilalui ialah dimulai dari *ASEAN Plus Three* (APT) menuju *East Asia FTA* (EAFTA) kemudian mencapai *East Asia Economic Integration* (EAEI) dan baru tercipta *East Asia Community* (EAC). Namun masalahnya, kemudian, semua itu bisa tercapai dengan dua

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ms. Wang Jianqun, Counsellor, Kedutaan Besar Republik Rakyat China, Jakarta, 11 Mei 2005.

kemungkinan, bersama ASEAN sebagai “driving force” ataukah tanpa ASEAN karena lenyap.

Indonesia jelas menginginkan ASEAN tetap menjadi penentu, sementara Jepang yang sebenarnya kurang berminat dengan EAC, lebih berorientasi pada ASEAN ataupun APT saja. Sedangkan China yang tetap menginginkan peran menonjol Indonesia di ASEAN memberi “lampu hijau” bagi Indonesia untuk melangkah dalam perjuangan ASEAN. Jika dukungan dari dua negara yang secara ekonomi kuat tetap ada, tak mustahil ASEAN dengan visi *ASEAN Community*-nya akan berjalan sesuai rencana. Lalu bagaimana dengan kelangsungan posisi *East Asia Community* di hadapan *ASEAN Community*. Salah satu dari kedua itu tampaknya bisa jadi kandas.



## Bab VI

# TANTANGAN PERLUASAN KOMUNITAS ASIA TIMUR

*Dewi Fortuna Anwar*

### **Pengantar**

Berbeda dengan kerjasama regional pada umumnya, yang dimulai secara *top down* dengan dibentuknya wadah atau institusi yang mendorong terjadinya kerjasama di berbagai bidang, seperti dapat dilihat dari perkembangan ASEAN, kerjasama di lingkungan Asia Timur justru berkembang secara *bottom up*. Tanpa ada suatu institusi yang memayungi berbagai kerjasama yang berkembang, interaksi yang terjadi antara Jepang, Korea Selatan dan China dengan negara-negara ASEAN berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan ekonomi dan perdagangan negara-negara ASEAN dengan Jepang dan Korea Selatan sudah terjalin dalam waktu yang relatif lama, dan sejak terjadinya krisis keuangan di Asia Timur pada pertengahan 1997, intensitas hubungan negara-negara ASEAN dengan tetangganya di Utara semakin meningkat, baik secara bilateral antar-negara, antara ASEAN dan masing-masing negara maupun dalam wadah ASEAN+3 (China, Jepang, Korea Selatan). Belakangan ini muncul keinginan untuk memformalkan hubungan yang selama ini terbentuk secara berlapis-lapis (*multi-layered*) menjadi suatu entitas yang lebih koheren dalam rangka membangun Komunitas Asia Timur yang menyatukan dua sub-kawasan yang sekarang ini masih terpisah.

Meskipun ide perluasan regionalisme yang meliputi seluruh kawasan Asia Timur ini mendapat banyak dukungan yang antusias, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, tidak sedikit pula yang memandang gagasan ini dengan skeptis dan pesimis. Pandangan yang skeptis melihat ide membangun Komunitas Asia

Timur ini sebagai suatu gagasan yang menarik dan mungkin dapat terwujud dalam jangka panjang, namun realisasinya tidak akan dapat dipaksakan dalam jangka pendek dan menengah.<sup>1</sup> Masalahnya, terlalu banyak kendala di lapangan yang tidak mudah untuk diatasi. Berikut ini beberapa hambatan terciptanya Komunitas Asia Timur dalam waktu yang dekat:

Perbedaan tingkat ekonomi antara para anggota sehingga menyulitkan kerjasama ekonomi yang akan melibatkan/mengikat seluruh anggota.

- Perbedaan sistem politik yang cukup tajam menyulitkan terbentuknya tujuan bersama dalam bidang politik.
- Masih banyaknya konflik-konflik yang sulit diselesaikan, terutama di Asia Timur Laut.
- Beban sejarah dan rivalitas antara Jepang dan China dalam interaksi regional dan global.
- Kekhawatiran negara-negara ASEAN atas dominasi salah satu negara besar di Asia Timur, dan akan terjadinya marginalisasi ASEAN.
- Keinginan sebagian negara ASEAN untuk melakukan konsolidasi dan membangun *ASEAN Community* terlebih dahulu.
- Keinginan ASEAN untuk selalu/selamanya duduk di kursi pengemudi proses regionalisme yang diperluas.
- Perbedaan visi tentang tujuan dan strategi suatu Komunitas Asia Timur, seperti terlihat dari perdebatan mengenai keanggotaan "East Asia Summit" pertama di Kuala Lumpur bulan Desember 2005.
- Kemungkinan oposisi Amerika Serikat terhadap Komunitas Asia Timur yang eksklusif yang tidak mengikutsertakan AS.

---

<sup>1</sup>Jusuf Wanandi, "Challenges of building an East Asian Community", *The Jakarta Post*, 7 April 2005.

## Hambatan Terbentuknya Komunitas Asia Timur

### 1. Perbedaan Ekonomi dan Politik

Dewasa ini telah terbentuk dua kerjasama regional yang dimotori ASEAN dengan cakupan yang lebih luas, yaitu APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan ARF (*ASEAN Regional Forum*), yang anggotanya terbentang di dua sisi Samudera Pasifik. Baik APEC maupun ARF merupakan dua forum kerjasama yang bersifat longgar, tanpa didukung organisasi permanen ataupun aturan-aturan yang mengikat. Walaupun APEC tetap melakukan pertemuan tingkat tinggi setiap tahun, belakangan ini 'gregetnya' dirasakan semakin berkurang. Hal ini antara lain karena perbedaan prioritas antara anggota yang maju dan yang berkembang, sehingga banyak negara lebih tertarik untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan, misalnya melalui kawasan perdagangan bebas, dalam kawasan yang lebih kecil ataupun secara bilateral. Kondisi inilah yang antara lain mendorong lahirnya ide untuk membangun Komunitas Asia Timur yang menyatukan Asia Timur Laut (China, Jepang, Korea Selatan) dan Asia Tenggara (negara-negara ASEAN), sebagai tindakan "counter-regionalisme" atas berdirinya NAFTA (*North America Free Trade Agreement*) dan yang lain.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, integrasi ekonomi sudah berjalan secara alamiah di wilayah Asia Timur selama beberapa dekade, yang terutama dimotori oleh investasi perusahaan-perusahaan Jepang, Korea Selatan, ataupun perusahaan *Multinational Companies* (MNC) dari Amerika Serikat dan Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir perdagangan antara sesama anggota kawasan juga meningkat dengan pesat. Kerjasama keuangan juga mulai dijajaki, seperti *Chiang Mai Initiative*, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali krisis finansial seperti pada pertengahan tahun 1997. Meluasnya krisis finansial dengan cepat di kawasan ini juga menunjukkan adanya interdependensi yang tinggi di antara kedua sub-kawasan di Asia Timur.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan Asia Timur merupakan wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang

besar serta heterogenitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang sangat tinggi. Kenyataan ini telah menyulitkan terciptanya suatu organisasi regional yang sifatnya terstruktur dan mengikat, yang mencakup seluruh kawasan. Di lingkungan ASEAN saja, perluasan ASEAN dari enam negara menjadi sepuluh negara telah menyulitkan pendalaman kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi untuk sementara menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang terdiri dari dua lapis (*two-tiered organisation*), sehingga target-target yang telah disetujui dalam rangka *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) harus dibedakan waktu pencapaiannya antara negara-negara yang relatif lebih maju (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan yang lebih terbelakang (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam). Perbedaan dalam sistem politik, khususnya dalam tingkat keterbukaan politik, juga mempersulit perkembangan kerjasama di bidang politik. ASEAN baru menargetkan terbentuknya *ASEAN Community*, yang terdiri dari tiga tonggak yaitu *ASEAN Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Socio-cultural Community*, pada tahun 2020.

Heterogenitas di antara negara-negara di kawasan Asia Timur yang lebih luas tentu lebih tinggi lagi. Dilihat dari perspektif ekonomi di satu sisi ada Jepang, yang merupakan negara adidaya ekonomi, dan di sisi lain ada Kamboja, Laos dan Myanmar, yang masuk kategori "Least Developed Countries". Antara kedua spektrum tersebut terdapat negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam situasi demikian jelas sangat sulit untuk membentuk suatu kerjasama ekonomi, apalagi Komunitas Ekonomi (sebagaimana Komunitas Ekonomi dipahami seperti terdapat di Eropa dan ingin dibentuk ASEAN) yang dapat melibatkan seluruh negara anggota secara keseluruhan. Hal yang paling mungkin terjadi dalam jangka pendek dan menengah adalah semakin meningkatnya upaya menjalin hubungan perdagangan bebas (FTA) secara bilateral di antara beberapa negara ASEAN dan negara-negara di sebelah Utara (Jepang, China dan Korea Selatan) atau antara ASEAN secara keseluruhan dengan masing-masing negara tersebut. Di samping itu negara-negara di kawasan ini juga

menjalin hubungan perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kawasan, misalnya antara Singapura dan Amerika Serikat. Pada saat bersamaan semua negara anggota *World Trade Organisation* (WTO) juga berupaya menyelesaikan Putaran Doha (*the Doha Round*) untuk menciptakan kesepakatan baru yang dapat memajukan perdagangan dunia secara lebih berkeadilan antar kepentingan negara-negara maju dan berkembang.

Dewasa ini substansi lebih diutamakan daripada wadah atau bentuk kerjasamanya. Seperti ditulis Naoko Munakata,

"Previously the forum came first and substance was taken up only when it fitted the forum. Now substance comes first and the forum is tailored to deal with the substance as chosen or devised as necessary. Bilateral arrangements have become available as the smallest alternatives among various fora from which to choose. Thus, a multi-layered approach where bilateral, regional and global frameworks are developed in parallel is firmly in place in East Asian policy circles."<sup>2</sup>

Proliferasi berbagai jaringan ekonomi di kawasan ini suatu saat nanti diharapkan dapat mendorong terciptanya komunitas ekonomi Asia Timur yang bersifat "over-arching" dan lebih terstruktur. Namun tidak ada jaminan ke arah tersebut, karena FTA yang dilakukan secara bilateral ataupun sub-regional tidak dapat diasumsikan otomatis akan menjadi "building block" regionalisme yang lebih luas. Bisa saja yang terjadi adalah terbentuknya berbagai interaksi yang mungkin saling tumpang-tindih, membingungkan atau kompetisi yang saling merugikan, namun dipertahankan karena sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sementara anggotanya. Tentu jauh lebih mudah bagi Jepang dan Singapura untuk membentuk FTA, karena Singapura tidak memiliki sektor pertanian, sektor yang sangat dilindungi di Jepang. ASEAN dan China telah sepakat membentuk FTA pada tahun 2010, tapi FTA antara China dan Jepang atau Korea

---

<sup>2</sup>Lihat Naoko Munakata, "Wither East Asian Economic Integration". RIETI Discussion Paper Series 02-E-007, June 2002.

Selatan dan Jepang diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan negosiasi yang lebih alot.

Istilah "Komunitas" menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan antara sesama anggota dalam hal-hal yang bersifat fundamental, yang menjadi pengikat kelompok tersebut dan membedakannya dari kelompok lain. Komunitas memiliki identitas bersama, memiliki cara pandang yang sama dalam hal-hal yang mendasar dan memiliki tujuan bersama, serta memiliki kesepakatan tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian suatu komunitas bukan sekedar suatu perkumpulan atau forum yang longgar. Dalam organisasi internasional ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar suatu kerjasama regional dapat dikategorikan sebagai suatu "Komunitas", apakah Komunitas Ekonomi (*Economic Community*) ataupun Komunitas Keamanan (*Security Community*). Komunitas Ekonomi menunjukkan terintegrasinya perekonomian negara-negara anggota, antara lain meliputi penyatuan kepabeanan, pasar bebas dan adanya keleluasan pergerakan barang dan jasa antar-negara anggota.<sup>3</sup> Komunitas Keamanan menyaratkan tidak ada lagi potensi konflik bilateral yang dapat memicu ketegangan bersenjata, sehingga keberadaan kekuatan militer tidak lagi masuk dalam kalkulasi hubungan antara sesama anggota dalam kawasan yang bersangkutan.<sup>4</sup> Seperti telah disinggung sebelumnya, *ASEAN Community* direncanakan baru akan terbentuk pada tahun 2020, dan seperti diketahui jalan menuju ke arah tersebut tidaklah mudah. Selain di bidang ekonomi, perbedaan-perbedaan dalam bidang politik dan banyaknya sengketa bilateral yang belum diselesaikan secara tuntas juga membuat kesepakatan untuk suatu hasil yang optimal sulit dicapai.

---

<sup>3</sup>Lihat H.W.Arndt, "Anatomy of regionalism", dalam Ross Garnaut & Peter Drysdale (ed), *Asia Pacific Regionalism: Readings in International Economic Relations*. Pymble, NSW: Harper Educational Publishers, 1994.

<sup>4</sup>Definisi tentang "Security Community" pertama kali dipopulerkan oleh Karl W. Deutsch. Lihat Karl Deutsch et.al. *Political Community and the North Atlantic Area; International Organisation in the Light of Political Experience*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1957.

Di kawasan Asia Timur banyak peluang kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang dapat dikembangkan, seperti telah dikemukakan oleh *East Asia Vision Group* (EAVG). Apabila semua usulan tersebut dapat dilaksanakan tentu saja rasa kebersamaan dan kemampuan untuk bertindak bersama, salah satu ciri suatu komunitas, bisa berkembang. Dalam hal-hal yang tidak menyentuh sensitivitas politik, kerjasama kemungkinan besar dapat dikembangkan. Namun seperti telah disinggung di atas, pembentukan Komunitas Asia Timur perlu didasari kesamaan visi dan misi dalam hal-hal yang mendasar. Mengingat bahwa di kawasan Asia Timur terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup besar dalam sistem politik, dimana beberapa negara menganut sistem demokrasi, sebagian merupakan negara komunis yang hanya mengizinkan satu partai, dan salah satu negara diperintah rezim militer yang mengambil alih kekuasaan secara paksa, tentu bukanlah hal yang mudah untuk menyatukan tujuan politik.

Saran EAVG agar negara-negara di kawasan Asia Timur "encourage domestic efforts to promote peace, stability, social harmony, respect for the rule of law, accountability, and democratic progress as desirable common goals in their respective national polities"<sup>5</sup> pasti sangat sulit untuk dilaksanakan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana negara-negara Asia Timur dapat mendorong demokratisasi, penegakan hukum (*rule of law*) dan "good governance" (tata kelola yang sehat) di antara sesama anggota, sementara salah satu prinsip yang dianut adalah tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dalam kawasan ASEAN yang lebih kecil saja, tidak ada kemampuan atau kemauan untuk mendorong proses demokratisasi di Myanmar, atau menegur anggota yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hal inilah yang menyebabkan ASEAN, setelah hampir empat puluh tahun berdiri, masih belum menjadi "ASEAN Community". Forum kerjasama regional Asia Timur, apabila hanya terjalin melalui

---

<sup>5</sup>Final Report of the East Asian Study Group, hal. 15. ASEAN+3 Summit, Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002.

kerjasama fungsional terbatas tanpa ada persamaan prinsip-prinsip dasar yang menyatukan visi dan misi serta aturan-aturan yang mengikat negara-negara anggota, hanyalah akan merupakan suatu asosiasi yang longgar, bukan suatu "Komunitas" sebagaimana dipahami dalam literatur tentang organisasi regional.

Bagi ASEAN, keinginan untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN, termasuk dengan menjalin kerjasama ASEAN+3 antara lain ialah untuk meningkatkan vitalitas dan relevansi ASEAN. Dengan demikian, ASEAN berkeinginan untuk mengontrol proses kerjasama regional sebagai bagian dari aktivitas ASEAN, dimana ASEAN berfungsi sebagai sumbu (*hub*) dan negara-negara lainnya yang terlibat kerjasama sebagai jari-jari (*spokes*). ASEAN, khususnya beberapa negara anggota seperti Indonesia, akan menolak upaya untuk membangun Komunitas Asia Timur yang diperluas, yang keanggotaannya bersifat individual, karena hal demikian akan melenyapkan kohesivitas dan kekuatan tawar-menawar ASEAN. Sebagai pembuat gagasan, ASEAN ingin tetap berada di "driver seat". Pada tahap awal semua pihak tampaknya menerima kondisi seperti ini, namun akan menjadi tanda tanya sejauh mana, dan seberapa lama ASEAN mampu, dan diterima oleh anggota lainnya, untuk tetap berfungsi sebagai sumbu suatu Komunitas Asia Timur yang lebih bersifat Pan-Asia.

Dalam jangka pendek dan menengah Komunitas Asia Timur barulah akan menjadi suatu wacana dan impian. Meskipun demikian bukan mustahil, impian ini suatu saat nanti akan menjadi kenyataan, apabila wacana tentang pembentukan Komunitas Asia Timur mampu mendorong negara-negara anggota untuk menjalin kerjasama yang semakin intensif dan saling menguntungkan, serta menyelesaikan berbagai konflik dan perbedaan yang selama ini menyulitkan terbentuknya organisasi regional yang lebih luas dan mengikat. Namun perlu diingat bahwa untuk merealisasikan *ASEAN Community* dalam sub-kawasan yang lebih kecil dan tradisi



kerjasama regional yang cukup lama tidaklah mudah.<sup>6</sup> Di dalam kawasan Asia Timur yang begitu luas dan heterogen, serta sejarah hubungan antara-bangsa yang kurang mendukung, tantangan untuk membangun visi dan misi bersama sebagai landasan "East Asia Community" tentu lebih banyak lagi.

## 2. Potensi Konflik dan Rivalitas China-Jepang

Adanya konflik antara negara bertetangga tidaklah selalu menjadi penghambat terjalannya kerjasama yang erat, baik secara bilateral maupun regional. Dalam beberapa kasus, terjadinya peperangan atau konflik justru menjadi pendorong utama dibentuknya kerjasama regional, seperti dapat dilihat dari lahirnya Uni Eropa dan ASEAN. Beberapa kali peperangan yang menghilangkan nyawa ratusan ribu jiwa dan kehancuran ekonomi negara-negara Eropa telah mendorong Jerman dan Perancis, dua negara yang merupakan musuh bebuyutan untuk memelopori kerjasama ekonomi tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir. Kerjasama ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan yang semakin tinggi dan luas sehingga akan sangat sulit bagi satu negara untuk memerangi tetangganya tanpa mencederai dirinya sendiri. Adanya musuh bersama, yaitu ancaman komunisme dari Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet juga menjadi pemicu bagi negara-negara Eropa Barat untuk bergabung dalam Komunitas Ekonomi Eropa. Komunitas Ekonomi Eropa berubah bentuk menjadi Komunitas Eropa setelah integrasi ekonomi tercapai,

---

<sup>6</sup>Indonesia membuat rancangan pemebentukan ASEAN Security yang cukup komprehensif dan mengandung beberapa gagasan yang cukup "radikal", antara lain tentang pentingnya memajukan demokrasi, melindungi hak asasi manusia (HAM) dan membentuk Komisi HAM ASEAN, membentuk pasukan perdamaian (*Peace Keeping Force*) ASEAN. Gagasan Indonesia ini dinilai terlalu maju oleh sebagian besar negara anggota lainnya sehingga versi yang disetujui dalam ASEAN Summit di Denpasar, Bali pada tahun 2003 sudah banyak direvisi mengikuti kehendak anggota yang tidak ingin ASEAN menjadi terlalu jauh mengintervensi masalah politik dalam negeri masing-masing.

berupa pasar tunggal Eropa, dan berikutnya menjelma menjadi Uni Eropa yang menunjukkan terintegrasinya Komunitas Eropa (walaupun belum meliputi seluruh negara anggota) dalam masalah politik luar negeri, keamanan, mata uang, keimigrasian dan beberapa hal penting lainnya. Salah satu kunci keberhasilan kerjasama regional Eropa adalah kemauan Jerman, sebagai agresor Perang Dunia II, untuk mengakui kesalahannya serta keberhasilan Jerman untuk menggalang kerjasama dengan Perancis, negara yang pernah diduduki Jerman. Hal tersebut mampu menghilangkan kecurigaan negara-negara lain terhadap Jerman.

Walaupun dalam skala yang lebih kecil dan tingkat kerjasama yang lebih rendah, sejarah ASEAN juga menyerupai perjalanan Uni Eropa. ASEAN didirikan setelah *Konfrontasi* antara Indonesia dan Malaysia yang menimbulkan guncangan politik dan kehancuran ekonomi di Indonesia serta ketidakstabilan di wilayah Asia Tenggara. Tujuan awal ASEAN bukanlah integrasi regional, mengingat negara-negara pendiri ASEAN masih berjuang mempertahankan kedaulatan masing-masing, melainkan sebagai asosiasi longgar agar negara-negara anggota menjadi saling kenal dan saling percaya satu sama lain. Keberhasilan ASEAN, terutama pada tahun-tahun awal berdirinya banyak disumbang oleh Indonesia, negara anggota terbesar yang merupakan agresor dalam *Konfrontasi*. Indonesia merupakan motor utama berdirinya ASEAN dan senantiasa aktif menjaga keutuhan ASEAN, namun selalu menjaga agar tampil *low profile* agar tidak dicurigai ingin mendominasi organisasi regional tersebut oleh para anggota lainnya. Kerjasama ASEAN pada masa-masa awal juga didorong oleh adanya persepsi tentang ancaman bersama, yaitu ancaman komunisme dari China dan Vietnam.<sup>7</sup> Walaupun telah berumur hampir empat dasawarsa dan telah memulai upaya-upaya ke arah integrasi ekonomi, sampai dewasa ini ASEAN baru mampu meredam konflik, belum menyelesaikannya. Hal ini ikut menyulitkan pembentukan

---

<sup>7</sup>Lihat Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994.

Komunitas ASEAN, yang sekarang telah menjadi agenda resmi ASEAN. Namun keinginan untuk meredam konflik agar kawasan Asia Tenggara menjadi damai sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi tetap merupakan *raison d'etre* utama ASEAN.

Konflik di masa lalu juga tidak menghalangi hubungan yang semakin baik antara negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara di bagian Utara, khususnya Jepang dan China. Walaupun Jepang pernah menduduki Asia Tenggara selama Perang Dunia II, sikap negara-negara Asia Tenggara terhadap Jepang pada umumnya cukup positif. Jepang merupakan investor utama dan telah menjadi mitra dialog ASEAN sejak hubungan ini dikembangkan. Demikian juga hubungan ASEAN dengan China dalam dekade terakhir berkembang pesat, seiring dengan perubahan orientasi politik luar negeri dan ekonomi China yang semakin terbuka dan bersahabat. Dari negara yang tadinya dipandang sebagai ancaman utama terhadap keamanan ASEAN, China telah menjelma menjadi salah satu mitra ASEAN. Meskipun demikian, pengalaman pahit masa lalu belum sepenuhnya dilupakan, sehingga negara-negara Asia Tenggara tetap menolak hegemoni salah satu atau kedua kekuatan regional tersebut. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut di bawah.

Yang menjadi penghalang utama terbentuknya Komunitas Asia Timur yang lebih luas adalah dinamika hubungan negara-negara di Asia Timur Laut, dimana konflik di masa lalu masih sangat mendominasi hubungan intra-regional sampai saat ini.<sup>8</sup> Jepang menjajah Korea dalam waktu yang relatif lama, sejak abad kesembilan belas sampai akhir Perang Dunia II, dan menduduki China menjelang dan selama Perang Dunia II dengan brutal. Berbeda dengan Jerman yang mengakui kesalahannya di masa lalu secara terbuka sehingga ia dapat diterima baik oleh negara-negara korban agresinya, Jepang dianggap belum sepenuhnya mau mengakui kesalahannya terhadap negara-negara yang menjadi korban kejahatan

---

<sup>8</sup>Lihat Eric Teo Cheow, "Aftershocks in Southeast Asia". *Asia Times*, May 24, 2005.

perangnya. Hal ini terlihat dari penulisan buku sejarah Jepang yang cenderung membenarkan tindakan Jepang di Korea, China dan Asia Tenggara, serta kunjungan yang berulang kali dilakukan Perdana Menteri Jepang ke Kuil Yasukuni, tempat korban Perang Dunia II dimakamkan, termasuk para pemimpin militer yang telah dijatuhi hukuman sebagai penjahat perang.

Negara-negara eks-jajahan Jepang di Asia Tenggara pada umumnya tidak terlalu peduli dengan dua masalah di atas, namun lain halnya dengan China dan Korea. Kedua perbuatan Jepang tersebut dinilai oleh China dan Korea (Utara dan Selatan) sebagai bukti bahwa Jepang belum berubah dan tidak peka terhadap perasaan negara-negara tetangga yang pernah menjadi korban kekejamannya. Isu pengaburan sejarah dan kunjungan Perdana Menteri Jepang ke kuil Yasukuni secara berkala memanasakan hubungan Jepang dengan Korea (Utara dan Selatan) dan China (termasuk Taiwan).<sup>9</sup> Walaupun Jepang merupakan investor utama yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan China, kedua negara terakhir tetap menaruh rasa dendam dan kecurigaan terhadap Jepang. Di samping itu, munculnya kembali aliran ultra-nasionalis di dalam negeri Jepang sendiri justru semakin menyulitkan pemerintah Jepang untuk melakukan pengakuan kesalahan secara substantif (termasuk di dalam buku teks sejarah). Hal ini misalnya dapat dilihat dari penunjukan tokoh konservatif Shinzo Abe sebagai Juru Bicara Pemerintah dalam pergantian Kabinet Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada tanggal 31 Oktober 2005. Abe dikenal "hawkish"—lebih memilih penggunaan kekuatan militer dari pada pendekatan diplomatis—dalam masalah keamanan dan sangat kritis terhadap China namun populer di kalangan publik Jepang. Abe diprediksi banyak pengamat sebagai calon kuat pengganti Koizumi sebagai pemimpin partai penguasa LDP.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>"Hu warns of 'instant' diplomatic damage". *The Japan Times*: May 23, 2005.

<sup>10</sup>George Nishiyama, "Koizumi reshuffles Cabinet, hints on successor". *The Jakarta Post*, 1 November, 2005.

Di samping itu, upaya menghidupkan dendam sejarah tidak dapat dipisahkan dari rivalitas antara China dan Jepang. Sebagai negara adidaya di bidang ekonomi, Jepang berambisi untuk meningkatkan perannya di lingkungan regional dan global. Jepang ingin kembali menjadi negara "normal" yang memiliki kekuatan militer yang dapat secara terbuka dipakai untuk pertahanan dan misi keamanan di luar negeri, serta berambisi untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini sangat ditentang oleh China. Di samping kekhawatiran bahwa Jepang akan kembali menjadi negara militer yang agresif dan ekspansionis, China tampaknya tidak ingin melihat Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer regional dan global, yang dapat menyaingi posisi China di kawasan Asia Timur. Selama Jepang dapat dicitrakan sebagai negara yang belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari masa lalunya sebagai agresor, ambisi Jepang untuk menjadi kekuatan regional dan global akan mendapat tantangan. Para pemimpin Jepang memang cenderung mengikuti kebijakan populis, seperti mengunjungi kuil Yasukuni, yang cukup populer di kalangan para nasionalis untuk kepentingan politik domestik, walaupun hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan bilateral dengan negara-negara tetangga terdekatnya. Di lain pihak, pemerintah di Beijing juga berkepentingan untuk menggalang opini publik menentang Jepang dalam kasus tersebut karena hal ini akan mengurangi kredibilitas internasional Jepang.<sup>11</sup>

Sampai saat ini negara-negara di lingkungan Asia Timur Laut belum memiliki suatu organisasi sub-regional yang permanen dan terstruktur seperti di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional yang telah terjalin lebih bersifat sektoral, misalnya untuk menangani krisis nuklir di Korea Utara, melalui forum *6 Party Talk*, meliputi RRC, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan dan Korea

---

<sup>11</sup>Sebagai Negara Komunis pemerintah China tidak memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk berkumpul menyuarakan pendapat yang kritis, apalagi melakukan demonstrasi. Tanpa dukungan pemerintah China tentu demonstrasi besar-besaran anti-Jepang yang beberapa kali berlangsung di Beijing di depan Kedutaan Jepang tidak mungkin terjadi.

Utara. Tradisi untuk berkumpul, berkoordinasi dan mengembangkan kerjasama dalam satu forum yang melibatkan China, Jepang dan Korea Selatan sebagai satu kelompok baru dimulai setelah *Asia Europe Meeting* (ASEM) dibentuk pada tahun 1995. Setelah ASEAN+3 dibentuk secara informal pada tahun 1997, dan diresmikan pada tahun 1999, China, Jepang dan Korea Selatan menjadi kelompok "Plus Three", yang bekerjasama dengan ASEAN dalam berbagai bidang. Walaupun jaringan interaksi antara China, Jepang dan Korea Selatan cukup intensif, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan, sampai saat ini belum ada indikasi bahwa ketiga negara tersebut akan berhasil membentuk suatu kerjasama sub-regional sendiri yang dapat meningkatkan rasa saling percaya dan meredam konflik antara sesama mereka, sebagaimana telah berhasil dilakukan ASEAN. Tanpa adanya hubungan intra-regional yang sehat di kawasan Asia Timur Laut, hubungan yang semakin intensif antara ASEAN secara bilateral dengan China, Jepang dan Korea Selatan sulit untuk menjelma menjadi Komunitas Asia Timur.

### 3. Sikap Negara-Negara ASEAN

Meskipun inisiatif untuk membentuk kerjasama yang lebih terstruktur dan mengikat di lingkungan Asia Timur datang dari Malaysia, salah satu anggota ASEAN, tidak berarti seluruh negara ASEAN mendukung ide tersebut. Malaysia memang sejak lama telah berupaya mendorong terwujudnya pengelompokan negara-negara Asia Timur yang eksklusif berdasarkan ras Asia, yang terdiri dari negara-negara ASEAN dan Asia Timur Laut (China, Jepang dan Korea Selatan). Perdana Menteri Mahathir Mohamad pertama kali memunculkan gagasan tentang *East Asia Economic Grouping* (EAEG) pada tahun 1990, sebagai tandingan bagi pengelompokan bangsa Eropa dalam Uni Eropa dan negara-negara Amerika Utara dalam NAFTA.

Amerika Serikat menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap gagasan pengelompokan negara-negara Asia Timur yang eksklusif, yang dinilai Washington dapat merugikan kepentingannya di kawasan ini. Amerika Serikat menekan Jepang dan Korea Selatan

untuk menolak gagasan EAEG tersebut. Negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Indonesia dan Singapura, juga menentang idea pembentukan EAEG. Akhirnya gagasan Mahathir tersebut kandas, walaupun ada dukungan untuk membentuk *East Asia Economic Caucus* yang lebih longgar dan tidak memiliki program kerja tersendiri. Namun EAEC juga ditentang Amerika Serikat dan Australia karena khawatir forum tersebut akan mengganggu perkembangan APEC.<sup>12</sup> Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Suharto lebih memprioritaskan dukungan pada ASEAN sebagai wadah kerjasama sub-regional dan APEC sebagai forum kerjasama lintas Pasifik yang memiliki prinsip regionalisme terbuka. Di samping khawatir atas dominasi Jepang atau China, Presiden Suharto juga diperkirakan menolak EAEG karena gagasannya dikemukakan secara terbuka oleh Mahathir tanpa membicarkannya terlebih dahulu dengan negara-negara ASEAN lainnya.<sup>13</sup>

Bab-bab sebelumnya telah membahas secara detail mengenai peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara negara-negara di kawasan Asia Timur, sehingga memunculkan gagasan dibentuknya Komunitas Asia Timur yang diperluas. Meskipun demikian, *East Asia Study Group* (EASG) yang mempelajari usulan-

---

<sup>12</sup>Richard Stubb, "ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?". *Asian Survey*, vol. xlii, no. 3, May/June 2002, hal. 441. Karena marah atas tindakan AS menggagalkan gagasan EAEG, Perdana Menteri Mahathir Mohammad menolak ketika Presiden Bill Clinton menyelenggarakan pertemuan puncak pemimpin APEC untuk pertama kalinya pada tahun 1993 di Seattle, Amerika Serikat.

<sup>13</sup>Presiden Suharto dikabarkan tidak senang dengan inisiatif Perdana Menteri Mahathir yang hendak mengambil kepemimpinan regional, menyaingi Indonesia. Presiden Suharto memang menunjukkan dukungannya yang tinggi terhadap APEC, seperti terlihat dari dukungan Indonesia atas Deklarasi Bogor pada pertemuan puncak APEC ke-dua pada tahun 1994. Meskipun selama ini Indonesia sangat hati-hati dalam mendukung liberalisasi perdagangan di lingkungan ASEAN, Suharto membidani lahirnya Deklarasi Bogor yang merencanakan liberasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik dengan target tahun 2010 untuk negara-negara maju, dan 2020 untuk negara-negara berkembang.

usulan *East Asia Vision Group* (EAVG) secara tegas mengatakan bahwa pembentukan Komunitas Asia Timur merupakan tujuan jangka panjang. Forum ASEAN+3 dinilai sebagai kendaraan utama untuk mendorong terciptanya Komunitas Asia Timur tersebut.

Seperti telah disinggung sebelumnya, ASEAN+3 merupakan suatu forum kerjasama yang longgar, yang tidak memiliki institusi tersendiri yang terpisah dari ASEAN. Bagi negara-negara ASEAN, kerjasama ASEAN+3 dimaksudkan untuk menembus keterbatasan modal dan pasar dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara *Plus Three* yang perekonomiannya lebih maju dan dinamis. Sebaliknya bagi negara-negara *Plus Three*, Asia Tenggara merupakan sumber komoditas primer dan pasar yang besar. Negara-negara Asia Tenggara, yang selama ini selalu melihat sumber ancaman utamanya datang dari "Utara", juga berharap bahwa dengan meningkatnya saling ketergantungan antara mereka, negara-negara *Plus Three* akan turut berkepentingan atas stabilitas dan kemakmuran ASEAN. Sebaliknya bagi negara-negara *Plus Three*, di samping keuntungan ekonomi, kerjasama dengan ASEAN juga memiliki nilai strategis, karena baik Jepang maupun China berkesempatan untuk memproyeksikan pengaruh masing-masing dalam kawasan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat menjadi pijakan untuk berperan pada tingkat global.

Namun dilihat dari sejarah perkembangan ASEAN, yang dimulai dari asosiasi longgar dengan agenda yang sangat terbatas, serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun suatu organisasi yang memiliki sedikit kewenangan supranasional, pembentukan Komunitas Asia Timur yang diperluas tentu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Di lingkungan ASEAN sendiri, suatu organisasi supranasional yang mengikat pada awalnya ditolak karena akan mengurangi kedaulatan negara-negara anggota serta membuka peluang dominasi anggota-anggota yang besar terhadap yang lebih kecil. Kekhawatiran atas dominasi Indonesia, yang pernah melakukan konfrontasi, tetap sedikit banyak mempengaruhi perkembangan ASEAN sampai saat ini. Kekhawatiran bahwa Komunitas Asia Timur akan didominasi oleh anggota yang lebih



kuat, khususnya oleh China dan/atau Jepang, yang keduanya memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang jauh melebihi ASEAN secara keseluruhan, sudah barang tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN.

*Pertama*, ada kekhawatiran bahwa fokus yang berlebihan pada upaya membangun Komunitas Asia Timur yang diperluas, sementara integrasi ASEAN sendiri masih jauh dari sempurna, akan semakin memperlumah persatuan ASEAN. Indonesia misalnya, yang sejak semula melihat ASEAN sebagai soko guru politik lura negerinya, menginginkan agar negara-negara ASEAN lebih memprioritaskan upaya-upaya untuk mewujudkan terbentuknya *ASEAN Community*. Selain mengintegrasikan negara-negara Asia Tenggara sehingga menjadi komunitas yang semakin kokoh dan makmur, ASEAN diharapkan dapat menjadi aktor utama dalam percaturan politik regional, termasuk dalam hal-hal yang lebih substantif, seperti ikut terlibat dalam pemeliharaan keamanan regional.

Kerjasama dengan pihak luar, termasuk dalam konteks ASEAN+3 dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan vitalitas dan relevansi ASEAN, bukan untuk menjadi pesaing ASEAN atau justru meleburkan identitasnya. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya menentang gagasan Malaysia untuk mendirikan sekretariat ASEAN+3 di Kuala Lumpur, dengan alasan bahwa koordinasi ASEAN+3 lebih baik dilakukan oleh Sekretariat ASEAN agar lebih efisien. Alasan utama penolakan pendirian sekretariat ASEAN+3 yang terpisah adalah untuk mencegah perkembangan ASEAN+3 yang berada di luar kendali ASEAN.

*Ke dua*, dalam Komunitas Asia Timur yang diperluas, keanggotaan pada akhirnya akan bersifat individual, seperti halnya dalam organisasi-organisasi regional lainnya, termasuk ASEAN. Dengan sendirinya daya tawar ASEAN sebagai satu kekuatan kolektif akan hilang. Situasi demikian tentu akan lebih menguntungkan negara-negara yang lebih besar dan kuat, serta dapat

memarjinalkan peranan negara yang relatif kecil dan lemah.<sup>14</sup> Indonesia sebagai negara terbesar dalam ASEAN, yang selama ini dipandang sebagai "primus inter pares", setidaknya pada masa sebelum krisis, akan terpinggirkan perannya, terutama apabila Indonesia belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah dalam negeri.

Di dalam ASEAN, budaya kerja yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa untuk menghindari dominasi satu anggota terhadap anggota-anggota lainnya. Komunitas Asia Timur yang lebih banyak dan beragam keanggotaannya diperkirakan sulit mengembangkan budaya saling tenggang rasa seperti yang selama ini telah dikembangkan ASEAN, yang di satu pihak baik untuk menjaga harmoni namun di lain pihak menjadi penghalang pendalaman kerjasama dalam hal-hal yang sensitif, seperti dalam masalah politik dan keamanan.

*Ke tiga*, ASEAN menginginkan untuk selalu berada dikursi kemudi proses kerjasama Asia Timur yang diperluas. Selama ini ASEAN memang merupakan satu-satunya wadah yang mampu memfasilitasi kerjasama regional di Asia Pasifik, baik di bidang politik maupun ekonomi, seperti dapat dilihat dari lahirnya APEC dan *ASEAN Regional Forum*, yang melibatkan Jepang dan China sekaligus. Hal ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal: 1) ASEAN telah berpengalaman menyelenggarakan pertemuan tahunan rutin dengan para mitra dialog dalam *Post Ministerial Meeting* sehingga tidak terlalu sulit bagi ASEAN untuk memfasilitasi jaringan-jaringan kerjasama baru yang anggotanya melibatkan sebagian mitra dialog ASEAN; 2) Sebagai organisasi negara-negara kecil dan menengah yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi ancaman bagi pihak lain, peranan ASEAN dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat; 3) Tidak ada aktor regional lain, baik negara ataupun organisasi subregional lainnya yang dapat memainkan peran yang selama ini dimainkan ASEAN. Keberhasilan Uni Eropa banyak ditentukan oleh

---

<sup>14</sup>Lihat R.M. Marty M. Natalegawa, "ASEAN+3 versus the East Asia Summit". Makalah yang disampaikan dalam pertemuan *Center for East Asian Cooperation* (CEACos) dan *The Jakarta Post*. 2005.

kepemimpinan Jerman dan Perancis dalam memperjuangkan agenda-agenda regional. Namun dalam Komunitas Asia Timur dua kekuatan regional utama, China dan Jepang belum mampu bekerjasama dengan baik, sementara kepemimpinan salah satu atau kedua negara tersebut juga belum dapat diterima oleh masing-masing pihak ataupun negara-negara sekawasan lainnya.

Keinginan ASEAN untuk selalu berada di kursi kemudi, selain karena peranan historis ASEAN sebagai penggagas ide dan fasilitator jaringan, tentu saja untuk menjaga posisi sentral ASEAN dalam setiap kerjasama baru dengan pihak luar yang lahirnya dibidani oleh ASEAN. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah marginalisasi ASEAN, terutama dalam forum kerjasama yang lebih luas, dimana beberapa anggota lainnya memiliki kemampuan riil jauh di atas yang dimiliki ASEAN. ASEAN tentu akan merancang agenda kerjasama dan tata kerja yang paling nyaman bagi dirinya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar serta tujuan ASEAN. Namun peran yang dimainkan ASEAN tersebut, yang menguntungkan posisi ASEAN, justru dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah baru.

Pada tahap awal peran fasilitator ASEAN penting untuk memulai suatu kerjasama baru, namun pada perkembangan berikutnya mungkin akan muncul ketidakpuasan atas gaya kepemimpinan ASEAN yang cenderung menghindari penanganan masalah-masalah yang sulit. Walaupun masih bertemu secara rutin, baik APEC maupun ARF dirasakan semakin kehilangan vitalitas karena ASEAN tidak mampu menjadi pengemudi yang dinamis, antara lain karena beberapa negara ASEAN sibuk menangani krisis di dalam negeri masing-masing. Di samping itu ASEAN cenderung mengutamakan proses sebagai bagian dari membangun saling kepercayaan, sementara sebagian negara anggota APEC dan ARF lainnya menginginkan hasil yang konkrit.

Dapat diperkirakan bahwa proses pembentukan Komunitas Asia Timur yang dimotori oleh ASEAN, seandainya hal tersebut disepakati sebagai tujuan bersama, akan mengikuti irama kerja ASEAN selama ini, yaitu mengutamakan proses daripada hasil,

minimalis dalam menentukan target, serta berusaha menghindari hal-hal yang sulit dan sensitif. Apabila *ASEAN Community* berhasil dibentuk pada tahun 2020, itu berarti sepuluh negara Asia Tenggara membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun untuk berintegrasi. Tentu tidak terlalu realistis untuk memprediksikan bahwa Komunitas Asia Timur, dengan jumlah anggota yang lebih banyak, lebih beragam dan memiliki banyak permasalahan antara sesama, akan dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan cepat dari apa yang dialami di lingkungan ASEAN yang lebih kecil selama ini.

#### **4. Perdebatan Tentang Asia Timur dan Sikap Amerika Serikat**

Menjelang Pertemuan Puncak Asia Timur (*East Asia Summit*) pertama yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2005, perdebatan hangat terjadi mengenai negara-negara mana saja yang akan diundang hadir oleh ASEAN, sementara agenda apa yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut tidak banyak dibicarakan. Dalam laporan yang dibuat *East Asian Vision Group*, Komunitas Asia Timur diharapkan akan terwujud dalam jangka panjang dari proses ASEAN+3 yang telah resmi dicanangkan sejak tahun 1999. Artinya Komunitas Asia Timur akan terdiri terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN dan tiga negara lainnya, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Pada pertemuan puncak ASEAN di Vientiane pada bulan Desember 2004, Malaysia mengusulkan agar *East Asia Summit* (EAS) diselenggarakan tahun berikutnya ketika Malaysia menjadi tuan rumah pertemuan puncak ASEAN. Malaysia mengusulkan agar negara-negara yang akan menghadiri EAS pertama di Kuala Lumpur hanyalah anggota kerjasama ASEAN+3 tersebut. Namun hal ini ditentang oleh Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya.

Indonesia diberitakan agak ragu-ragu mendukung gagasan penyelenggaraan EAS. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mendukung penyelenggaraan EAS karena pertemuan Vientiane adalah pertemuan puncak ASEAN yang pertama kali dihidirinya. Di samping itu Presiden Yudhoyono juga diberitahu

bahwa EAS hanya akan berlangsung sekali saja.<sup>15</sup> Seperti telah dibahas di atas, Indonesia sejak semula kurang mendukung gagasan pembentukan pengelompokan di wilayah Asia Timur berdasarkan ras.

Indonesia tidak ingin pengelompokan tersebut memberi peluang pada satu negara, khususnya China, negara dengan penduduk terbesar di dunia dan memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat serta kemampuan militer yang jauh melebihi negara-negara tetangganya, untuk mendominasi pengelompokan tersebut. Indonesia juga tidak ingin ASEAN+3 dilebur menjadi Komunitas Asia Timur, karena dengan demikian posisi strategis ASEAN serta kemampuan kolektifnya akan hilang dengan sendirinya dan setiap anggota harus berjuang secara sendiri-sendiri. Di lain pihak, apabila EAS hanya merupakan pertemuan lain dari ASEAN+3, maka ia hanya akan menyebabkan pemborosan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengusulkan agar EAS berbeda dan terpisah dari ASEAN+3, dengan keanggotaan yang diperluas dan agenda yang berbeda pula. Selain negara-negara *Plus Three*, Indonesia mendesak agar EAS juga perlu melibatkan India, Australia dan Selandia Baru. Namun ASEAN menetapkan bahwa negara-negara yang diundang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) harus telah menjadi mitra dialog ASEAN; 2) memiliki hubungan yang signifikan dengan ASEAN; serta 3) menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), yang merupakan "rule of conduct" yang mendasari kerjasama ASEAN.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Lihat Marty Natalegawa, *Ibid.*; Philip Bowring, "Doing the ASEAN Sidestep", *International Herald Tribune*, 3 Desember, 2005; dan Eric Teo Chu Cheow, "E. Asia Summit's birthing pains", *The Straits Times*, 22 Februari 2005.

<sup>16</sup>India dan Selandia Baru telah menandatangani TAC. Australia pada mulanya menolak untuk menandatangani TAC karena khawatir hal tersebut akan mempengaruhi ikatan pertahanannya dengan Amerika Serikat. Namun karena tidak ingin ditinggal oleh negara-negara lainnya di Asia Timur, akhirnya Australia menyatakan kesediannya untuk menandatangani TAC di saat pertemuan EAS di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2005.

Bagi ASEAN pada umumnya, dan Indonesia khususnya, forum kerjasama Asia Timur yang diperluas haruslah tetap menjamin posisi ASEAN sebagai pemegang kemudi. ASEAN ingin bertindak sebagai sumbu dari tiga jaringan, yaitu negara-negara *Plus Three* di Utara, India di sebelah Barat serta Australia dan Selandia Baru di Selatan. ASEAN menentang usul Jepang agar EAS memiliki ketua bersama (*co-chairs*), satu dari ASEAN dan satu dari luar ASEAN secara bergilir, seperti organisasi APEC. ASEAN ingin ketua hanya dipegang oleh negara-negara ASEAN secara bergantian.

Walaupun ada keinginan sebagian anggota untuk tetap menempatkan ASEAN+3 sebagai inti dari forum Asia Timur yang diperluas, dimana kesepakatan-kesepakatan penting akan diputuskan, sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan ditentang oleh India, Australia dan Selandia Baru yang tidak ingin diperlakukan sebagai anggota kelas dua. Dengan demikian EAS dan ASEAN+3 akan berjalan terpisah sesuai dinamika masing-masing, dan dalam kedua forum tersebut ASEAN diharapkan mampu untuk senantiasa memegang kendali. Dapat diperkirakan bahwa perluasan definisi Asia Timur sehingga memasukkan India, Australia dan Selandia Baru akan semakin mempersulit pembentukan Komunitas Asia Timur, mengingat semakin beragamnya para anggotanya.

Diperluasnya definisi Asia Timur dengan mengutamakan keanggotaan secara fungsional daripada georafis semata<sup>17</sup> sebenarnya telah menjadikan keanggotaan dalam EAS bersifat "open-ended" atau terbuka tentang negara mana saja yang dapat bergabung. Dalam hal ini posisi Amerika Serikat menjadi menarik. Amerika Serikat merupakan negara Asia Pasifik dan sebagai negara adidaya memiliki banyak kepentingan strategis di kawasan Asia Timur, baik di bagian Utara maupun Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat adalah aktor utama dalam percaturan

---

Lihat Paul Kelly, "The day foreign policy won Asia". *The Australian*, 6 Agustus, 2005.

<sup>17</sup>Istilah yang digunakan C.P.F. Luhulima, "Time to institutionalize East Asia Cooperation". *The Jakarta Post*, 18 Februari, 2005.

ekonomi, politik dan keamanan di kawasan ini. Apakah suatu saat Amerika Serikat dapat bergabung seandainya Washington menunjukkan minat, misalnya dengan menandatangani TAC?

Sikap Amerika Serikat terhadap penyelenggaraan *East Asia Summit* berbeda dengan sikapnya terhadap usul pembentukan *East Asia Economic Grouping* sebelumnya, yang ditentang keras oleh Presiden George Bush Senior. Presiden George W. Bush sekarang ini lebih berkonsentrasi pada perang melawan terorisme dan membutuhkan dukungan dari negara-negara lainnya, termasuk di Asia Timur. Selama negara-negara di kawasan Asia Timur menunjukkan komitmen untuk bersama-sama melawan terorisme, Washington tidak terlalu khawatir bila mereka membuat kesepakatan-kesepakatan di bidang ekonomi yang tidak melibatkan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menahan diri untuk tidak menyikapi penyelenggaraan EAS karena agenda pertemuan tersebut belum terlalu jelas.<sup>18</sup>

Meskipun demikian dapat diperkirakan bahwa sikap tidak hirau Washington akan berubah apabila EAS mendorong terbentuknya Komunitas Asia Timur yang kepentingannya berseberangan dengan Amerika Serikat. Washington mungkin akan menekan sekutunya, terutama Jepang dan Australia, untuk mencegah lahirnya Komunitas Asia Timur yang eksklusif dan/atau yang didominasi China, negara yang oleh Amerika Serikat dipandang sebagai pesaing utamanya yang paling potensial. Amerika Serikat mungkin juga akan mendorong agar APEC menjadi lebih dinamis dan tetap menjadi forum utama kerjasama ekonomi di lingkungan Asia Pasifik, di mana pertemuan para pemimpinnya juga membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk membicarakan masalah-masalah lain, termasuk masalah keamanan. Namun menarik untuk berspekulasi bagaimana kira-kira reaksi ASEAN dan anggota EAS lainnya apabila suatu saat Amerika Serikat ingin turut bergabung. Dapat dipastikan bahwa beberapa anggota *East Asia Summit* seperti

---

<sup>18</sup>Edward J. Lincoln, "The Bush Second Term and East Asian Economic Regionalism". New York: The Council on Foreign Relations, 2005.

Jepang dan Australia akan mendukung partisipasi Amerika Serikat dalam EAS, seandainya forum ini dilanjutkan. Kalau demikian "Quo Vadis" Komunitas Asia Timur?

## Penutup

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa sangat banyak tantangan untuk mewujudkan Komunitas Asia Timur yang lebih luas. Mungkin suatu saat nanti Komunitas Asia Timur akan muncul secara alamiah, walaupun masih akan terdapat perdebatan mengenai negara-negara mana saja yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari Asia Timur dan bagaimana bentuk "Komunitas" tersebut. ASEAN ingin tetap berperan sebagai juru kemudi dalam setiap inisiatif regional yang dimotorinya, sehingga negara-negara ASEAN tidak menginginkan pembentukan organisasi regional yang lebih luas yang keanggotaannya bersifat per negara. Dengan demikian, untuk sementara waktu di lingkungan Asia Timur akan terdapat beberapa wadah kerjasama regional yang keanggotaannya hampir serupa, namun masing-masing ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang berbeda. Faktor persamaan dalam tiap-tiap wadah kerjasama tersebut adalah peranan dan fungsi ASEAN sebagai inisiator dan motor kerjasama. Peranan ASEAN ini di satu pihak dapat menumbuhkan tradisi kerjasama Asia Timur yang lebih luas, termasuk menyediakan wadah kerjasama bagi negara-negara yang mungkin tidak memiliki hubungan bilateral yang baik, misalnya antara China dan Jepang serta Korea Selatan dan Jepang. Namun di lain pihak ASEAN tidak menginginkan akselerasi integrasi regional yang terlalu cepat yang dapat melemahkan daya tawar-menawar ASEAN. Negara-negara ASEAN juga khawatir bahwa suatu organisasi supra-regional di Asia Timur akan didominasi satu atau dua negara besar.

Dari berbagai analisis yang muncul menjelang diselenggarakannya *East Asia Summit* di Kuala Lumpur pada tanggal 14 Desember 2005, para penulis dari lingkungan ASEAN nampaknya tidak menghendaki suatu organisasi payung di Asia Timur yang akan melebur berbagai inisiatif regional yang selama ini



sudah berjalan. *East Asia Summit*, yang akan mempertemukan para pemimpin dari negara-negara ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru dilihat sebagai forum yang terpisah, dan tidak menduplikasi forum ASEAN+3 yang sudah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Seperti ditulis Tan See Seng dan Ralf Emmers dari *The Institute of Defence and Strategic Studies* (IDSS), Singapura:

“An Agenda for the East Asia Summit sees the EAS neither as a replacement for the APEC, ARF or ASEAN+3, nor as a surrogate for the host of functional mechanisms provided for under these regional frameworks. Rather the Summit complements these arrangements. Moreover, the EAS is a new grouping distinct from the ASEAN+3 and other institutional expressions in the region”.<sup>19</sup>

Bagi Indonesia, perkembangan di Asia Timur perlu disikapi dengan cerdas dan penuh kehati-hatian. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap yang tegas bahwa prioritas utama adalah konsolidasi ASEAN dalam rangka membangun *ASEAN Community*. Kerjasama dengan pihak ke tiga, apakah dalam wadah ASEAN+3 atau *East Asia Summit*, hendaknya dapat meningkatkan relevansi dan vitalitas ASEAN dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya serta memelihara perdamaian dan keamanan regional. Dengan demikian Indonesia, beserta negara-negara ASEAN lainnya perlu berhati-hati menanggapi inisiatif yang mungkin muncul untuk membangun Komunitas Asia Timur yang lebih luas, atau usul yang ingin mengambil alih sebagian peran ASEAN sebagai penggerak utama berbagai kegiatan regional tersebut.

Di lain pihak, Indonesia tidak dapat menutup mata atas kecenderungan munculnya dorongan yang besar di lingkungan Asia Timur untuk semakin merapatkan barisan guna menghadapi berbagai tantangan yang muncul, terutama tantangan ekonomi dan ancaman-ancaman non-tradisional. Kemampuan ASEAN untuk selalu berdiri di depan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan regional yang

---

<sup>19</sup>Tan See Seng and Ralf Emmers, “A 30-point agenda for the East Asia Summit. *Jakarta Post*, 6 December, 2005.

lebih luas sangatlah terbatas. Apabila sikap Indonesia berbeda dengan sebagian besar negara-negara ASEAN lainnya dalam memandang pentingnya perluasan Komunitas Asia Timur, tidaklah tertutup kemungkinan Indonesia, dan ASEAN secara keseluruhan, akan ditinggalkan. Munculnya berbagai inisiatif bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas, merupakan salah satu reaksi atas lambannya ASEAN secara keseluruhan menanggapi tuntutan-tuntutan yang muncul. Dengan demikian dalam menanggapi usul-usul pembangunan Komunitas Asia Timur sebaiknya Indonesia tidak hanya berperan sebagai “rem” atau “Mr. No” dalam ASEAN, tetapi juga mampu memberikan usul-usul alternatif untuk mengembangkan kerjasama yang dinilai dapat menguntungkan posisi ASEAN, yang juga cukup menarik bagi pihak-pihak lain sehingga mereka juga tertarik untuk mendukungnya. Walaupun inisiatifnya datang dari Malaysia, Indonesia hendaknya jangan sekedar memainkan peran sebagai penumpang belakang dalam inisiatif *East Asia Summit* yang kemungkinannya dapat berkembang menjadi suatu forum yang dinamis, mengingat adanya tiga anggota baru, India, Australia dan Selandia Baru. Indonesia dituntut untuk ikut menentukan kemana dan bagaimana arah perkembangan hubungan negara-negara di lingkungan Asia Timur dimasa-masa yang akan datang.

## Bab VII

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

*Yasmin Sungkar*

#### **ASEAN+3: Katalisator bagi Komunitas Asia Timur?**

Pada masa kini, kerjasama di bidang pembangunan sudah menjadi bagian integral dalam hubungan eksternal ASEAN. Kerjasama ini menjadi perekat yang bisa memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra dialognya, sekaligus menciptakan *comfort level* bagi keduanya untuk memperluas dan memperdalam kerjasamanya. Kerjasama ASEAN dengan mitra dialognya semakin terfokus pada empat hal, yaitu: memperkuat kerjasama ekonomi, mendukung integrasi ASEAN (termasuk mempersempit kesenjangan pembangunan), membicarakan isu transnasional, dan mempromosikan hubungan masyarakat. Kedua pihak juga semakin banyak menggunakan proses dialog untuk menciptakan mekanisme yang bisa meningkatkan jaringan ekonomi dan mempermudah arus investasi.

Strategi inilah yang membuat ASEAN lebih menengok ke Asia Timur karena adanya perubahan yang dinamis di tingkat regional dan global. Krisis keuangan 1997-1998 di Asia menyadarkan ASEAN dan mitranya di Asia Timur (Jepang, China dan Korea Selatan) bahwa mereka harus bekerja bersama-sama untuk menjamin stabilitas keuangan dan ekonomi makro di kawasan supaya dapat mencegah terulangnya krisis. Hal inilah yang membuat proses ASEAN+3—yang dimulai oleh ASEAN pada tahun 1997 dan menjadi resmi tahun 1999—merupakan sebuah mekanisme penting untuk menjamin perdamaian dan kesejahteraan kawasan Asia Timur. Dalam lima tahun terakhir, kerjasama ASEAN+3 sudah mencakup banyak aspek seperti sudah diulas dalam bab-bab sebelumnya.

Dengan demikian, menjadi jelas mengapa Mahathir tidak bersikeras melanjutkan gagasan *East Asia Economic Cooperation*

(EAEC), yaitu karena ia berhasil menggolkan gagasan yang lebih tinggi. Sebagai tuan rumah, tahun 1997 ia memainkan peran penting pada pertemuan ASEAN+3 yang pertama, yang kemudian disusul dengan pertemuan ASEAN+1 masing-masing dengan Jepang, China dan Korea Selatan. Pernyataan bersama ASEAN-China setuju bahwa, “the maintenance of regional peace and stability served the interest of all parties, they undertook to resolve their differences or disputes through peaceful means, without resorting to the threat or use of force.....”. Pernyataan bersama ASEAN-Jepang menyatakan kesungguhan “to work together to ensure that future generations would live in peace and stability and that social and economic development would be sustained”. Dalam pernyataan bersama ASEAN-Korea Selatan, kedua pemimpin setuju bahwa, “the stability and prosperity of Northeast and Southeast Asia were inter-linked and it was essential for both sides to work closely together for the mutual benefit of both regions”.<sup>1</sup> Dari sini nampak jelas bahwa tiga pernyataan terpisah di atas mengacu pada satu tema, yaitu bahwa kerjasama antara ASEAN dan masing-masing tiga negara Asia Timur akan menguntungkan dua pihak dan bisa menjadi landasan bagi kerjasama regional di Asia Timur.

Namun demikian, gagasan yang ideal ini harus mengingat juga kondisi yang berlangsung di dalam ASEAN sendiri. Negara mitra dialog tidak boleh lupa bahwa kerjasama ekonomi dengan ASEAN sangat tergantung pada seberapa cepat anggota baru ASEAN bisa mengejar ketertinggalannya dari anggota lama. ASEAN yang lebih terintegrasi akan memuluskan pengaturan perdagangan bebas dengan mitra dialog. Oleh karena itu adalah suatu indikasi yang positif jika mitra dialog bersama ASEAN membantu anggota baru ASEAN lewat program pembangunan sub-regional (Mekong Basin). Mereka juga membantu ASEAN untuk melaksanakan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI). Tanpa didahului usaha-usaha di tingkat yang lebih

---

<sup>1</sup>Termsak Chalermphanupap, “Towards an East Asia Community: The Journey Has Begun”. Makalah dipresentasikan pada Fifth China-ASEAN Research Institute Roundtable on Regionalism and Community Building in East Asia, 17-19 Oktober 2002.

awal, akan sulit menempatkan ASEAN+3 sebagai katalisator dalam menciptakan Komunitas Asia Timur.

### **Menuju Komunitas Ekonomi Asia Timur**

Maraknya regionalisme adalah suatu fenomena global karena baik negara kecil maupun negara besar telah menggunakan kesempatan ini untuk merespon perkembangan dan tantangan arus globalisasi. Mereka saling berintegrasi karena tidak mau tertinggal dalam arena persaingan bagi pasar ekspor dan investasi asing. Sementara negosiasi perdagangan multilateral berjalan sangat alot, negara-negara kecil mengharapkan regionalisasi ini bisa memperkuat posisi tawar mereka dan meraih pengaruh politik internasional. Proses integrasi ini mencakup aspek politik, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Dari semua itu aspek ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian dan lebih dulu bergerak. Tidak terkecuali, ekonomi di Asia Timur juga mengarah ke fenomena populer ini—pengaturan perdagangan bebas—setelah mengalami perubahan drastis dalam tatanan ekonomi di kawasan Asia beberapa tahun terakhir.

Apa yang sebenarnya menyebabkan ekonomi Asia Timur secara serius menuju ke integrasi ekonomi yang lebih kuat? Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi gerakan ini, dan berikut adalah dua alasan terpenting. *Pertama*, dan mungkin alasan yang paling kuat, adalah krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 yang meruntuhkan sebagian besar ekonomi Asia Timur dan mengakibatkan sebagian mereka mengalami resesi berat. Krisis ini menjadi “wake up call” bagi Asia Timur yang kemudian mendorong usaha mereka ke arah integrasi yang lebih kuat yang diperlukan untuk membuat kawasan ini lebih berdaya tahan terhadap serangan serupa di masa depan. *Ke dua*, liberalisasi perdagangan pada tingkat *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) tidak menghasilkan kemajuan yang berarti dan ditambah lagi dengan cepatnya perluasan integrasi ekonomi di daratan Eropa dan Amerika Utara. Uni Eropa sudah makin meluas dan menyambut negara-negara Eropa Timur untuk bergabung.

Perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara (Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko) sudah berjalan, walaupun masih diwarnai perselisihan—khususnya antara Amerika Serikat dan Kanada—dalam beberapa komoditi, seperti hasil kayu, baja dan hasil peternakan. Sementara itu ekonomi Asia Timur sangat bergantung pada ekspor dan keuntungan dari integrasi ekonomi, yaitu meningkatnya daya saing dan menguatnya daya tawar, yang mana bisa menjamin akses pasar secara berkelanjutan.

Ide *East Asia Economic Community* pertama kali dilontarkan dalam laporan *East Asia Vision Group* (EAVG) tahun 2001 dengan judul “Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress”. Dalam laporan ini digambarkan bahwa integrasi ekonomi Asia Timur nantinya akan menuju ke sebuah Komunitas Ekonomi Asia Timur. Sektor perdagangan, investasi dan keuangan akan menjadi katalisator dalam proses membangun komunitas tersebut. Sejalan dengan ini, EAVG mengusulkan dibentuknya *East Asia Free Trade Area* (EAFTA) dan *East Asia Investment Area* (EAIA). Ide ini berdasarkan pemikiran bahwa EAFTA akan memuat kawasan perdagangan bebas bilateral dan sub-regional di Asia Timur yang nantinya bisa meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara Asia Timur. Sudah mulai nampak bahwa pengaturan perdagangan bebas di Asia Timur mengambil bentuk “sumbu dan jari-jari” (*hub and spoke*), seperti ASEAN-China, ASEAN-Jepang dan ASEAN-Korea Selatan, serta Jepang-Singapura, Jepang-Thailand dan Jepang-Filipina. Apakah bentuk pengaturan ini akan mengganggu atau menguntungkan EAFTA yang lebih luas, sudah pasti diperlukan analisa yang lebih dalam dan hati-hati.

Di atas sudah diuraikan alasan kuat yang mendorong integrasi Asia Timur, tapi seberapa jauh sebenarnya negara-negara di Asia Timur siap melakukannya? Apa yang bisa menghambat keinginan untuk memperkecil jurang perbedaan antar mereka dan membentuk satu komunitas, yaitu Komunitas Asia Timur? Negara-negara di Asia Timur mungkin yang paling beragam jika dibandingkan dengan kawasan regional di belahan dunia lainnya. Keragaman ini nampak

di berbagai aspek, seperti: latar belakang sejarah, sistem politik, struktur ekonomi, serta dimensi agama, sosial dan budaya. Sebagai contoh, dari segi struktur ekonomi, di satu sisi Jepang adalah negara industri yang sangat maju dan di sisi lain Laos dan Kamboja masih sangat bergantung pada pertanian. Dari segi struktur politik, Asia Timur terdiri dari sistem demokrasi dan sosialis. Banyak contoh lain yang sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya.

Di samping masalah perbedaan di berbagai aspek di atas, ada tiga hal penting yang bisa menjadi indikasi untuk melihat seberapa siap negara-negara Asia Timur melangkah ke Komunitas Ekonomi Asia Timur, yaitu:

1. Tingkat pembangunan ekonomi dan pendapatan nasional. Berdasarkan angka *World Bank 2005*<sup>2</sup>, pendapatan per kapita Jepang yang mencapai 37.180 dolar AS, Singapura 24.220 dolar AS dan Korea Selatan 13.980 dolar AS adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 550 dolar AS, Laos 390 dolar AS dan Kamboja 320 dolar AS.
2. Derajat integrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Sebagian besar negara-negara ASEAN+3 sudah lama menjadi anggota WTO. China dan Kamboja belakangan sudah bergabung dalam WTO, sementara Laos dan Vietnam masih harus melengkapi prosedur menjadi anggota.
3. Derajat dan pengalaman dalam integrasi ekonomi. Terlepas dari seberapa jauh keberhasilannya, boleh dibilang negara-negara ASEAN sudah lama berpengalaman dalam integrasi ekonomi dengan menjalankan *Preferential Trading Arrangement* (PTA) sejak 1977 dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) sejak 1992. Sementara negara yang lain termasuk pendatang baru dalam pengaturan perdagangan bebas.

Kenyataan lain adalah ekonomi negara anggota ASEAN relatif kecil dari segi tingkat pembangunan dan ukuran pasar, dibandingkan dengan tetangganya di Asia Timur, yaitu Jepang, China dan Korea

---

<sup>2</sup>[http://news.bbc.co.uk/1/hi/country\\_profiles/default.stm](http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm)

Selatan. Di tingkat global, blok regional tumbuh dengan kuat di Eropa dan Amerika Utara, sementara hal ini belum terjadi di Asia. Pandangan yang optimis mengatakan bahwa Asia Timur harus merespon situasi ini dengan menunjukkan pada dunia bahwa dengan keragaman di berbagai aspek, masih ada peluang bagi negara-negara Asia Timur untuk melakukan kerjasama, koordinasi dan integrasi yang lebih dekat. Bila Komunitas Ekonomi Asia Timur terlaksana, berarti akan tercipta sebuah pasar yang besar dengan dua milyar penduduk atau hampir sepertiga penduduk dunia. Perdagangan yang mengalir dalam kawasan Asia Timur akhir-akhir ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan ekonomi antar 13 negara. Dengan demikian, berbagai pengaturan perdagangan bebas di kawasan bisa menaikkan arus perdagangan dan menjadi makin penting dalam proses menuju Komunitas Ekonomi Asia Timur.

Saat ini negara-negara Asia Timur bisa dikelompokkan dalam tiga kategori: negara maju (Jepang dan Singapura), negara berkembang (China, Korea Selatan dan ASEAN-6), dan negara kurang berkembang (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). Tajamnya perbedaan tingkat pembangunan nyatanya tidak menyurutkan keinginan membentuk Komunitas Ekonomi Asia Timur, justru perlu diambil manfaatnya. Perusahaan manufaktur bisa memanfaatkan spesialisasi dan pembagian kerja regional. Industri-industri di negara maju yang memerlukan tenaga kerja rendah bisa direlokasi ke negara-negara yang kurang berkembang. Dengan demikian, integrasi ASEAN dengan Asia Timur akan menciptakan potensi ekonomi yang memberi keuntungan berarti bagi masyarakat Asia Timur di samping menciptakan "sense of belonging" terhadap komunitas regional yang lebih besar dan meningkatkan daya tawar di arena perdagangan multilateral serta pengaruh politik internasional.

Namun demikian, tantangan membangun Komunitas Asia Timur masih akan terus berlanjut. Bagaimana mengintegrasikan 13 negara yang memiliki perbedaan dalam sistem politik, ideologi, latar belakang sejarah, struktur ekonomi dan tingkat pembangunan, menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Mengingat sensitivitas tiap negara perlu dipertimbangkan, maka menggabungkan berbagai



pengaturan perdagangan bebas yang ada untuk membentuk satu kawasan perdagangan bebas adalah sebuah pekerjaan yang rumit. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang pesimistis bila percaya bahwa akan memerlukan waktu lama untuk sampai pada komunitas yang didambakan tersebut, tapi lebih bersifat pandangan realistik.

## Rekomendasi

Pemimpin ASEAN telah menyetujui bahwa *East Asia Summit* yang pertama nanti akan bermula dari proses inklusif yang terpisah dari ASEAN+3 yang sudah dipilih sebagai mekanisme kerjasama yang utama. Diterimanya India dalam forum baru ini, berarti Asia Timur sudah memasukkan negara demokrasi terbesar di dunia yang sudah tentu akan menambah dinamika di kawasan ini. Perluasan ini ditambah lagi dengan keinginan Australia dan Selandia Baru dari kawasan di bagian Selatan untuk ikut serta. Perkembangan terakhir ini merupakan suatu hal yang baru bagi ASEAN, dan meningkatkan citra positifnya di mata internasional.

Selama berpuluh-puluh tahun ASEAN sangat menjaga teritorinya dan dengan ketat mempertahankan bahwa inisiatif baru apapun dari asosiasi ini tidak akan mengurangi rasa persatuan, norma dan prinsip yang sudah dianut selama ini. Oleh sebab itu, citra non-eksklusif ini merupakan wajah baru ASEAN yang sebenarnya sudah lama didengungkan Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu kedua negara ini sangat mendukung pemikiran baru untuk membuka forum *East Asia Summit* bagi negara-negara mitra dialog lainnya di luar ASEAN+3. Dengan demikian *East Asia Summit* diproyeksikan akan menjadi motor pendorong yang penting bagi kawasan Asia Timur dan akan banyak tergantung pada sikap ASEAN selanjutnya. Apabila ASEAN mampu mempertahankan sikap *outward looking* yang tampak sekarang ini, maka *East Asia Summit* bisa berkembang dengan prospek yang positif. Meskipun demikian, sebagian anggota ASEAN masih merasa kuatir kehilangan pegangan atau larut dalam sebuah proses besar yang sebenarnya muncul dari inisiatif mereka sendiri. Oleh karena itu mereka ingin meningkatkan peran dan kendali ASEAN dengan berbagai usulan seperti pertemuan-

pertemuan *East Asia Summit* agar tetap dipimpin oleh ASEAN serta ASEAN berhak menentukan negara mana saja yang akan menjadi anggota *East Asia Summit* nantinya.

Beberapa rekomendasi yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

- Perluasan regionalisasi ASEAN—menjadi ASEAN+3, kemudian EAS, dan menuju EAC—perlu diikuti perluasan golongan yang seharusnya ikut terlibat dalam proses kerjasama ini. Selama ini baru sektor pemerintah, khususnya Departemen Luar Negeri dan Perdagangan di masing-masing negara, yang berinisiatif dan menentukan arah kerjasama. Padahal tujuan kerjasama regional ini pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Asia Timur. Oleh karena itu kalangan akademis, sektor non-pemerintah dan pengusaha harus disertakan dalam proses regionalisasi ini.
- Dengan berlangsungnya transformasi dari kerjasama ASEAN+3 ke arah *East Asia Summit* dalam waktu singkat, yang mana sebenarnya merupakan salah satu rekomendasi jangka panjang EASG, dan tanpa mengurangi keyakinan terhadap prospek regionalisasi yang lebih luas, ASEAN harus tetap memperjuangkan prioritasnya, yaitu membangun *ASEAN Community* dengan tiga pilarnya.
- Kerjasama ASEAN+3 yang semakin luas cakupan bidang kerjasamanya, bahkan tidak mustahil bisa menjadi ASEAN+6 di masa mendatang, membutuhkan institusi yang lebih fungsional sifatnya, tidak sekedar menjadi pusat administrasi.
- Salah satu konsekuensi dari perluasan regionalisasi dan pendalaman kerjasamanya adalah semakin banyaknya pertemuan di berbagai tingkat (kepala pemerintahan, menteri, pejabat senior, dan seterusnya) yang sudah tentu membutuhkan biaya yang makin tinggi. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara lain, misalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengurangi biaya tersebut.

- Indonesia harus memperhatikan beberapa hal untuk bisa merebut investasi asing, seperti: memperpendek waktu pengurusan perijinan, menyederhanakan birokrasi (*one roof service*), aturan penanaman modal paling tidak sama sederhananya dengan yang ada di Thailand dan Malaysia dan harus konsisten.
- Dalam hal daya saing Indonesia yang relatif rendah dan tuntutan untuk bisa bersaing, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian ialah: pemerintahan yang efisien dan efektif, sektor swasta dan pengusaha yang efisien, dan infrastruktur yang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel:

- Anwar, Dewi Fortuna, *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994.
- Arbi, Zlati (ed). Menuju Keamanan Komprehensif di ASEAN. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2003.
- Arndt H.W., "Anatomy of Regionalism", dalam Ross Garnaut & Peter Drysdale (ed), *Asia Pacific Regionalism: Readings in International Economic Relations*. Pymble, NSW: Harper Educational Publishers, 1994.
- "ASEAN Accelerates Integration of Priority Sectors", (World Wide Web document, URL: [www.aseansec.org/16620.htm](http://www.aseansec.org/16620.htm)., 29 November 2004).
- "ASEAN Plus Three Cooperation", (World Wide Web document, URL: [www.aseansec.org/16581.htm](http://www.aseansec.org/16581.htm)).
- ASEAN Secretariat, *Overview: Association of Southeast Asian Nations*, (World Wide Web document, URL: <http://www.aseansec.org/64.htm>).
- Asian Development Bank (ADB), *Asian Development Outlook 2004 Update*, ADB, Oktober 2004.
- Aslam, Mohamed, "The Impact of ASEAN-China FTA on ASEAN Economies", *The Indonesian Quarterly*, vol. xxxi, no. 3, 2003.
- Bowring, Philip, "Doing the ASEAN Sidestep", *International Herald Tribune*, 3 Desember 2005.

- Chalermphanupap, Termsak, "Towards an East Asia Community: The Journey Has Begun". Makalah dipresentasikan pada Fifth China-ASEAN Research Institute Roundtable on Regionalism and Community Building in East Asia, 17-19 Oktober 2002.
- Cheow, Eric Teo, "Aftershocks in Southeast Asia", *Asia Times*, 24 Mei 2005.
- Cheow, Eric Teo, "East Asia Summit's Birthing Pains", *The Straits Times*, 22 Februari 2005.
- Bergsten, C. Fred, "The New Asia Challenge", *Institute for International Economics*, Working Paper, no. 4, Maret 2000.
- "China-Peaceful Rise in Light and Shadow", *East Asian Strategic Review*, 2005.
- Deutsch, Karl dkk., *Political Community and the North Atlantic Area: International Organisation in the Light of Political Experience*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1957.
- Elek, Andrew. "The Challenge of Asian Pacific Economic Cooperation", *The Pacific Review*, vol. 4, no. 4, 1991.
- Hadi, Syamsul, dkk., "Komitmen Jepang dalam Membantu Indonesia", *Global Jurnal Politik Internasional*, vol. 6, no. 1, November 2003.
- "Hu Warns of 'instant' Diplomatic Damage", *The Japan Times*, 23 Mei 2005.
- Inkyo, Cheong, "FTA Policies of ASEAN and China and Prospects for a Bilateral FTA between ASEAN and China", *Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)*, 2002.
- Ito, Takatoshi, "Promoting Asian Basket Currency Bond", dalam *Developing Asian Bond Market*, Takatoshi Ito dan Yung Chul Park (ed), Australia: Asia Pacific Press, 2004.

- “Japan’s Leading Role in East Asian Regionalism-Toward Building an East Asian Community” , *East Asian Strategic Review* , 2005.
- Jiang, Guorong dan Robert MacCauley, “Asian Local Currency Bond Market”, *BIS Quarterly Review*, Juni 2004.
- Journal of Japanese Trade & Industry, Sept/Okt, 2002.
- Kelly, Paul, “The Day Foreign Policy Won Asia”. *The Australian*, 6 Agustus 2005.
- Kesavapany, K., *ASEAN And Emerging East Asia*, Makalah dipresentasikan di CSIS, Jakarta, 6 Juli 2005.
- Lincoln, Edward J., “The Bush Second Term and East Asian Economic Regionalism”. New York: The Council on Foreign Relations, 2005.
- Lipsey, Phillip Y., ” Japan’s Asian Monetary Fund Proposal”, *Stanford Journal of East Asian Affairs*, vol. 3, no. 1/Spring 2003.
- Low, Linda, “The East Asian Economic Grouping”, *The Pacific Review*, vol. 4, no. 4, 1991.
- Luhulima, CPF., “Time to Institutionalize East Asia Cooperation”, *The Jakarta Post*, 18 Februari 2005.
- Luhulima NB, James., “Komunitas Asia Timur, Bobolnya Politik Luar Negeri Indonesia”, *Kompas*, 29 Desember 2004.
- Munakata, Naoko, “Wither East Asian Economic Integration”. RIETI Discussion Paper Series 02-E-007, June 2002.
- Munakata, Naoko. “Talking Regional, Acting Bilateral: Reality of ‘FTA Race’ in East Asia.” (World Wide Web document, URL: <http://www.asahi.com/english/Heraldasahi/TKY200508040116.html>)
- Nishiyama, George, “Koizumi Reshuffles Cabinet, Hints on Successor”. *The Jakarta Post*, 1 November 2005.

Natalegawa, Marty, *ASEAN+3 versus the East Asia Summit*, DUTA-Indonesia and the World, April 2005.

*Pernyataan Pers Tahunan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, (World Wide Web document, URL: <http://www.kbri-bangkok.com/news/menlu-1-2003.htm>., 6 Januari 2004).

Radelet, Steven dan Jeffrey Sachs, "The East Asian Financial Crisis; Diagnosis, Remedies, Prospects", Mimeo, Harvard Institute for International Development, Maret 1998.

Regional Outlook: Southeast Asia 2005-2006, Singapore: ISEAS, 2005.

"Relasi China-Jepang Kembali Memanas", *Kompas*, 10 Desember 2005.

Ro, Jaebong, "Economic Cooperation Between ASEAN and Korea", *The Indonesian Quarterly*, vol. xxviii, no. 2, 2000.

Sharma, Shalendra D., "Asia: Economic Crisis and the IMF", *Survival*, Summer 1998, vol. 40, no. 2.

Sing, Lim Hua, "*Peranan Jepang di Asia*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

"*Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia Menghadapi Globalisasi*" Workshop Hasil Penelitian Kompetitif LIPI Program Daya Saing dan Isu 2003, Jakarta, 14-15 November 2003.

Sudo, Suelo, *Evolution of ASEAN-Japan Relations*, Southeast Asia Background series No. 6, 2005, Singapore: ISEAS.

Stubb, Richard, "ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?". *Asian Survey*, vol. xlii, no.3, May/June 2002.



- Sukarjaputra, Rakaryan. "KTT Ke-10 ASEAN: Memuluskan Jalan Perubahan ASEAN." (World Wide Web document, URL: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/26/ln/1399518.htm>., 26 Nopember 2004).
- Sukma, Rizal. "The Future of ASEAN: Toward A Security Community." Makalah dipresentasikan pada Seminar *ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation*. (World Wide Web document, URL: [http://www.indonesiamissionny.org/issuebaru/Mission/asean/paper\\_rizalsukma.PDF](http://www.indonesiamissionny.org/issuebaru/Mission/asean/paper_rizalsukma.PDF)., New York, 3 Juni 2003).
- Tan, See Seng and Ralf Emmers, "A 30-point Agenda for the East Asia Summit", *The Jakarta Post*, 6 Desember 2005.
- The Jakarta Post, 20 Juli 2004.
- The Japan Economic Review, January 2000.
- United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), *World Investment Report 2004: The Shift towards Services*, New York: UNCTAD, 2004.
- Vatikiotis, Michael, "EAEG Fails to Appeal", *Far Eastern Economic Review*, 28 Januari 1993.
- Wanandi, Jusuf. "ASEAN's Past and The Challenges Ahead Aspects of Politics and Security", dalam Simon S.C.Toy (ed), *Reinventing ASEAN*, Singapura: ISEAS, 2001.
- Wanandi, Jusuf, "ASEAN's Challenges for Its Future", *Pacnet*, no. 3, 1999.
- Wanandi, Jusuf, "Challenges of building an East Asian Community". *The Jakarta Post*, 7 April 2005. (World Wide Web document, URL:[http://news.bbc.co.uk/1/hi/country\\_profile/default.stm](http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profile/default.stm))
- (World Wide Web document, URL: <http://www.mfaic.gov.kh/AMM/Background%20Papers/ASEAN-ROK.htm>., 20 Juni 2005).

### **Hasil Wawancara:**

- Tim peneliti dengan Sugeng Rahardjo, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Departemen Luar Negeri Indonesia, Jakarta, 13 Mei 2005.
- Tim peneliti dengan Adrian Chung, First Secretary-political desk, Kedutaan Besar Republik Singapura, Jakarta, 17 Mei 2005.
- Tim peneliti dengan Eliver Radjagoekgoek, Direktur Kerjasama Regional, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional-Departemen Perdagangan, Jakarta, 17 Mei 2005.
- Tim peneliti dengan Ms. Wang Jianqun, Counsellor (Political), Kedutaan Besar Republik Rakyat China, Jakarta, 11 Mei 2005.
- Tim Peneliti dengan Masafumi Kuroki, Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, 23 Mei 2005.
- Hasil diskusi dalam *One Day Seminar* "ASEAN +3 and the Future of Regionalism in East Asia", Jakarta: P2P-LIPI, 8 Juni 2005.

### **Dokumen:**

- ASEAN+3 Document Series 1999-2004, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2005.
- Challenges Facing the ASEAN People: Report of the Second ASEAN People's Assembly. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2003.
- Final Report of the East Asian Study Group. ASEAN+3 Summit, Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002.
- Executive Summary dari "Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress", *East Asia Vision Group Report 2001*.
- "Japan Thailand FTA", (World Wide Web document, URL: [http://www.asahi.com/english/Herald\\_asahi/TKY200508040116.html](http://www.asahi.com/english/Herald_asahi/TKY200508040116.html))
- KOTIS, "Economic Cooperation Between ASEAN and South Korea", 2000.

**STATUS OF PROJECTS UNDER THE AEM+3 FRAMEWORK**  
**(As of 7<sup>th</sup> AEM+3 Consultations, 4 September 2004, Jakarta, Indonesia)**

**A. COMPLETED PROJECTS**

No	Project Name	Lead Shepherd (s)	Endorsement	Declared as Completed	Project Outcomes
1.	Training Program on Practical Technology for Environmental Protection	China Ministry of Foreign Trade and Economics Cooperation (MOFTEC)	3 <sup>rd</sup> AEM+3 4 May 2001 Siem Reap	5 <sup>th</sup> SEOM+3 24 March 2002 Yogyakarta	A one-full-month training program on 1-30 June 2001 was conducted in Suzhou, China. The executive agency is Suzhou Institute of Urban Construction and Environmental Protection. Participants were from Korea (2), Malaysia (2), Singapore (1), and Viet Nam (2).
2.	People-to-people Information Technology (IT) Transfer	Cambodia Ministry of Commerce	6 <sup>th</sup> SEOM+3 <sup>1</sup> 7 August 2002 Manila	5 <sup>th</sup> AEM+3 14 September 2002 Bandar Seri Begawan	-Japan provided 100 new computers to the CLMV Countries -Korea provided 75 new computers to each of CLMV. Within 2002, Korea provided 100 additional new computers as part of "East Asia Special Cooperation Initiative" project -China donated 100 new computers to Cambodia
3.	Software Development in the Mekong Basin Project	Thailand Mekong Regional Law Center (MRLC)	3 <sup>rd</sup> AEM+3 4 May 2001 Siem Reap	8 <sup>th</sup> SEOM+3 31 July 2003 Singapore	The project consists of 3 components: internship, English language skill training, and workshops on law, standards, and practices relating to investment and international trade.  China conducted and funded a training workshop on 6-26 July 2002 in Beijing. Focus was on international trade and investment theories and practices, with 20 participants from Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam.  Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) of Japan sponsored a training course on international trade and investment in Bangkok on 17-22 February

<sup>1</sup> Cambodia suggested to be considered as approved, because sufficient support had been obtained from +3 and ASEAN Member Countries, and also that some elements of the proposal had been in progress of implementation.

						2003. It was organized by Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) of Japan in cooperation with MRLC. 16 participants from the CLMV countries participated in the training.
4.	Seminar on Economic and Technological Development Zone	China China People University	5 <sup>th</sup> AEM+3 14 September 2002 Bandar Seri Begawan	9 <sup>th</sup> SEOM+3 25 March 2004 Bangkok		The seminar was held on 15 October – 5 November 2003 in Beijing. There were 10 subject lectures and 1 week of filed trip to Xi'an, Shanghai, and Suzhou.
5.	E-Commerce Training Program for ASEAN Countries	China Beijing International Telecommunication and Training Center	6 <sup>th</sup> AEM+3 3 September 2003 Phnom Penh	10 <sup>th</sup> SEOM+3 30 July 2004 Hue		The training program was held on 14 June – 2 July 2004 aiming at promoting technological exchange and cooperation with ASEAN countries in electronic commerce technology. 14 participant from 7 ASEAN member countries (Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, the Philippines, Thailand, Singapore and Viet Nam) attended the training programs.

**B. ON-GOING PROJECTS**

No	Project Name	Lead Shepherd (s)	Endorsement	Status/Remarks
1.	Strengthening the Competitiveness of ASEAN SMEs	Malaysia Ministry of International Trade and Industry (MITI)	3 <sup>rd</sup> AEM+3 4 May 2001 Siem Reap	1 <sup>st</sup> component: Attachment/Training Program China conducted "China-ASEAN Training and Exchange Program for SMEs in the Food Manufacturing Sector" on 14-26 May 2002 in Guangzhou and Beijing with 20 participants from ASEAN countries. Korea's Small Business Training Institute (SBTI) conducted a training course focusing on machinery and engineering sector on 10-19 June 2002. 15 participants from 8 ASEAN Member Countries (excl. Brunei and Myanmar) attended the programme. Subsequently in 2003, "Executive Training Program for ASEAN SMEs" (ETPAS) was held at SBTI in Korea for businessmen from all ASEAN countries (except Singapore). 4 separate sessions of 2 weeks each were conducted for 78 businessmen and government officials during the April – July 2003 period. SBTI continues to prepare for another executive training program scheduled for end-2004, which will involve about 80 SME

				<p>entrepreneurs and public officials from ASEAN Member Countries. SBTI will introduce new programs such as workshops and consultations with Korean SME businessmen so as to provide opportunities to reach a greater common understanding of the business environment of both sides.</p> <p>Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) of Japan, in cooperation with the Japan Design Foundation (JDF), held a five-day training on 12-16 May 2003 in Tokyo, focusing on the development of product design in the electric and electronics industry. 19 participants from 8 ASEAN Member Countries attended the program.</p>
		<p>Myanmar Ministry of National Planning and Economic Development</p>		<p><b>2<sup>nd</sup> Component: Exchange of Technical Information/Data</b></p> <p>A total fund of US\$ 94, 850 for 3 experts and creation of SMEs database had been allocated. This shall cover the cost for creation of database (US\$20,000) plus expenses for 3 experts consisting of professional fees for 2 months (US\$48,000), travel expenses to 10 countries (US\$ 16,800). However, local cost (hotel accommodation) for the experts, estimated at US\$24,000 was not included and the resolution of this issue is being considered by SEOM+3.</p> <p>However, the ASEN SME Agencies Working Group (SMEWG), at its 15<sup>th</sup> Meeting on 3-5 August 2004, agreed that the data collection exercise should be dropped and be replaced with the convening of a training program or workshop/seminar focusing on critical factors and determinants of success and enhanced competitiveness in electrical and electronics, machinery and engineering, and food industries.</p>
		<p>Malaysia MITI</p>		<p><b>3<sup>rd</sup> Component: Development of Linkages between SMEs and Large Manufacturing Companies:</b></p> <p>This component was already carried out together with the implementation of the first Component. The three industries concerned were food, machinery and engineering, and electrical and electronics industries.</p>

2.	Asian Common Skill Standard Initiative for IT Engineer	Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)	3 <sup>rd</sup> AEM+3 4 May 2001 Siem Reap	<p><u>Cooperation in promoting cross certification of IT skill standards</u></p> <p>Japan had concluded MOUs on cross certification for IT engineers examination systems with 8 Member Countries: India (Feb 2001), Singapore (Aug 2001), Korea (Dec 2001), China (Jan 2002), Philippines (Apr 2002), Thailand (Jun 2002), Viet Nam (Jul 2002), Myanmar (Nov 2002). Japan had been in consultations with Malaysia to conclude another MoU by end of 2004.</p> <p><u>Cooperation in establishing IT Engineer Systems</u></p> <p>Full-fledged examination systems had been implemented in the countries where MOUs on mutual certification had been concluded, including for Myanmar and Vietnam in January 2003.</p> <p>Japan conducted trial IT examination in Thailand, Vietnam, Myanmar, Philippines and Malaysia in 2001, and the first IT engineer examination was conducted in 2002 in Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam.</p> <p>Japan provides training courses in Japan for those who would take examination of IT engineers and conducts "training for trainers" for future instructors of each member country.</p> <p><u>Other Related Development</u></p> <p>Since May 2003 Japan had eased visa requirements for those who pass the examination from the Philippines and Vietnam, regardless of their academic background and career experience. Japan had also been implementing special treatment for trainees to pass IT Engineer Examination Systems, through easing of residency requirements for those who want to stay in Japan.</p>
3.	Conformity Assessment Development Program in Industrial Standard	Korea Korea Agency for Technology and Standard (KATS)	3 <sup>rd</sup> AEM+3 4 May 2001 Siem Reap	<p>A four-weeks training program on standardization and conformity assessment was conducted on 7 October – 2 November 2002 in Seoul. 13 experts from 8 ASEAN Countries participated in the course.</p>

	<p>4. ASEAN+3 Satellite Image Archive for Environmental</p>	<p>Thailand Geo-Informatics and Space Technology Agency (GISTDA)</p>	<p>3<sup>rd</sup> AEM+3 4 May 2001 Siem Reap</p>	<p>Based on the successful achievement of the program, the Korean government sponsored another training program on 30 November – 13 December 2003. 16 experts from product evaluation institutions of ASEAN countries participated in the program.</p> <p>In response to the request of ASEAN member countries, Korean extended the period of the program into 3 weeks starting from 2004. The schedule for 2004 is on 31 October – 20 November 2004, with 15 experts from 9 ASEAN Member Countries to be invited to participate.</p> <p>The 1<sup>st</sup> Meeting of the Working Group held on 20-21 December 2001 in Bangkok discussed issues such as project objectives; implementation plan, scope of cooperation, and project budget.</p> <p>The Working Group held its 2<sup>nd</sup> Meeting on 29-30 October 2002 in Korea Aerospace Research Institute in Seoul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thailand presented its revised pilot study report</li> <li>- Japan presented the outcomes of a pre-feasibility study</li> <li>- The study indicated that the project is essential and a supplementary feasibility study should be conducted, and be completed within 1 year.</li> <li>- Thailand to revise the project proposal and prepare a surveying form for the supplementary Feasibility Study.</li> </ul> <p>The 3<sup>rd</sup> Meeting (ASIAES-3) held on 13 January 2004 in Chiang Mai exchanged views on how to implement the project and concluded that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The satellite image archive system should first focus on imageries and in-situ data; it may later expand to other features such as research papers and tools and services development.</li> <li>- The project should focus on research cooperation and satellite image archive. According to the survey done by Japan on the way to implement the project, satellite image archives are needed in priority areas such as forest fires, floods, typhoons and deforestation.</li> </ul>
--	---	--	--	--

<p>The next meeting will be held after a prototype system has been implemented, currently scheduled to held back-to-back with Advanced Classification Ruling System (ACRS) Meeting in Chiang Mai in November 2004.</p>			
<p>The Asia e-Learning Network (AEN) Conference was held on 24 July 2002 in Tokyo, Japan, with the participation from Korea and ASEAN countries. The conference formally established the AEN and adopted the "AEN Tokyo Statement."</p>	<p>4<sup>th</sup> AEM+3 12 September 2001</p>	<p>Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)</p>	<p>Asia e-Learning Initiative</p>
<p>Some experimental activities of e-Learning System had been done by Japan in partnership with universities, educational organizations, and companies of ASEAN+3 countries. Four working groups had been established to address issues of standards and conformance, Multilingual Correspondence Contents Development, Corporate Education and Higher Education IDeR, and e-Learning content quality assurance.</p>			
<p>A website on had been developed since September 2002 (<a href="http://www.Asia-elearning.net">www. Asia-elearning.net</a>) to facilitate the provision and exchange of information regarding Asia e-Learning Network.</p>			
<p>The 2<sup>nd</sup> AEN Conference 2003 was held on 10-12 December 2003 in Tokyo to exchange information of e-Learning in each participating country and to strengthen cooperation with each other.</p>			
<p>The 3<sup>rd</sup> conference is scheduled to be held in Singapore in November 2004.</p>			
<p>- Cambodia-Korea Internet Plaza was opened on 25 November 2002 in Phnom Penh, and Viet Nam-Korea Internet Plaza was on 3 November 2003 in Ha Noi. - Korea dispatched IT Policy and Technology Advisory Group to Vietnam and Myanmar on 22-26 November 2002. During October-November 2003, Korea further dispatched 40 IT professionals to Myanmar.</p>	<p>5<sup>th</sup> AEM+3 14 September 2002 Bandar Begawan Sen</p>	<p>Korea Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT)</p>	<p>East Asia Special Cooperation Initiative</p>



<p>- International Symposium on Bridging the Digital Divide in East Asia was held on 14-15 November 2002 in Seoul. The 2<sup>nd</sup> symposium was subsequently hosted on 2-3 December 2003, also in Seoul with the participation of ASEAN+3 government representatives, e-ASEAN secretariat, and the World Bank representatives. Korea planned to arrange an international forum on digitalization of regional cultural heritage and information during the 2<sup>nd</sup> half of 2004.</p>	<p>- Korea invited 100 IT personnel from Member Countries to Korea for IT education in 2003, and invited additional 90 during the first half of 2004. Korea also dispatched 178 internet youth volunteers in 2003 to Member Countries for Computer literacy education, and dispatched 100 youth volunteers in first half of 2004.</p> <p>- ASEAN+3 IT and Telecommunication Industry Business Forum (ITBF) inaugural meeting was held on 11-13 November 2002.</p> <p>Korea's plan for 2004 also include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- To establish one information access center in one ASEAN country.</li> <li>- The 'IT Policy and Technology Advisory Group' will organize an IT industry joint forum while the Advisory Group is dispatched to member countries.</li> <li>- Provide the Korea IT Learning Program for IT trainees from ASEAN members to learn technologies and services rendered through Mobile network on 10 May – 30 July in Yong-In Korea.</li> </ul> <p>Korean Government had established the Korea training center of the World Bank Development Gateway Foundation (DGF) in Korea and planned to contribute US\$ 5 million the 2002-2005 period to implement IT training program for developing countries.</p> <p>Japan's CICC (Center of the International Cooperation for Computerisation) had conducted IT training in Tokyo during</p>

Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN + 3

7	Comprehensive Action Plan for ASEAN +3 SME Network	Korea Small Business Corporation (SBC)	5 <sup>th</sup> AEM+3 14 September 2002 Bandar Seri Begawan	<p>January-March 2003 period targeted to CLMV countries. Japan then dispatched her experts to conduct training in each of the CLMV countries during the August-October 2003 period. The number of participants in the training program is 20 from Cambodia, 20 from Lao PDR, 25 from Myanmar, and 19 from Viet Nam. Japan also sent out lawyers and experts on IT-related laws and regulations in cooperation with the Association of Japanese Lawyers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-The 1<sup>st</sup> Meeting of the ASEAN+3 SME Network Focal Point held on 12 June 2002 in Seoul discussed the basic concept, structure, and operating guidelines of the project.</li> <li>-The system construction for the ASEAN+3 SME Network was completed in November 2002.</li> <li>-April 2003 marked the official launching of the ASEAN+3 SME Network (<a href="http://www.asean3.net">www.asean3.net</a>), which is an integrated searching website for ASEAN+3 SMEs in the form of an e-Marketplace for business transactions between enterprises.</li> <li>-The 2<sup>nd</sup> Focal Point Meeting was held in October 2003 in Bangkok with financial support from Korea. The Meeting discussed, among others, possible improvements for the website.</li> <li>-Improvement of the website was completed in April 2004.</li> <li>-As of mid-July 2004, 382,397 items of company information and 57,054 electronic catalogues of commercial products had already been registered on the website.</li> </ul> <p>Korea requested for all member countries' cooperation to designate additional personnel to support existing focal point in providing information for establishment of database for SMEs and commercial items, and to promote this website to each member's own country.</p> <p>The project is aimed particularly at music, TV program and shooting location business with estimated budget of US\$ 33,335 to be funded by China, Japan and Korea.</p>
8	Promoting the Entertainment Industry within ASEAN and China, Japan, Republic of Korea	Thailand Department of Promotion of Export	5 <sup>th</sup> AEM+3 14 September 2002 Bandar Seri Begawan	

9	Asia e-Commerce Incubator	Thailand Singapore	6 <sup>th</sup> AEM+3 3 September 2003 Phnom Penh	<p>Thailand had circulated the action plan for implementation of this project in June 2003 for comments. There are 5 phases of project implementation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information gathering on member countries' entertainment industry, scheduled to be completed in November 2003;</li> <li>- Exchange of the information gathered in 1<sup>st</sup> stage to the nominated focal point of each country;</li> <li>- Organization of the Conference on "Entertainment Industry Forum For East Asia Market" for personnel from private and public sectors of entertainment business from ASEAN+3. Scheduled for November 2004;</li> <li>- Organization of Visits/Trade Missions, and</li> <li>- Project Evaluation of the above activities. Scheduled for May 2005.</li> </ul> <p>Thailand reported that her newly re-structured Ministry of Culture will set up a committee to expedite this project soon.</p>
				<p>The project aims at incubating new e-Commerce entrepreneur, establishing e-Commerce Repository, and creating e-Commerce entrepreneur community. The project consists of exchange of useful e-information (from government agencies, business sectors, academic institutions, as well as a joint virtual forum) and online training courses (developed by the virtual ASIA e-learning center).</p> <p>A virtual ASIA e-learning center will be established to develop e-commerce e-learning web site, thus facilitating greater participation of public and private sectors in global commerce. The Virtual ASIA e-Learning Center shall comprise of administrator team, focal point of each country, and experts from government agencies, private sector or academic institutions who will instruct the courses and be a consultant on the web site.</p>

10	ASEAN+3 Supply Chain Project	Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)	6 <sup>th</sup> AEM+3 3 September 2003 Phnom Penh	<p>The project will start in 2005. The duration of e-Commerce Online Training Courses will be 1 year, and could be continued with support from member countries.</p> <p>Current status of the 3 elements of the project:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Training courses on sophisticated logistics: Japan arranged a 2-week logistics management study program in February 2004; attended by participants from Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Viet Nam. In March 2004 Japan also held an extended 3 weeks training program, which include topics such as how to deal with palette, container, and logistics as a whole. More than 30 people attended this program. AOTS (Association for Overseas Technical Scholarships) of Japan organize supply chain management training course on 11-17 November 2004 for the CLMV countries and 1-7 December 2004 for other ASEAN countries</li> <li>- The Study of supply chain in East Asia: JETRO (Japan External Trade Organization) had conducted the supply chain research for East Asia during the period of December 2003 through March 2004 to find out the most suitable procurement/production network in this region. The report was distributed at the 10<sup>th</sup> SEOM+3 consultations.</li> <li>- AOTS conducted a two-week training course in logistics advancement on 3-16 February 2004, participated by 29 trainees from several countries. On 3-16 March 2004 AOTS also conducted unit load training course focusing on how to use pallets and containers, which was also very welcomed by the participants.</li> </ul>
----	------------------------------	---	---	---

## C. NEWLY APPROVED PROJECTS

No	Project Name	Lead Shepherd (s)	Endorsement	Status / Remarks
1	East Asia Free Trade Area (EAFTA) Expert Group	China Ministry of Commerce (MOFCOM)	7 <sup>th</sup> AEM+3 4 September 2004 Jakarta	The Expert Group will jointly study the feasibility of establishing EAFTA and propose short-term measures for enhancement of economic relations and promotion of trade and investment facilitation as well as medium to long-term measures for trade and investment liberalization in East Asia. The Expert Group will comprise of scholars, professors from research and academic organization of all member countries, and shall report to SEOM+3 and the final results to AEM+3 consultations.
2	Asia Contents Industry Seminar	Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)	7 <sup>th</sup> AEM+3 4 September 2004 Jakarta	<p>The 1<sup>st</sup> meeting is planned to be held in Beijing, China in April 2005 to notify group composition and make research outlines for the study.</p> <p>Japan intends to develop measures to promote the appropriate and active international distribution of contents East Asia culture (movies, videos, music, games, and comics), leading to solidifying the foundation of the contents industry in the greater East Asia region (including ASEAN).</p> <p>Japan planned to host a seminar schedule in October 2005 in order to build capacity of people involved in this area, focusing on improving business potential in contents, international trade and distribution. The seminar will incorporate both classroom and on-site training. In addition, the seminar will also feature opportunities for the exchange of views between Japanese and ASEAN contents business people.</p>

